



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN FASILITASI DESA TANGGUH BENCANA  
(STUDI KASUS DI DESA PANANJUNG DAN DESA  
PANGANDARAN, KECAMATAN PANGANDARAN,  
KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT)**

**TESIS**

**WAHYU HERIYADI  
1006832833**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JUNI 2013**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN FASILITASI DESA TANGGUH BENCANA  
(STUDI KASUS DI DESA PANANJUNG DAN DESA  
PANGANDARAN, KECAMATAN PANGANDARAN,  
KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kesejahteraan Sosial**

**WAHYU HERIYADI  
1006832833**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JUNI 2013**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Wahyu Heriyadi

NPM : 1006832833

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2013

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Wahyu Heriyadi  
NPM : 1006832833  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Tesis : Pelaksanaan Fasilitasi Desa Tangguh Bencana  
(Studi Kasus di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rissalwan Habdy Lubis, S.Sos, M.Si (.....)

Penguji : Marlina Adisty, S.Sos, M.Si (.....)

Penguji : Bagus Aryo, Ph.D (.....)

Penguji : Kania Saraswati H, S.Sos, M.Kesos (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2013

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Heriyadi  
NPM : 1006832833  
Kekhususan : Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan  
Program Studi : Pascasarjana Kesejahteraan Sosial  
Departemen : Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Pelaksanaan Fasilitasi Desa Tangguh Bencana (Studi Kasus di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

Yang menyatakan



(Wahyu Heriyadi)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dunia, raga, dan sastra, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan tesis di Program Pascasarjana Departemen Kesejahteraan Sosial Fisip UI. Dalam proses penulisan tesis ini saya mengucapkan terima kasih yang amat banyak atas doa, kebersamaan, dukungan, dan bimbingan kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Rissalwan Habdy Lubis, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing tesis, terima kasih telah memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan hingga penulisan tesis dan film dokumenternya dapat terselesaikan.
2. Dra. Ety Rahayu, M.Si. sebagai pembimbing akademis yang telah memberikan persetujuan IRS setiap semesternya sehingga menunjang kelancaran akademis.
3. Bagus Aryo, PhD sebagai penguji dan ketua sidang baik itu pada proposal tesis maupun sidang tesis, terima kasih atas saran-saran dan masukan kritisnya.
4. Arif Wibowo, M.Hum sebagai penguji pada proposal tesis, terima kasih atas saran dan masukannya.
5. Marlina Adisty, M.Si sebagai penguji ahli dari BNPB pada sidang tesis, terima kasih atas saran dan masukannya.
6. Kania Saraswati H, M.Kesos sebagai sekretaris sidang tesis, terima kasih telah memberikan masukan dari segi penulisan.
7. Dosen-dosen di Pascasarjana Kesejahteraan Sosial atas perkuliahannya yang menginspirasi, khususnya Prof Dr. Bambang Shergi Laksmono, MSc., Dr. Fentiny Nugroho, dan juga Prof. Isbandi Rukminto Adi, PhD.
8. Staf Departemen Kesejahteraan Sosial, Valent, Cece, Tinton, melalui mereka kegiatan akademis dapat berjalan dengan lancar.

9. Teman-teman di Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Fisip UI atas kebersamaannya dalam perkuliahan, mengerjakan tugas dan penelitian lapangan, serta kegiatan nonformal lainnya seperti makan bersama dan pulang kuliah bersama, sehingga tanpa terasa satu persatu menyelesaikan studinya.
10. Informan dari BNPB, BPBD Kabupaten Ciamis, Desa Pangandaran dan Desa Pananjung, terima kasih atas kesediaannya dalam meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga dari informasi mereka penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
11. Kedua orang tua, Herman Otong dan Yuyun Sriwahyuni, terima kasih atas dukungan, doa dan kepercayaannya. Serta adik-adik, Dharyanto Tito Wardani dan Lutfi Pradnya Dewi, ayo kalian harus lebih maju dan berkembang. Serta mertua, Dzikri Adlan dan Maria Arfa, semoga selalu diberikan kesehatan.
12. Istri tercinta Imelda, M.Hum, terima kasih atas puisi dan gairah kehidupan yang setiap hari kita jalani, dan juga mimpi-mimpi untuk mewujudkan hak asasi bahasa.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan desa tangguh bencana, dan juga semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

Depok, 28 Juni 2013

Penulis

## ABSTRAK

Nama : Wahyu Heriyadi  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul : Pelaksanaan Fasilitasi Desa Tangguh Bencana (Studi Kasus di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)

Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang rawan bencana tsunami, BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Ciamis menyelenggarakan fasilitasi desa tangguh bencana di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung. Penelitian ini menganalisis lima aspek dari Twigg (2007) mengenai masyarakat tangguh bencana, yaitu: pemerintah, asesmen resiko, pendidikan dan pengetahuan, manajemen resiko dan pengurangan kerentanan, serta kesiapsiagaan dan respon bencana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lima aspek tersebut tidak sepenuhnya terlaksana karena adanya kesenjangan antara dokumen-dokumen perencanaan dan kebijakan desa. Selain itu, FKDM bentukan dari hasil fasilitasi tersebut intensitas kegiatannya semakin berkurang, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana tidak dapat terlaksana.

Kata kunci:

Tsunami, desa tangguh bencana.

## ABSTRACT

Name : Wahyu Heriyadi  
Study Program : Social Welfare  
Title : The Implementation of Disaster Resilience Village Facilitation  
(Pangandaran and Pananjung Villages case studies,  
Pangandaran Sub-district, Ciamis Regency, West Java  
Province)

Ciamis regency belongs to the riskiest tsunami area so that BPBD of West Java and Ciamis organize to facilitate disaster resilient villages in Pangandaran and Pananjung. This research is trying to analyze Twigg's (2007) five aspects of disaster resilient community i.e., governance, risk assessment, knowledge and education, risk management and vulnerability reduction, disaster preparedness and response. The research found that not all of the five aspect implement due to the gap between document planning and local government policy. Additionally, the activity of FKDM which was formed through facilitating process is decreasing so that the community empowering can not be accomplished.

Key words:

Tsunami, disaster resilient village.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Metodologi Penelitian .....	13
1.5.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	13
1.5.2. Lokasi Penelitian .....	15
1.5.3. Teknik Pemilihan Informan .....	16
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
1.5.5. Teknik Analisa Data .....	20
1.5.6. Teknik Meningkatkan Kualitas Penelitian .....	21
1.5.7. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	22
1.6 Sistematika Penulisan .....	24
2. TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI DAN MASYARAKAT TANGGUH BENCANA	
2.1 Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana .....	26
2.2 Fasilitasi .....	31
2.3 Bencana .....	36
2.3.1 Definisi Bencana .....	36
2.3.2. Tipe Bencana .....	40
2.3.3. Bencana yang Terjadi di Kabupaten Ciamis .....	44
2.4 Manajemen Bencana .....	44
2.5 Kebijakan Penanggulangan Bencana .....	49
2.6 Kebijakan dan Program Desa Tangguh Bencana .....	51
2.7 Komunitas Tangguh Bencana .....	52
2.8 Alur Pikir Penelitian .....	57

3. GAMBARAN UMUM DESA TANGGUH BENCANA DI DESA PANGANDARAN DAN DESA PANANJUNG KABUPATEN CIAMIS	
3.1 Gambaran Umum .....	59
3.2 Desa Tangguh Bencana .....	64
3.3 Program Rekompak-JRF .....	70
3.4 Desa Pananjung .....	75
3.5 Desa Pangandaran .....	78
4. HASIL PENELITIAN	
4.1 Pemerintah .....	83
4.1.1 Kebijakan Desa Tangguh Bencana .....	83
4.1.2. Model Fasilitasi Desa Tangguh Bencana .....	84
4.1.3 Output Fasilitasi Desa Tangguh Bencana .....	86
4.1.4 Upaya Integrasi Ketangguhan Bencana Kedalam Perencanaan dan Kebijakan Desa .....	87
4.2 Data dan Assesmen Resiko .....	89
4.2.1 Data dan Assesmen Bahaya/Resiko .....	89
4.2.2 Data dan Assesmen Kerentanan/Kapasitas .....	91
4.3 Pendidikan dan Pengetahuan .....	94
4.3.1 <i>Publik Awareness</i> , Pengetahuan, dan Keahlian .....	94
4.3.2 Manajemen Informasi dan Sharing .....	95
4.3.3 Pendidikan dan Pelatihan .....	96
4.3.4 Budaya, Perilaku, Motivasi .....	99
4.4 Manajemen Resiko dan Pengurangan Kerentanan .....	100
4.4.1. Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan .....	100
4.4.2. Perlindungan Sosial .....	102
4.5 Kesiapsiagaan dan Respon Bencana .....	104
4.5.1 Kapasitas Organisasi dan Koordinasi .....	104
4.5.2 Sistem Peringatan Dini .....	107
4.5.3 Kesiapsiagaan dan Perencanaan Kontinjensi .....	109
4.5.4 Respon Kedaruratan dan Pemulihan .....	111
4.5.5 Partisipasi dan Kerelawanan .....	114
5. PEMBAHASAN	
5.1 Pembahasan Pemerintah .....	116
5.2 Pembahasan Data dan Assesmen Resiko .....	117
5.3 Pembahasan Pendidikan dan Pengetahuan .....	119
5.4 Pembahasan Manajemen Resiko dan Pengurangan Kerentanan .....	120
5.5 Pembahasan Kesiapsiagaan dan Respon Bencana .....	121
5.6 Pemberdayaan Masyarakat .....	123
6. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan .....	129
6.2. Saran .....	131
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Korban Bencana Tsunami Pangandaran Tahun 2006 .....	2
Tabel 1.2 Pemilihan Informan .....	18
Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	22
Tabel 2.1 Perbandingan “ <i>Problemposing Approach</i> ” dan “ <i>Banking Approach</i> ” .....	33
Tabel 2.2 Definisi Bencana .....	37
Tabel 2.3 Berbagai Macam Bencana dan Definisinya .....	41
Tabel 2.4 Karakteristik Masyarakat Tangguh Bencana Menurut Twigg .....	54
Tabel 3.1 Bencana Tsunami di Pangandaran .....	62
Tabel 3.2 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2012 .....	66
Tabel 3.3 Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Barat .....	68
Tabel 3.4 Desa Dampingan dari Program Rekompak-JRF .....	71
Tabel 3.5 Daftar OPRB di Desa yang Telah Membentuk OPRB .....	73
Tabel 3.6 Keadaan Penduduk Desa Pananjung .....	76
Tabel 3.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pananjung .....	77
Tabel 3.8 Keadaan Penduduk Desa Pangandaran .....	80
Tabel 3.9 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pangandaran .....	81
Tabel 4.1 Kebijakan Desa yang Terkait dengan Desa Tangguh Bencana .....	89
Tabel 5.1 Rangkuman Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	127

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Hubungan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Lingkungan, Penanggulangan Bencana, dan Metode Perubahan Sosial Terencana .....	31
Bagan 2.2 Proses Terjadinya Bencana .....	40
Bagan 2.3 Siklus Manajemen Bencana .....	46
Bagan 2.4 Alur Pikir Penelitian .....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Bahaya Tsunami Kab. Ciamis .....	5
Gambar 2.1 Pelaksanaan Fasilitasi Desa Tangguh Bencana di Desa Pananjung	35
Gambar 3.1 Spanduk Kabupaten Pangandaran .....	60
Gambar 3.2 Pelantikan Sejumlah Pejabat Daerah Otonomi Baru di Kementerian Dalam Negeri .....	61
Gambar 3.3 Kantor BPBD Kabupaten Ciamis .....	63
Gambar 3.4 Kondisi Pantai Barat dan Timur di Pangandaran .....	64
Gambar 3.5 Relawan OPRB .....	72
Gambar 3.6 Rambu-rambu Tsunami .....	75
Gambar 3.7 Kantor Desa Pananjung .....	76
Gambar 3.8 Peta Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi Desa Pananjung .....	78
Gambar 3.9 Batas Desa Pangandaran dan Desa Pananjung .....	79
Gambar 3.10 Kantor Desa Pangandaran .....	80
Gambar 3.11 Peta Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi Desa Pangandaran .....	82
Gambar 4.1 Hotel yang Dijadikan Sub Tempat Evakuasi Sementara di Desa Pangandaran .....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Observasi
- Lampiran 3 Transkripsi Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Daftar Informan
- Lampiran 5 Surat Penelitian



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana, berbagai bencana seringkali terjadi hampir merata terjadi di berbagai daerah. Salah satu tragedi bencana yang terjadi dan mendapatkan perhatian baik itu secara nasional dan internasional adalah peristiwa bencana tsunami dan gempa bumi yang terjadi di Aceh pada hari minggu, 26 Desember 2004. Tsunami yang terjadi merupakan bencana besar yang mematikan di abad 21, tsunami tersebut mengakibatkan 165.708 korban jiwa dan kerugian sebesar 48 triliun (BNPB 2010, hal. 1).

Tsunami (BNPB 2011, hal. 5) merupakan rangkaian gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Tsunami terjadi karena beberapa sebab berikut:

1. Gempa bumi diikuti dengan perpindahan massa/batuan yang sangat besar di bawah air (laut/danau);
2. Tanah longsor di dalam laut;
3. Letusan gunung api di bawah laut atau gunung api pulau.

Belum selesai perhatian seluruh masyarakat yang tertuju pada peristiwa bencana di Aceh, ternyata pada tanggal 17 Juli tahun 2006 terjadi kembali bencana gempa bumi dan tsunami di pesisir selatan Jawa. Peristiwa gempa bumi berkekuatan 6,8 skala richter dan tsunami terjadi di daerah Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang berpusat di selatan pantai Pangandaran, dengan terjadinya bencana ini menegaskan bahwa dari berbagai daerah di Indonesia ternyata di Kabupaten Ciamis Jawa Barat juga merupakan daerah yang rawan bencana. Berdasarkan data dari BNPB (2011), untuk bencana tsunami dan gempa bumi di daerah Pangandaran Kabupaten Ciamis memiliki resiko bahaya yang tinggi.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bappenas (2006 hal. iii), jumlah korban pada bencana tsunami pangandaran di Kabupaten Ciamis yang meninggal sebanyak 405 orang, luka-luka 274 orang, hilang 27 orang, dan mengungsi 13.198

orang. Bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada prasarana dan sarana wilayah seperti: rumah dan permukiman, jalan raya, tempat pelelangan ikan, pasar, hotel, prasarana pendidikan.

Tabel 1.1 Data Korban Bencana Tsunami Pangandaran Tahun 2006

No	Kabupaten	Data Korban			
		Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi
1	Ciamis	405	274	27	13.198
2	Garut	5	13	0	0
3	Tasikmalaya	64	4	0	952
	<b>Jawa Barat</b>	<b>474</b>	<b>291</b>	<b>27</b>	<b>14.150</b>
4	Cilacap	157	107	11	8.269
5	Kebumen	11	25	7	102
	<b>Jawa Tengah</b>	<b>168</b>	<b>132</b>	<b>18</b>	<b>8.371</b>
6	Bantul	1	6	-	-
7	Gunung Kidul	2	20	-	-
	<b>DI Yogyakarta</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Bappenas (2006 hal. iii).

Daerah Pangandaran merupakan tujuan wisata primadona di Jawa barat yang banyak sekali pengunjungnya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Terjadinya bencana di daerah Pangandaran akan juga berdampak langsung terhadap menurunnya aktivitas pariwisata dan perputaran kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga memerlukan waktu setelah terjadinya bencana untuk membangun kembali daerah wisata, menarik lagi minat wisatawan berkunjung ke Pangandaran, dan menciptakan kembali suasana nyaman bagi wisatawan di Pangandaran setelah terjadinya bencana.

Melihat berbagai bencana yang terjadi, maka sebuah badan pemerintah yang khusus menangani bencana sangat dibutuhkan keberadaannya. Dasar pendirian tersebut diwujudkan melalui Undang-undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007. Undang-undang tersebut menjadi dasar pendirian Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Setelah terbitnya Undang-undang No 24 tahun 2007, kemudian Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan juga Peraturan Kepala BNPB No 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai mendirikan BPBD.

Kabupaten Ciamis membentuk BPBD sejak tahun 2010. Dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis, adalah dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Melalui pendirian BPBD di Kabupaten Ciamis maka pengelolaan bencana baik itu pada kegiatan prabencana, saat terjadi bencana, dan pascabencana dikoordinasikan dan dikelola melalui BPBD Kabupaten Ciamis.

Setelah berdirinya BPBD di Kabupaten Ciamis, Pemerintah Kabupaten Ciamis kemudian menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) untuk 5 tahun kedepan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk 2 tahun kedepan, sehingga dapat mengintegrasikan instansi terkait dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis.

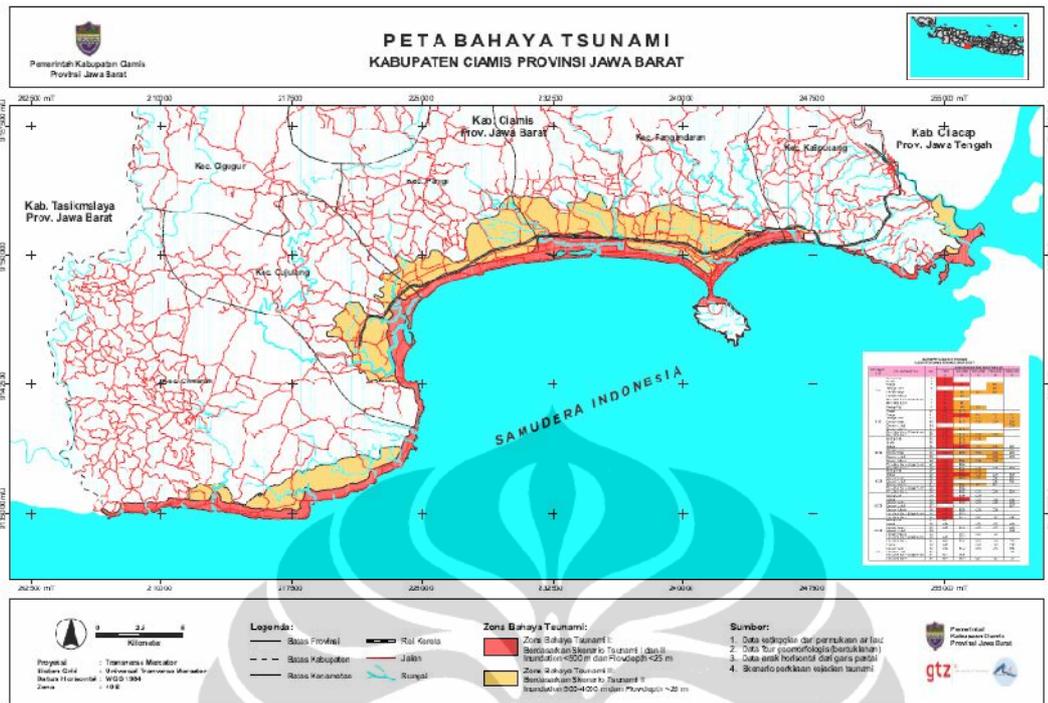
Pada workshop penyusunan RPBD dan RAD Kabupaten Ciamis (“Ciamis,” 2011), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Ciamis, Tiwa Sukrianto, mengungkapkan bahwa untuk menjangkau keterlibatan seluruh potensi serta elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana secara terpadu, maka diperlukannya sebuah konsep pembangunan berbasis mitigasi bencana.

Berdasarkan dokumen RPBD dan RAD Kabupaten Ciamis, yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Drs. H. Tahyadi Satibie, MM dalam kegiatan pelatihan exit strategi REKOMPAK (“Pelatihan,” 2012), wilayah rawan bencana di Kabupaten Ciamis tersebar berdasar jenis bencana yaitu:

1. Tanah longsor/pergerakan tanah di 21 Kecamatan,
2. Banjir di 10 Kecamatan,
3. Kebakaran di 21 kecamatan,
4. Gempa bumi di 36 Kecamatan,
5. Tsunami di 6 Kecamatan,
6. Angin kencang/puting beliung di 17 Kecamatan.

Melihat dari data diatas tersebut, terdapat tiga ancaman bencana yang diwaspadai di Kabupaten Ciamis, yaitu gempa bumi, kebakaran, dan tanah longsor. Gempa bumi terjadi secara merata di semua kecamatan di Kabupaten Ciamis. Kebakaran dan tanah longsor merupakan bencana yang terjadi di hampir 21 kecamatan. Sedangkan untuk bencana tsunami merupakan bencana di daerah sepanjang pantai pangandaran berpotensi terjadi di 6 kecamatan. Meskipun tsunami terjadi di wilayah 6 Kecamatan yang memiliki pantai saja, tsunami merupakan bencana yang sangat diwaspadai karena dampak yang ditimbulkannya, sehingga perhatian yang besar terhadap bencana tsunami di Kabupaten Ciamis diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Ciamis.

Salah satu teknologi yang dikembangkan dalam mitigasi bencana tsunami adalah sistem peringatan dini bencana tsunami, dan sejak tahun 2010 telah tersedianya peta bahaya tsunami yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan *The German-Indonesian Tsunami Early Warning System for the Indian Ocean* (GITEWS).



Gambar 1.1. Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Ciamis

Sumber : website GITEWS (2010)

Dengan adanya BPBD di Kabupaten Ciamis, ternyata berbagai pemerintah daerah mulai melakukan studi banding ke BPBD Kabupaten Ciamis. Diantaranya adalah tim penanganan bencana dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Sukabumi. Studi banding yang dilakukan adalah bermaksud untuk mempelajari struktur organisasi penanganan bencana, dan aspek yang paling diminati oleh peserta studi banding adalah kesiapan jalur evakuasi tsunami di daerah Pangandaran (“BPBD Primadona,” 2012).

Pada perkembangannya, model penanggulangan bencana yang saat ini dilakukan adalah menitikberatkan pada kegiatan prabencana dengan melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengurangi resiko bencana. Prioritas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat adalah dengan membentuk desa/kelurahan tangguh bencana. Kepala BNPB Syamsul

Maarif (“Siapkan,” 2012) mengatakan bahwa desa/kelurahan tangguh bencana memiliki kemampuan mandiri, mampu beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana, serta segera memulihkan diri pascabencana melalui kearifan lokal.

Menurut Maarif (2012, hal. 179), membangun ketangguhan terhadap bencana harus dimulai dari tingkat masyarakat, karena masyarakat merupakan yang pertama kali menghadapi bencana, sehingga masyarakat harus tangguh terhadap bencana. Saat ini sebetulnya telah ada dari berbagai Kementerian dan Lembaga yang mengembangkan program pembangunan di tingkat desa, seperti misalnya desa siaga, desa sadar hukum, desa informasi, desa pesisir, desa ketahanan pangan, sehingga dalam mewujudkan desa tangguh bencana, BNPB mengembangkan desa tangguh bencana dengan melanjutkan dari program pembangunan desa-desa yang telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga, pengembangan tersebut dilakukan dalam aspek ketangguhan bencana (Maarif 2012, hal. 180).

Ketangguhan sejak dicetuskan oleh Holing (1973, dalam Norris *et al.*, 2007) melalui konsep ketangguhan ekologis yaitu “*the persistence of relationships within a system; a measure of the ability of systems to absorb changes of state variables, driving variables, and parameters, and still persist*” (Keberlanjutan hubungan dalam sebuah sistem; sebuah kajian kapasitas sistem untuk menyerap perubahan pada variabel tetap, variabel dan parameter pendorong, dan keberlanjutan), kemudian berkembang dan di implementasikan untuk menggambarkan kapasitas individu, kelompok, dan masyarakat yang lebih luas. Pada analisis di level komunitas, ketangguhan menurut Coles (2004, dalam Norris *et al.*, 2007) adalah “kapasitas, keahlian, dan pengetahuan komunitas untuk dapat berpartisipasi dalam pemulihan dari bencana.”

Terdapat dua hal penting yang dicatat oleh Norris *et al.*, (2007) mengenai ketangguhan, yaitu pertama bahwa ketangguhan lebih baik dikonseptualisasi sebagai sebuah kemampuan atau proses daripada sebagai sebuah *outcome*, dan kedua adalah ketangguhan sebaiknya dikonseptualisasikan sebagai kemampuan adaptasi dibandingkan sebagai stabilitas. Kemudian Norris *et al.*, (2007)

menjelaskan bahwa ketika membahas tentang masyarakat tangguh adalah sebagai strategi dalam mempromosikan kesiapsiagaan dan respon bencana yang efektif.

Twig (2007) merupakan merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan karakteristik masyarakat tangguh bencana, konsep desa/kelurahan tangguh bencana di Indonesia salah satunya adalah mengambil sebagai sumber dari konsep masyarakat tangguh bencana yang telah dikembangkan oleh Twig tersebut. Twig (2007) menjelaskan bahwa terdapat 5 aspek dalam masyarakat tangguh bencana, yaitu: pemerintah, assesmen resiko, pendidikan dan pengetahuan, manajemen resiko dan pengurangan kerentanan, kesiapsiagaan dan respon bencana.

Di daerah Pangandaran setelah terjadinya bencana tsunami tahun 2006, telah ada Program Rekompak yang dilaksanakan mulai tahun 2008 dengan berbagai kegiatan mulai dari pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana (Rekompak-JRF, 2012). Sehingga dapat dikatakan bahwa Program Rekompak merupakan upaya awal dalam mewujudkan daerah Pangandaran menjadi desa tangguh bencana, program tersebut dilaksanakan di 6 Kecamatan, yaitu di 17 Desa dengan potensi bencana tsunami, dan 12 Desa dengan potensi bencana banjir dan gempa bumi (Rekompak-JRF, 2012).

Melalui program ini juga dibentuk Organisasi Pengurangan Resiko Bencana (OPRB), di Desa Pangandaran dan Pananjung organisasi ini secara resmi terbentuk pada tanggal 11 Maret 2011 (Rekompak-JRF, 2012). Dasar dari pembentukan OPRB tersebut adalah Pedoman Pengorganisasian Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada bulan Oktober tahun 2010. Program Rekompak tersebut dapat dikatakan telah berhasil dalam membangun kembali pemukiman, infrastruktur dalam pengurangan resiko bencana dan perbaikan kualitas lingkungan, serta memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana (Rekompak-JRF, 2012).

Upaya meningkatkan desa tangguh bencana mulai dilakukan pada awal bulan September tahun 2012, melalui Fasilitasi Desa Tangguh Bencana yang merupakan program dari BNPB melalui BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Ciamis, dilaksanakan di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran. Dasar kebijakan Desa/Kelurahan tangguh bencana adalah melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Kebijakan desa/kelurahan tangguh bencana tersebut ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2012.

Pelaksanaan desa tangguh bencana di Jawa Barat yang difasilitasi oleh BPBD Provinsi Jawa Barat ini dimulai pada 4 September 2012 yang dilaksanakan 5 hari di setiap desa tersebut (“Pangandaran,” 2012). Kegiatan fasilitasi tersebut merupakan upaya pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana, juga sebagai upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, kegiatan fasilitasi tersebut melalui pendekatan *Focus Group Discussion* untuk mengidentifikasi potensi rawan bencana dan karakteristik desa tangguh bencana (“Pangandaran,” 2012).

Penelitian dengan tema bencana pada saat ini telah banyak dilakukan, baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Penelitian dengan tema bencana yang dapat ditelusuri melalui *Online Public Acces Catalogue* (OPAC) pada website [lontar.ui.ac.id](http://lontar.ui.ac.id), adalah dimulai pada tahun 1980 yaitu skripsi yang ditulis oleh Laksono, dengan judul Pengambilan Keputusan Bertransmigrasi : Kasus Daerah Terancam Bencana Alam Gunung Merapi.

Pada perkembangannya, penelitian bencana semakin meningkat sejak awal tahun 2000. Di Pascasarjana Kesejahteraan Sosial tahun 2003, Yadrison menulis tesis tentang Implementasi fungsi program penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kebijakan BAKORNAS PBP, dan secara prinsip sudah selaras dengan teori Manajemen Risiko sebagaimana yang dideskripsikan oleh *Asian Disaster Preparedness*

*Center*, namun secara teknis masih menunjukkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut: kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana; tidak ada penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di lokasi-lokasi bencana atau rawan bencana; pemberian bantuan sangat terlambat, jumlah bantuan tidak mencukupi, dan kontribusi Pemerintah Provinsi lebih kecil bila dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten; penggalangan peran serta masyarakat di lokasi-lokasi bencana/rawan bencana dari pemerintah Provinsi/Badan Kesbang Linmas tidak ada.

Penelitian lainnya adalah tesis dari Pascasarjana Sosiologi yang ditulis oleh Fitrinitia (2011), penelitian tersebut berjudul Strategi Adaptasi Komunitas Pesisir terhadap Pengelolaan Bencana: Studi Kasus Komunitas Muara Baru dan Kawasan Pluit terhadap Banjir di DKI Jakarta. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplorasi dan komparatif antar lokasi melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena belum mempertimbangkan aspek ekonomi sosial dan budayanya dari setiap komunitas. Sementara itu strategi adaptasi yang mempertimbangkan persepsi, cara hidup dan tindakan adaptasi komunitas juga berbeda sesuai dengan karakteristik setempat. Oleh karena itu dalam rekomendasi dinyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan bencana tidak dapat diseragamkan harus menyesuaikan dengan karakter dari komunitas tersebut.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Steven (2011) sebagai skripsi pada jurusan Kesejahteraan Sosial. Penelitian tersebut berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanganan pra bencana kebakaran di tingkat komunitas (studi kasus pada Masyarakat RW 02, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat). Penelitian ini membahas mengenai upaya penanganan pra bencana kebakaran yang dilakukan pada wilayah RW 02, Kelurahan Karang Anyar. Upaya penanganan pra bencana yang dilihat dalam penelitian ini terdiri dari usaha mitigasi dan kesiapsiagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanganan pra bencana kebakaran dilakukan secara

terus menerus, yaitu berupa pelunakan resiko baik struktural maupun non struktural dan peningkatan rasa waspada dengan pengaruh dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan fisik.

Penelitian berikutnya adalah tesis pada pascasarjana Administrasi Publik yang ditulis oleh Alhadi (2011) dengan judul Upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami : suatu studi manajemen bencana. Rekomendasi dari penelitian tersebut adalah Pemerintah Kota Padang perlu mengubah paradigma dalam penanggulangan bencana dengan lebih memperhatikan tahap pencegahan (pra - bencana) berupa kesiapsiagaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko bencana jika terjadi gempa dan tsunami.

Berdasarkan pengamatan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penelitian ini bermaksud untuk melengkapi kajian kebijakan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana, khususnya mengenai desa tangguh bencana yang memang belum banyak dibahas di dalam skripsi, tesis, maupun disertasi di Universitas Indonesia. Dari sisi wilayah, pemilihan Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang belum banyak dikaji, hal ini tentu berbeda bahwa telah beberapa kali terdapat penelitian mengenai penangulangan bencana di daerah Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, dan Yogyakarta. Padahal di sisi lain telah diketahui dari data BNPB bahwa di daerah Jawa Barat merupakan daerah yang sangat rawan bencana, khususnya di daerah Jawa Barat bagian selatan, seperti halnya daerah Kabupaten Ciamis yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan daerah rawan tsunami dan gempa bumi dengan kategori tinggi.

Oleh karena aspek pelaksanaan fasilitasi dilihat sebagai hal yang penting dalam desa tangguh bencana, maka penelitian ini bermaksud untuk mendalami persoalan pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung, Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini, fasilitasi yang dimaksud tidak hanya berhenti pada berakhirnya kegiatan 5 hari yang dilakukan bersama-sama secara partisipatif oleh perangkat desa, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Kabupaten Ciamis, tetapi fasilitasi juga dilihat sebagai sebuah proses yang terus menerus berlangsung di dalam desa tangguh bencana tersebut. Penelitian ini

kemudian diberi judul “Pelaksanaan Fasilitasi Desa Tangguh Bencana (Studi Kasus di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis).”

## 1.2. Rumusan Masalah

Peristiwa bencana di Kabupaten Ciamis yang cukup mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan seluruh masyarakat di Indonesia adalah pada peristiwa tsunami Pangandaran tahun 2006, dan kemudian gempa tasikmalaya pada tahun 2009. Pada peristiwa tsunami Pangandaran telah mengakibatkan 405 orang meninggal dunia di daerah Pangandaran (Bappenas, 2006 hal. iii). Sehingga BNPB (2011) menyebutkan bahwa daerah Kabupaten Ciamis, yaitu wilayah Pangandaran, merupakan daerah rawan bencana tsunami dengan kategori tinggi di seluruh Indonesia, setelah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Sikka.

Setiap bencana tentu tak serta merta dapat disamakan kadar penyebabnya ataupun daya rusaknya, namun demikian pada peristiwa tersebut dapat terlihat bahwa dari segi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan juga pemerintah belum terbangun dengan baik. Melalui Undang-Undang Penanggulangan Bencana tahun 2007 yang mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kabupaten Ciamis, sehingga didirikanlah BPBD Kabupaten Ciamis melalui Perda Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010.

Upaya pemulihan setelah terjadinya bencana tsunami di wilayah Pangandaran mulai dilaksanakan salah satunya melalui Program Rekompak pada tahun 2008. Kegiatan yang dilakukan antara lain pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana. Program Rekompak merupakan upaya awal dalam mewujudkan daerah Pangandaran menjadi desa tangguh bencana.

Perkembangan yang terjadi yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan bencana adalah pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan resiko bencana merupakan prioritas utama pemerintah di dalam

penyelenggaraan kebijakan penanggulangan bencana. BNPB telah mengembangkan kebijakan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat melalui program desa/kelurahan tangguh bencana.

Fasilitasi desa tangguh bencana dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat pelaksananya melalui BPBD Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Ciamis, dilaksanakan pada bulan September 2012, lokasi pelaksanaan di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran. Fasilitasi yang dimaksud tidak berhenti setelah kegiatan 5 hari yang dilakukan bersama-sama secara partisipatif oleh perangkat desa, organisasi tingkat desa, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Kabupaten Ciamis, tetapi fasilitasi juga dilihat sebagai sebuah proses pemberdayaan yang terus menerus berlangsung di masyarakat.

Dari berbagai uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dari segi pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, dapat memberikan informasi yang dapat mengembangkan ilmu kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan

penanggulangan bencana, dan juga memberikan informasi mengenai pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana.

2. Secara praktis, dapat memberikan masukan kepada instansi terkait (seperti BPBD, Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Ciamis) dan masyarakat di daerah yang rawan bencana dalam hal pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana di Kabupaten Ciamis.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti kualitatif dimulai dengan *self-assesment* dan refleksi tentang dirinya dalam konteks sosiohistoris (Neuman, 2006 hal. 14-15). Penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada pertanyaan yang spesifik, tetapi mempertimbangkan paradigma teoritis-filosofis dalam menemukan jawabannya.

Langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah mendesain penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menafsirkan data. Langkah-langkah tersebut dapat juga dilakukan secara simultan (Neuman, 2006 hal. 15). Data penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks, tulisan, frasa, atau simbol yang menggambarkan atau mewakili orang, aksi atau peristiwa dalam kehidupan sosial (Neuman, 2006 hal. 457).

Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif memberikan gambaran secara rinci terhadap situasi, seting sosial, dan hubungan (Neuman, 2006 hal. 35). Dalam penelitian deskriptif, peneliti memulai dengan pemahaman yang baik terhadap subjek dalam penelitian tersebut yang digambarkan secara akurat. Keluaran dari deskriptif ini adalah gambaran secara detail dari permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif ini memfokuskan pada pertanyaan “bagaimana” dan “siapa”. Melakukan eksplorasi isu baru atau menjelaskan mengapa sesuatu permasalahan terjadi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, Neuman (2006) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah menguji dan mendalami berbagai peristiwa, sehingga studi kasus dapat dilakukan terhadap individu, grup, organisasi, gerakan, peristiwa, atau unit geografis. Data yang disajikan dari studi kasus biasanya lebih mendetail, variatif, dan ekstensif. Studi kasus pada umumnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif, meskipun dapat dikatakan studi kasus tidak identik dengan kualitatif, tetapi setiap penelitian kualitatif berupaya untuk mencari bentuk representasi yang didasarkan pada kedalaman dan pengetahuan yang mendetail mengenai kasus (Ragin 1994, dalam Neuman 2006).

Penelitian pada studi kasus berupaya untuk menginvestigasi secara intensif satu atau dua kasus, atau juga membandingkan kasus-kasus tersebut (Neuman, 2006). Vaughan (1992, dalam Neuman 2006) menjelaskan bahwa studi kasus dapat membantu peneliti terhubung ke level mikro atau tindakan individu, hingga pada level makro atau struktur dan proses sosial dalam skala besar. Neuman (2006) mengingatkan bahwa peneliti harus berhati-hati dalam memilih satu atau beberapa kasus kunci sehingga dapat menggambarkan isu-isu yang dipilih dan menganalisisnya secara mendetail.

Penelitian ini juga akan menampilkan film dokumenter sebagai sebuah media dalam penyampaian hasil penelitian. Berdasarkan Ayawaila (2008), film dokumenter merupakan karya film berdasarkan realita atau fakta perihal pengalaman hidup seseorang atau mengenai peristiwa. Karena berdasarkan realita atau fakta, maka observasi dan analisis terhadap persoalan yang akan disajikan kemudian diolah menjadi ide dalam karya film dokumenter.

Menurut Ayawaila (2008) terdapat empat kriteria dalam film dokumenter, yaitu:

1. Setiap adegan dalam film dokumenter merupakan rekaman kejadian sebenarnya, tanpa interpretasi imajinatif seperti halnya dalam film fiksi,
2. Hal yang dituturkan dalam film dokumenter berdasarkan peristiwa nyata (realita),

3. Sutradara melakukan observasi pada suatu peristiwa nyata, lalu melakukan perekaman gambar sesuai apa adanya, dan
4. Struktur cerita dalam film dokumenter lebih berkonsentrasi pada isi dan pemaparan.

Pengambilan gambar untuk film dokumenter ini menggunakan *handycam* Sony Full HD. Pada pelaksanaannya, kegiatan pembuatan film dokumenter dilakukan selama 7 hari, yang dilaksanakan di Desa Pangandaran, Desa Pananjung, dan BPBB Kabupaten Ciamis. Pengambilan gambar dibantu oleh seorang juru kamera, sehingga kegiatan penelitian dan sekaligus pengambilan gambar yang akan menjadi bagian dalam film dokumenter ini dapat dilakukan secara bersamaan. Untuk proses editing, dilakukan sendiri oleh peneliti.

#### 1.5.2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di berbagai tempat, salah satunya di BNPB, khususnya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, untuk memperoleh informasi desa/kelurahan tangguh bencana secara umum yang dilaksanakan oleh BNPB di seluruh Indonesia. Kemudian secara keseluruhan lokasi penelitian lapangan ini dilakukan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, yaitu di BPBD Kabupaten Ciamis, Desa Pananjung dan Desa Pangandaran.

Lokasi Kabupaten Ciamis ini dipilih karena salah satu daerah di Jawa Barat yang rawan bencana, peristiwa bencana tsunami dan gempa bumi yang terjadi di daerah Pangandaran pada 17 juli 2006 merupakan peristiwa penting bagi Kabupaten Ciamis, karena bencana tersebut mengingatkan semua pihak bahwa pentingnya aspek pengelolaan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi baik itu pada sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana, sehingga pada tahun 2010 di Kabupaten Ciamis dibentuk BPBD.

BPBD Kabupaten Ciamis sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana yang melaksanakan fasilitasi desa tangguh bencana,

fasilitasi desa tangguh bencana tersebut dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

Kondisi di lapangan ternyata daerah Desa Pangandaran dan Desa Pananjung dalam proses menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran. Jadi ketika penelitian ini dilakukan posisi Desa Pangandaran dan Desa Pananjung berada diantara sebelum dan sesudah diresmikan menjadi Kabupaten Pangandaran. Pada penelitian ini karena memang dianggap tahapan awal transisi menjadi Kabupaten Pangandaran, maka masih menggunakan Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk sebelum menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran.

### 1.5.3. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*. Penggunaan *purposive sampling* ini dengan pertimbangan bahwa teknik sampling ini merupakan strategi paling umum yang dilakukan dalam penelitian kualitatif (Bungin, 2007 hal. 107). Selain itu, informan dianggap menguasai informasi yang terkait dengan informasi yang akan digali dalam penelitian tersebut (Bungin, 2007 hal. 108). Neuman (2006 hal. 220) menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan nonrandom sampling atau nonprobabilitas sampling, sehingga tidak mempergunakan kriteria berdasarkan populasi masyarakat yang akan dijadikan sampling. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih suatu kasus menarik yang dapat memberikan informasi, dengan memilih beberapa informan ahli untuk tujuan tertentu (Neuman, 2006 hal. 222).

Adapun pemilihan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPBD Kabupaten Ciamis
  - a. Kriteria informan pertama adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Posisi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam kaitannya dengan penelitian ini sangat penting karena dianggap memahami desa tangguh bencana di Kabupaten Ciamis.



Pemilihan informan tersebut digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 1.2. Pemilihan Informan

Informasi yang ingin diperoleh	Informan		Jumlah
Pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana	Pemerintah	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1
1. Pemerintah			
2. Assesmen resiko		BPBD Kabupaten Ciamis	2
3. Pendidikan dan pengetahuan			
4. Manajemen resiko dan pengurangan kerentanan	Pemerintah dan Masyarakat	Tokoh masyarakat desa Pangandaran (Aparat Desa dan relawan desa tangguh bencana)	2
5. Kesiapsiagaan dan respon bencana		Tokoh masyarakat desa Pananjung (Aparat Desa dan relawan desa tangguh bencana).	2

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, wawancara, dan pengamatan.

##### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk menambah referensi dan pemahaman mendalam mengenai fasilitasi desa tangguh bencana di Kabupaten Ciamis. Bahan-bahan tersebut antara lain: Peraturan, kebijakan, buku, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana di Kabupaten Ciamis, seperti Kebijakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Ciamis, Peraturan Daerah Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ciamis, Dokumen Kabupaten Ciamis dalam angka, buku dan jurnal yang berkaitan dengan masyarakat tangguh bencana, dll.

## 2. Wawancara

Untuk menggali dan mengumpulkan data dari informan di lapangan adalah menggunakan wawancara. Wawancara di dalam penelitian lapangan menurut Neuman (2006) dapat menggunakan wawancara tidak terstruktur, *nondirective*, wawancara mendalam. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam.

Wawancara yang dilakukan adalah menggali pengalaman yang sesuai dengan tema penelitian dan daftar wawancara yang telah disusun, Neuman (2006) menjelaskan bahwa seharusnya dalam wawancara dapat membangun kepercayaan dari narasumber, salah satu hal yang dilakukan adalah berbagi pengalaman dan latar belakang peneliti, sehingga tercipta suasana yang akrab dan informasi yang diperoleh akan lebih banyak.

## 3. Pengamatan

Dalam melakukan pengamatan di lapangan berarti peneliti memperhatikan dengan jeli, melihat, mendengar secara seksama (Neuman, 2006). Neuman (2006) menjelaskan sebaiknya dalam pengamatan, peneliti mengamati secara detail dan mempertanyakan “apa yang terjadi disini” melalui mengamati dan mendengarkan secara seksama. Juga mencatat/merekam, dan memfoto apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dalam proses pengamatan yang berkaitan dengan desa tangguh bencana. Pengamatan dalam penelitian ini menggunakan pedoman pengamatan, hasil pengamatan juga disajikan melalui foto dan film dokumenter.

### 1.5.5. Teknik Analisa Data

Berdasarkan Neuman (2006, hal. 468), analisa data penelitian kualitatif adalah :

1. Menyortir dan mengklasifikasikan data (*Sort and classify*). Dari berbagai data yang telah berhasil dikumpulkan melalui proses pengumpulan data kemudian data-data tersebut disortir untuk dilihat mana data-data yang dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Data-data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Melalui pengelompokan data seperti ini maka akan memudahkan peneliti dalam melihat hasil dari data-data yang diperoleh dari lapangan.
2. Koding data. Koding merupakan dua aktifitas yang dilakukan secara simultan, yaitu reduksi data dan analisis kategori data (Neuman, 2006 hal. 460). Koding data terdiri dari open koding, axial koding dan selektif koding. Open koding merupakan tahapan pertama dalam koding dimana peneliti menguji data untuk memadatkannya ke dalam permulaan analisis kategori atau kode (Neuman, 2006 hal. 461). Axial koding adalah tahap kedua dimana peneliti mengorganisir kode, menghubungkan data-data tersebut, dan mengetahui analisis kategori yang pokok (Neuman, 2006 hal. 462). Selektif koding adalah peneliti menguji kode-kode tersebut untuk mengidentifikasi dan memilih data yang akan mendukung kosseptual kategori koding yang telah dibangun (Neuman, 2006 hal. 464).
3. Penafsiran dan penggabungan data.  
Tahap selanjutnya adalah penafsiran dan penggabungan data. Neuman (2006 hal. 160) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti memberikan arti terhadap data yang telah diperoleh dan dianalisa, menerjemahkannya, atau bahkan membuat data tersebut agar lebih mudah dimengerti. Di dalam melakukan interpretasi, harus memperhatikan sudut pandang dari informan yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian, kemudian juga penafsiran dari peneliti berkaitan data yang telah didapat, dan penafsiran tersebut dikaitkan dengan teori-teori yang telah menjadi acuan dalam penelitian tersebut. Kemudian langkah selanjutnya

adalah melakukan generalisasi berdasarkan temuan-temuan lapangan ke dalam sebuah kesimpulan.

#### 1.5.6. Teknik Meningkatkan Kualitas Penelitian

Teknik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas penelitian adalah triangulasi. Berdasarkan Neuman (2006 hal. 149) Triangulasi adalah “*the idea that looking at something from multiple points of view improves accuracy*” (triangulasi berawal dari ide yang melihat sesuatu dari sudut pandang beragam untuk meningkatkan ketepatan). Sehingga triangulasi adalah gagasan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dalam mengembangkan keakuratan. Lebih lanjut Neuman (2006 hal. 150) menjelaskan bahwa di dalam triangulasi terdapat triangulasi observers, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan triangulasi observers.

Triangulasi observers adalah melihat permasalahan yang terjadi dari berbagai sudut pandang informan, karena setiap informan dari berbagai latar belakang akan memberikan pendapat yang berbeda dalam menjelaskan suatu permasalahan. Misalkan dalam pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana di Kabupaten Ciamis, pihak pemerintah bisa saja akan memberikan pendapat yang berbeda mengenai persoalan pelaksanaan desa tangguh bencana di Kabupaten Ciamis dengan keterangan dari masyarakat. Triangulasi observers dilakukan pada saat pengumpulan data, yaitu hasil dari wawancara yang akan memperlihatkan berbagai sudut pandang dalam melihat permasalahan sesuai dengan perannya masing-masing di dalam masyarakat.

## 1.5.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 1.3. Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret-Mei				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Menentukan Tema Penelitian, Studi Pustaka, dan penulisan proposal penelitian																				
Diskusi dan konsultasi dengan pembimbing																				
Ujian proposal penelitian																				
Mengumpulkan data di Lapangan																				
Mengolah data																				
Menganalisis dan interpretasi data																				
Laporan hasil penelitian																				
Ujian akhir tesis																				
Perbaikan, Publikasi dan Penyerahan Tesis																				

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 2 semester, di awal semester ganjil yaitu bulan September 2012, kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan tema tesis yang diajukan ke Program Pascasarjana Departemen Kesejahteraan Sosial, yaitu tentang kesiapsiagaan bencana dengan pembimbing Rissalwan Habdy Lubis, M.Si. Kemudian selama semester ganjil ini dapat dikatakan sebagai upaya penelusuran literatur yang terkait dengan tema penelitian dan proses diskusi dengan pembimbing dilakukan secara intens.

Pada bulan Desember 2012, dapat dikatakan sebagai langkah berikutnya dimana telah menentukan tema penelitian pada tesis ini, yaitu tentang kebijakan penanggulangan bencana, dan kemudian telah disusunnya proposal tesis, dari latar belakang, metode penelitian, hingga tinjauan pustaka. Ujian proposal tesis dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2012, dan setelah dilaksanakan ujian proposal tesis tersebut terdapat berbagai masukan dari penguji dan juga pembimbing, sehingga tema penelitian pada tesis ini mengalami perubahan, yaitu tentang Desa Tangguh Bencana.

Pada awal bulan Maret 2013 mulai dilakukan pencarian data awal di lapangan yaitu mencari data/dokumen tentang desa tangguh bencana yang dilaksanakan oleh BNPB secara keseluruhan yang dilaksanakan di 21 daerah di Indonesia, dan juga mulai perkenalan ke Petugas BPBD Kabupaten Ciamis, dan aparat desa di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung. Kemudian proses selanjutnya di bulan April 2013 adalah menyusun gambaran umum daerah yang diteliti, gambaran umum program desa tangguh bencana, serta terus melakukan konsultasi dengan pembimbing.

Di awal bulan Mei 2013 ini menyelesaikan pedoman wawancara yang akan digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber, sehingga pada pertengahan bulan Mei 2013 dapat kembali melakukan penelitian lapangan, dan menggali informasi berdasarkan dari pedoman wawancara yang telah dibuat. Kegiatan mengolah data, menganalisis dan menginterpretasi data juga dilakukan.

Pada awal bulan Juni 2013, mulai menyelesaikan laporan akhir penelitian dan juga terus melakukan konsultasi dengan pembimbing. Hingga pada

pertengahan bulan Juni 2013, laporan penelitian telah selesai ditulis dan mendapatkan persetujuan dari pembimbing untuk diajukan sidang tesis, dan mendapatkan jadwal ujian sidang tesis pada tanggal 28 Juni 2013. Pada awal bulan Juli 2013 kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan tesis berdasarkan masukan dari penguji, kemudian publikasi dan penyerahan tesis.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 KERANGKA TEORI**

Bab ini membahas secara rinci teori-teori dari studi pustaka yang akan dijadikan acuan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teori yang dibahas antara lain Teori Kesejahteraan Sosial, Bencana dan Manajemen Bencana, Fasilitasi, dan Komunitas Tangguh (*resilient community*).

### **BAB 3 GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi gambaran umum mengenai keadaan Kabupaten Ciamis dan Pangandaran, desa/kelurahan tangguh bencana dan profil dari desa tangguh bencana yang diteliti, yaitu Desa Tangguh Bencana di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis.

### **BAB 4 HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan hasil dan temuan lapangan dari penelitian yang dilakukan, hasil tersebut dikategorikan berdasarkan Twigg (2007) tentang masyarakat tangguh bencana.

### **BAB 5 PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dari penelitian dengan teori-teori yang relevan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan Twigg (2007) tentang

masyarakat tangguh bencana, yaitu: pemerintah, assesmen resiko, pendidikan dan pengetahuan, manajemen resiko dan pengurangan kerentanan, kesiapsiagaan dan respon bencana.

## BAB 6 PENUTUP

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



## **BAB 2**

### **TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI DAN MASYARAKAT TANGGUH BENCANA**

#### **2.1. Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana**

Midgley (dalam Adi, 2005 hal. 16) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Pendapat Midgley ini kemudian dikembangkan oleh Adi, bahwa Kesejahteraan sosial menurut Adi (2005 hal. 17) adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Pendapat Adi mengenai kesejahteraan sosial ini dapat dikategorikan sebagai definisi yang dikembangkan tersebut bersifat akademis dan keilmuan, definisi ilmu kesejahteraan sosial tersebut bertitik tumpu pada kajian teoritis maupun metodologis, sehingga dengan pendekatan ilmu kesejahteraan sosial melalui kerangka pemikiran dan metode yang dikembangkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Beberapa buku tentang pekerjaan sosial, misalnya Ritter, Vakalahi, dan Klernan-Stren (2009) menempatkan pekerjaan sosial dalam kegiatan pascabencana sebagai berikut:

*Since the beginning of the profession, social workers have responded to the call to offer disaster assistance. Because many social workers are trained in crisis intervention, they are uniquely positioned to aid people in need after an emergency or natural disaster. Even though social workers are concerned about the impact of disasters in general, they are particularly concerned about the impact to vulnerable populations such*

*as children, people with disabilities, poor people, and older adults* (hal. 123).

(Sejak semula keberadaan profesi pekerja sosial telah menjawab kebutuhan asistensi kebencanaan. Hal ini karena kebanyakan pekerja sosial dididik untuk intervensi krisis, secara unik mereka ditempatkan untuk menyelamatkan kebutuhan manusia setelah keadaan darurat atau pasca bencana alam. Meskipun pekerja sosial memperhatikan dampak bencana secara umum, mereka secara khusus berfokus pada populasi yang rentan, seperti anak-anak, kelompok disabel, orang miskin, dan orang tua.)

Disini kita dapat melihat bahwa menurut Ritter, Vakalahi, dan Klernan-Stren (2009), pekerja sosial adalah memberikan bantuan kepada masyarakat setelah terjadi bencana. Meski demikian, pekerja sosial tidak hanya memberikan bantuan dan pemulihan setelah terjadinya bencana saja, tetapi juga terlibat dalam membangun kembali masyarakat setelah terjadinya bencana.

Berikutnya adalah Kirst-Ashman (2010, hal. 195) yang menyatakan bahwa terdapat pandangan *universality* dan *selective* dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Perbedaan universalitas dan selektif dalam kebijakan kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai berikut:

*Universality is the idea that social welfare benefits should be equally available “to all members of society, regardless of their income or means”* (Segal dan Brzuzy 1998, dalam Kirst-Ashman 2010 hal. 194). (Universalitas adalah sebuah ide bahwa manfaat kesejahteraan sosial harus diberikan secara setara “untuk semua anggota masyarakat, tanpa memandang pendapatan atau kekayaan”).

*Universality contrasts sharply with selectivity—the idea that social welfare benefits should be “restricted to those who can demonstrate need through established eligibility criteria”* (Segal dan Brzuzy 1998, dalam Kirst-Ashman 2010 hal. 195).

(Universalitas sangat bertentangan dengan selektifitas—ide manfaat kesejahteraan sosial sebaiknya “dibatasi dari orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhannya melalui kriteria kelayakan”).

Pandangan universalitas ini menurut Kirst-Ashman (2010) salah satu contohnya dilakukan pasca terjadinya bencana tsunami 26 Desember tahun 2004 di wilayah Indonesia, Thailand, dan Sri Lanka. Bantuan terhadap bencana tersebut diberikan kepada setiap orang yang mengalami bencana tsunami tersebut tanpa memandang status sosial ataupun pendapatannya. Kirst-Ashman (2010) juga menilai bahwa bantuan memiliki sifat residual, bantuan tersebut dilakukan sebagai reaksi akibat terjadinya bencana, oleh karena itu diperlukan apa yang disebut sebagai bantuan institusional, sehingga dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang agar dapat membangun kembali setelah terjadinya bencana.

Strategi yang dilakukan dalam mengupayakan kesejahteraan sosial antara lain adalah metode perubahan sosial terencana. Menurut Adi (2005 hal. 141), metode perubahan sosial terencana (metode intervensi sosial) dalam ilmu kesejahteraan sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu perubahan sosial terencana di level mikro, dan perubahan sosial terencana di level makro. Pada perubahan sosial terencana level makro dapat dilihat dua kelompok, yaitu level meso dimana praktisi kesejahteraan sosial melakukan perubahan sosial terencana pada tingkat organisasi dan komunitas lokal, biasanya dilakukan dengan berbagai metode intervensi komunitas.

Pada perubahan sosial terencana di tingkat makro, di sini perubahan diarahkan pada upaya merubah masyarakat secara lebih luas, yaitu melalui pengembangan kebijakan sosial dan perundangan sosial (Adi, 2005 hal. 142). Model intervensi perencanaan sosial dan kebijakan sosial misalnya upaya merubah masyarakat di tingkat provinsi, antar provinsi, ataupun nasional (Adi, 2005 hal. 166). Sedangkan pada perubahan sosial terencana di level mikro, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan, dalam hal ini individu, keluarga, dan kelompok kecil (Adi, 2005 hal. 143).

Sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini adalah membahas keterkaitan antara kesejahteraan sosial, lingkungan, dan penanggulangan bencana. Karena dalam perkembangannya keterkaitan antara kesejahteraan sosial dan ilmu lingkungan membahas permasalahan kebencanaan. Mengenai keterkaitan antara ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu lingkungan, menurut Adi (2005 hal. 62) isu lingkungan mulai menjadi perhatian bidang ilmu kesejahteraan sosial sekitar tahun 1980an. Pada tahun 1980an merupakan generasi kedua dalam gerakan lingkungan, dimana terjadi perkembangan yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, di sisi lain juga aspek ekologi menguat ke dalam pembangunan bila dibandingkan dengan gerakan lingkungan sebelumnya di tahun 1960an dan 1970an (Adi, 2005 hal. 63).

Mengenai persoalan lingkungan, kebencanaan dan permasalahan sosial, Adi (2005 hal. 64) memberikan contoh salah satu permasalahan yang muncul dari pembangunan dan tingginya tingkat migrasi adalah permasalahan sampah, dari permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi bencana banjir. Adi (2005 hal. 65) menjelaskan bahwa terdapat dua kecenderungan yang dilakukan dalam praktik kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan, yaitu praktisi kesejahteraan sosial yang memodifikasi perilaku masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan atau dapat juga dikatakan sebagai edukator dalam isu-isu lingkungan, dan praktisi kesejahteraan sosial yang mengutamakan teknologi ramah lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa terdapat kaitan antara ilmu kesejahteraan sosial, ilmu lingkungan, dan penanggulangan bencana. Oleh karena itu dalam melakukan strategi penanggulangan bencana dalam perspektif kesejahteraan sosial memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pengelolaan masalah sosial;
2. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan
3. Pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang (Adi, 2005 hal 17)

Dominelli (2012 hal. 2) menyatakan bahwa literatur mengenai *environmental social work* dan *ecological social work* pada saat ini masih sangat terbatas, sehingga Dominelli memberikan kontribusi terhadap isu lingkungan dalam perspektif pekerjaan sosial, dan melakukan advokasi dalam rangka menguatkan suara-suara dari pekerja sosial yang memberikan dukungan pada masyarakat dalam menghadapi bencana, baik itu melalui pembuatan kebijakan maupun pada level praktek. Dominelli menyebutnya sebagai *green social work*, adapun fokus yang dikembangkannya adalah sebagai berikut:

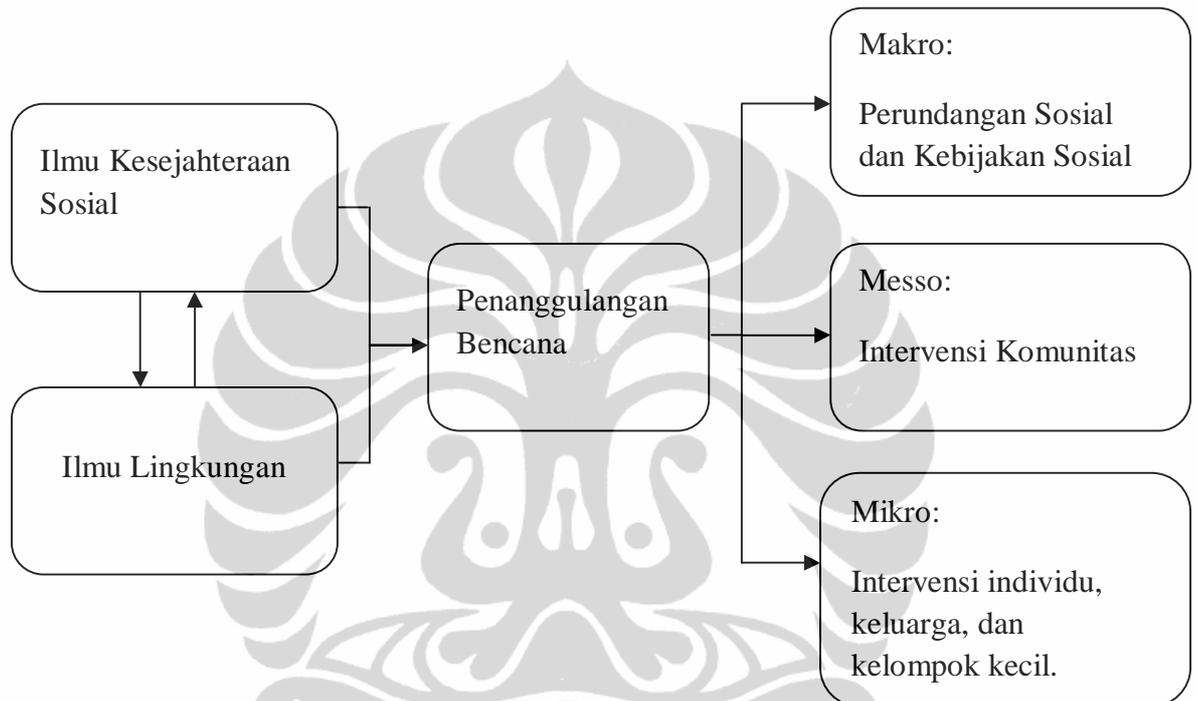
*Green social work focuses on how responses to environmental crises must both challenge and address poverty, structural inequalities, socio-economic disparities, industrialization processes, consumption patterns, diverse contexts, global interdependencies and limited natural resources* (hal. 3).

(Pekerjaan sosial hijau berfokus pada bagaimana merespon krisis lingkungan yang berpengaruh pada kemiskinan, ketidaksetaraan struktural, ketidakadilan sosial-ekonomi, proses industrialisasi, pola konsumsi, konteks keragaman, ketergantungan global, dan sumberdaya alam yang terbatas.)

Menurut Dominelli (2012), *green social work* tidak hanya bekerja pada persoalan bencana saja, tetapi melihat dan bekerja pada aspek yang lebih luas, yaitu persoalan krisis lingkungan yang saling berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan struktural, disparitas sosio-ekonomi, proses industrialisasi, pola konsumsi, konteks keragaman, ketergantungan global dan keterbatasan sumber daya alam.

Selanjutnya adalah metode yang dilakukan adalah melalui perubahan sosial yang terencana terhadap penanggulangan bencana. Dalam hal kaitannya dengan penanggulangan bencana, maka intervensi secara makro, meso, dan mikro dilakukan dalam upaya mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial. Pada tataran makro, perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana harus juga memperhatikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tataran meso,

intervensi komunitas harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat ikut terlibat aktif dalam mengelola permasalahan kebencanaan. Pada tataran mikro, individu dan keluarga yang terkena dampak bencana harus mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kembali hidupnya dan beraktifitas kembali di dalam masyarakatnya.



Bagan 2.1. Hubungan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Lingkungan, Penanggulangan Bencana, dan Metode Perubahan Sosial Terencana.

Sumber : diolah dari Adi (2005).

## 2.2. Fasilitasi

Fasilitasi berasal dari bahasa Perancis *facile* dan Latin *facilis*, yang berarti dapat dengan mudah dilakukan. Fasilitasi berasal dan dikembangkan oleh berbagai profesi seperti guru, konseling, pekerja sosial, praktisi pembangunan (Hogan, 2002). Fasilitasi memiliki berbagai pengertian sesuai dengan bidang dimana

fasilitasi tersebut dikembangkan, misalnya pada bidang manajemen, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan masyarakat (Hogan, 2002).

Pada fasilitasi dalam pengembangan masyarakat, teori yang digagas dan dikembangkan berdasarkan dari teori pendidikan Paulo Freire (1921 – 1997), yang merupakan sumber utama bagi pengembangan fasilitator yang menggunakan konsep partisipasi, pemberdayaan, dan pembebasan (Bappenas-UNDP, 2007). Berdasarkan pengalamannya dalam pendidikan, Freire (dalam Hogan, 2012) mengkritisi konsep sekolah yang dikatakannya sebagai mengeksploitasi dan menghancurkan pendidikan itu sendiri, sehingga melalui sekolah berkembang apa yang disebut sebagai “*fear of freedom*” (takut akan kebebasan). Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan yang disebutnya sebagai pendidikan kritis/pembebasan adalah bahwa pembelajaran masyarakat sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidupnya (Bappenas-UNDP, 2007).

Menurut Freire (1972, dalam Hogan 2012), terdapat dua pilihan dalam tujuan pendidikan, yaitu pertama pendidikan di desain untuk mempertahankan *status quo*, dimana nilai dan budaya dari kelas dominan berada pada relasi mendomestifikasi masyarakat, menurut Freire (1972, dalam Hogan 2012) hal ini tidak memanusiakan, Freire (1972, dalam Hogan 2012) menyebutnya sebagai *banking approach* dalam proses pendidikannya. Pilihan kedua menurut Freire (1972, dalam Hogan 2012) adalah pendidikan dapat di desain untuk membebaskan manusia, menolong mereka untuk menjadi kritis, bebas, aktif dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, hal ini yang disebut Freire (1972, dalam Hogan 2012) sebagai *problemposing approach*.

Solusi yang ditawarkan oleh Freire (dalam Hogan, 2012) adalah proses “*conscientization*” (penyadaran) yaitu “*a consciousness raising process in which a facilitator dialogues with groups to deepen the awareness of learners of both the socio-cultural reality and the political arena that shapes their lives*” (sebuah proses peningkatan kesadaran yang dibangun dari dialog antara fasilitator dan kelompok untuk memperdalam kewaspadaan pemelajar terhadap realitas sosial-budaya dan arena politik yang membentuk kehidupan mereka). Disini yang dimaksud *conscientization* menurut Freire (dalam Hogan, 2012) merupakan proses

peningkatan kesadaran, yang dilakukan melalui metode dialogis yang saling berkaitan dalam realitas sosial budaya dan politik yang dapat membentuk kehidupan mereka. Freire juga menyebut kegiatan pembelajaran sebagai proses Aksi-Refleksi-Aksi atau disebut juga sebagai proses dialektika. Refleksi artinya merenungi, menganalisis, atau memaknai suatu peristiwa atau keadaan atau pengalaman, sehingga timbul kesadaran. Kesadaran itu mendorong suatu tindakan atau aksi. Proses dialektika terjadi karena perenungan itu menjadi pelajaran dan mendasari aksi berikutnya terutama untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari masalah yang terjadi (Bappenas-UNDP, 2007).

Tabel 2.1. Perbandingan “*Problemposing Approach*” dan “*Banking Approach*”

No	<i>Banking Approach</i>	<i>Problemposing Approach</i>
1	<i>Expert and/or teacher seen as possessing all essential knowledge and/or skills. (Guru atau ahli sebagai sumber ilmu atau keahlian)</i>	<i>Facilitator provides a framework for thinking, creative, active, participants to consider common problems and find solutions. (Fasilitator menyediakan kerangka untuk berfikir, kreatif, partisipasi aktif dalam memahami permasalahan dan menemukan solusi)</i>
2	<i>Learners regarded as ‘empty vessels’ needing to be filled with knowledge. (Peserta didik sebagai gelas kosong yang perlu diisi dengan pengetahuan)</i>	<i>Facilitator raises questions: why? How? Who? (Fasilitator mengajukan pertanyaan mengapa? Bagaimana? dan siapa?)</i>
3	<i>Expert and/or teacher talks and others listen passively, that is, monologue and silence respectively. (Guru atau ahli berbicara dan yang lainnya mendengarkan secara pasif)</i>	<i>Participants are active, describing, analysing, suggesting, deciding, planning. (Partisipan adalah aktif, menggambarkan, menganalisis, menyarankan, memutuskan, merencanakan)</i>

Sumber : Hogan (2002)

Konsep pendidikan dan pembelajaran yang dipengaruhi dan dikembangkan dari teori Freire tersebut antara lain adalah Pendidikan Orang Dewasa, Komunikasi

Pembangunan Partisipatoris, *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau *Participatory Learning and Action* (PLA) (Bappenas-UNDP, 2007).

Menurut Adi (2007), PRA adalah suatu proses dimana komunitas akan menganalisis situasi yang mereka hadapi dan mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di dalam konsep PRA/PLA terdapat 3 agenda yang harus menjadi satu kesatuan, yaitu: pengkajian, pembelajaran masyarakat, dan aksi/tindakan/kegiatan (Bappenas-UNDP, 2007).

Komunikasi pembangunan partisipatif (kombangpar) merupakan pendekatan dalam pembangunan, menempatkan masyarakat sebagai aktor/subyek seperti pemangku kepentingan lainnya (pemerintah desa, dinas/instansi pemerintah, LSM, dan sebagainya) dalam sebuah hubungan kemitraan (*partnership*). Sehingga dalam hal ini masyarakat bukanlah hanya sasaran atau penerima manfaat program saja (Bappenas-UNDP, 2007).

Tugas seorang praktisi pembangunan yang menggunakan pendekatan kombangpar, bukanlah untuk mentransfer atau menyebarluaskan informasi, melainkan menggunakan komunikasi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini berarti peningkatan kapasitas masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara aktif (Bappenas-UNDP, 2007).

Menurut Uphoff (1986, dalam Soetomo 2011) fasilitasi merupakan salah satu pendekatan dari pengembangan kapasitas masyarakat, di dalam pengembangan kapasitas masyarakat terdapat 3 pendekatan dalam melakukan stimulus eksternal, yaitu *assistance*, *facilitation*, dan *Promotion*. Uphoff (1986, dalam Soetomo 2011) menjelaskan bahwa pendekatan *assistance* diberikan kepada lembaga/masyarakat yang memiliki kapasitas yang lemah, kemudian *facilitation* diberikan kepada lembaga/masyarakat yang memiliki kapasitas sedang, dan *promotion* diberikan kepada lembaga/masyarakat yang memiliki kapasitas yang sudah kuat.

Dalam hal melakukan fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana, berdasarkan Perka BNPB No 1 Tahun 2012, Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program desa/kelurahan tangguh bencana dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan dan masyarakat.

Adapun pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten/kota berdasarkan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, pada tahapan awal mendorong dan memfasilitasi desa/kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan program desa/kelurahan tangguh bencana. Pada gambar 2.1. terlihat bahwa kegiatan tersebut bertemakan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana.



Gambar 2.1 Pelaksanaan Fasilitasi Desa Tangguh Bencana di Desa Pananjung

Sumber : Koleksi Foto SA

Melalui fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah program atau sebagai suatu proses (Adi, 2008). Adi (2008) melihat bahwa pemberdayaan sebagai suatu program dapat dilihat dari tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, sehingga sudah ada batas waktu yang ditentukan, oleh karena itu jika program yang dilakukan selesai maka pemberdayaan juga selesai dilakukan. Adi (2008) memberikan contoh pada proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang terkadang saling tidak berhubungan, atau tidak saling mengetahui padahal masih dalam satu lembaga pemerintah, dari sisi

organisasi nonpemerintah juga program yang sifatnya tidak berkelanjutan karena ketergantungan pada donor.

Pada pemberdayaan sebagai sebuah proses, Hogan (dalam Adi, 2008) menggambarkan pemberdayaan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan,
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan,
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek,
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan, dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya.

Kaitan antara pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah program ataupun proses akan menentukan dimana posisi yang dilakukan oleh fasilitator sebagai agen perubahan. Adi (2008) menjelaskan apabila fasilitator berasal dari eksternal maka program pemberdayaan masyarakat akan diikuti adanya terminasi, sedangkan apabila fasilitator berasal dari internal komunitas maka pemberdayaan masyarakat dapat diarahkan kepada proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

## 2.3. Bencana

### 2.3.1 Definisi Bencana

Coppola (2007 hal. 25) menyebutkan bahwa *disaster* berasal dari bahasa latin *dis* dan *astro*, yang berarti “*away from the star*” (jauh dari bintang) atau dengan kata lainnya adalah “*an event to be blamed on an unfortunate astrological configuration*” (sebuah peristiwa yang dapat disalahkan dalam kesialan akibat konfigurasi astrologis). Sehingga bencana datang ketika resiko bahaya terjadi. Coppola (2007 hal. 25) kemudian mengutip definisi bencana berdasarkan

Persatuan Bangsa-Bangsa (1992) bahwa bencana adalah “*a serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material, or environmental losses which exceed the ability of the affected society to cope using only its own resources*” (perpecahan serius mengenai fungsi masyarakat yang menyebabkan persebaran manusia, benda, atau kerugian lingkungan yang melampaui kemampuan masyarakat apabila mereka mencoba mengatasinya dengan sumberdaya yang ada).

Beberapa definisi yang telah berkembang tentang bencana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Definisi Bencana

Sumber	Definisi Bencana
Charles Fritz (1961 hal 655)	<i>An event, concentrated in time and space, in which a society, or a relatively selfsufficient subdivision of a society, undergoes severe danger and incurs such losses to its members and physical appurtenances that the social structure is disrupted and the fulfillment of all or some of the essential functions of the society is prevented</i> (Peristiwa, yang terkonsentrasi dalam ruang dan waktu, dalam sebuah masyarakat atau kelompok yang lebih kecil lagi, menyebabkan bahaya dan menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakatnya atau bagi fasilitas fisik yang menyebabkan terganggunya struktur sosial dan pemenuhan semua atau sebagian fungsi masyarakat yang mungkin diatasi).
Quarantelli (1985)	<i>on the other hand, provides a definition of disaster in the context of demand and capabilities of a community to handle an extreme event</i> (di pihak lain, [Quarantelli] mendefinisikan bencana dalam konteks kebutuhan dan kemampuan sekelompok komunitas untuk mengatasi peristiwa ekstrim).
Quarantelli	<i>Disaster as a crisis occasion where demands exceed</i>

(Sambungan)

(2006)	<p><i>capabilities, and he offers the following continuum of labels for disasters of varying magnitude relative to community resources:</i></p> <p><i>Crisis: Capacity exceeds demand (with capacity to spare)</i></p> <p><i>Emergency: Capacity meets or somewhat exceeds demands</i></p> <p><i>Disaster: Demand exceeds capacity</i></p> <p><i>Catastrophe: Demands overwhelmed and may destroy capacity.</i></p> <p>(Bencana sebagai sebuah momen krisis ketika permintaan melampaui kemampuan, dan dia [Quarantelli] menawarkan keberlangsungan label berikut untuk bencana dalam berbagai kekuatan yang relatif terhadap sumberdaya yang dimiliki komunitas:</p> <p>Krisis : Kapasitas melampaui permintaan (dengan kapasitas untuk berbagi)</p> <p>Darurat : Kapasitas bertemu atau melampaui kebutuhan</p> <p>Bencana: Permintaan melampaui kemampuan</p> <p>Kehancuran: Permintaan jauh melampaui dan dapat merusak kapasitas).</p>
Degg (1992)	<p><i>Natural disasters result from spatial interaction between a hazardous environmental process (i.e., an extreme physical phenomenon such as an earthquake) and a population that is sensitive to that process and likely to experience human and/or economic loss from it. Disasters disrupt “normal” life, affect livelihood systems, and halt individual and/or community functions at least temporarily</i> (bencana alamiah merupakan hasil interaksi spasial antara sebuah proses kerusakan lingkungan (yaitu, sebuah fenomena fisik yang ekstrim seperti gempa bumi) dan sebuah populasi yang sangat sensitif terhadap proses dan menyebabkan pengalaman kepada manusia dan/atau kerugian ekonomi. Bencana mengganggu kehidupan “normal,”</p>

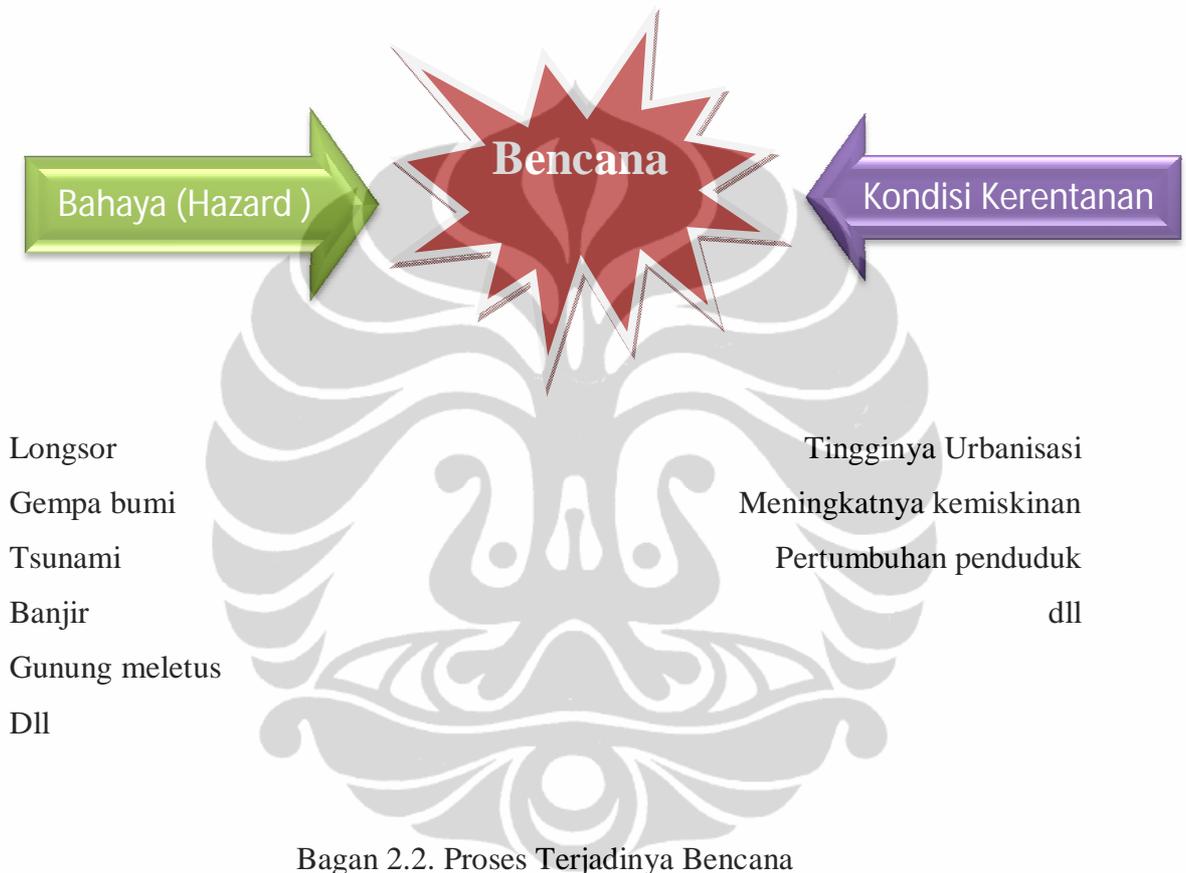
(Sambungan)

	mempengaruhi sistem kehidupan dan terhentinya fungsi individu dan/atau komunitas secara temporal).
Bimal Kanti Paul (2011 hal 7)	<i>Disasters are actual threats to humans and their welfare. Disasters are generally conceived as adverse events, the negative impacts of which cannot be overcome without outside assistance, or support from many outside sources, including state and national governments, and even governments from other countries</i> (Bencana adalah ancaman nyata kepada manusia dan kesejahteraannya. Bencana secara umum dipahami sebagai peristiwa merugikan, yang pengaruh negatifnya tidak dapat diatasi tanpa bimbingan pihak luar, atau dukungan sumberdaya luar, termasuk negara dan pemerintah, bahkan dari pemerintah negara lain).
Undang- Undang Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007	Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sumber: diolah dari Paul (2011) dan UU Penanggulangan Bencana tahun 2007

Mauro (dalam Paul, 2011 hal 11) menjelaskan bahwa terjadinya bencana karena adanya kondisi kerentanan di dalam masyarakat dan bahaya yang datang dari alam. Kondisi kerentanan tersebut dapat berupa tingginya urbanisasi, meningkatnya kemiskinan, pertumbuhan penduduk. Sedangkan bahaya yang datang dari alam antara lain longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus. Cutter (dalam Paul 2011 hal 68) menjelaskan bahwa kerentanan “*those circumstances that put people and places at risk and those that reduce the ability of people and places to respond to environmental threats*” (lingkungan yang

meletakkan orang-orang dan tempat dalam resiko dan yang menurunkan kemampuan orang dan tempat untuk merespon ancaman lingkungan). Alexander (dalam Paul 2011 hal 2), menjelaskan bahwa Hazard adalah “*a hazard is an extreme geophysical event that is capable of causing a disaster*” (bahaya adalah sebuah peristiwa geofisik ekstrim yang berpotensi menyebabkan bencana).



Sumber : Mauro (2004, dalam Paul 2011 hal 11)

### 2.3.2. Tipe Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 terdapat tiga kategori bencana yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

BNPB menjelaskan berbagai macam bencana antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3. Berbagai Macam Bencana dan Definisinya

Jenis Bencana	Definisi
Gempa bumi	Peristiwa pelepasan energi yang diakibatkan oleh pergeseran/pergerakan pada bagian dalam bumi (kerak bumi) secara tiba-tiba. Tipe gempa bumi yang umum ada dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik.
Letusan gunung api	Merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah 'erupsi'. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
Tsunami	Adalah rangkaian gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Tsunami dapat disebabkan oleh: (1) gempa bumi diikuti dengan dislokasi/perpindahan massa/batuan yang sangat besar di bawah air (laut/danau); (2) tanah longsor di dalam laut; (3) letusan gunung api di bawah laut atau gunung api pulau.
Tanah longsor	Merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, menuruni atau

(Sambungan)

	keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
Banjir	Merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal sehingga system pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem drainase dangkal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap.
Banjir bandang	Biasanya terjadi pada aliran sungai yang kemiringan dasar sungai curam. Aliran banjir yang tinggi dan sangat cepat dan limpasannya dapat membawa batu besar atau bongkahan dan pepohonan serta merusak atau menghanyutkan apa saja yang dilewati namun cepat surut kembali.
Kebakaran hutan	Merupakan suatu keadaan di mana hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan seringkali menyebabkan bencana asap yang mengganggu kepada masyarakat sekitar.
Angin topan	Merupakan pusat angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara agraris balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin topan ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu system cuaca.
Gelombang pasang atau badai	Adalah gelombang tinggi yang yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia

(Sambungan)

	dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.
Abrasi	Adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
Rob	Adalah perubahan naiknya posisi permukaan perairan atau samudra yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari yang mengakibatkan perubahan kedalaman perairan dan arus pasang.

Sumber : Indeks Rawan Bencana (2011, hal 5-7)

Penelitian ini lebih memfokuskan pada peristiwa bencana alam, karena melihat kondisi Kabupaten Ciamis yang memiliki karakteristik sebagai daerah yang rawan bencana alam. Juga melihat kejadian bencana yang terjadi sebelumnya yaitu pada tsunami Pangandaran tahun 2006, dan gempa Tasikmalaya tahun 2009 telah mendapat perhatian skala nasional, serta dampak dari bencana tersebut meningkatkan kewaspadaan masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi bencana.

### 2.3.3. Bencana yang Terjadi di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan dari Rekompak ciptakarya (25-01-2012) yang mengacu dari dokumen RPBD dan RAD Kabupaten Ciamis, wilayah rawan bencana di Kabupaten Ciamis tersebar berdasar jenis bencana yaitu:

1. Tanah longsor/pergerakan tanah di 21 Kecamatan,
2. Banjir di 10 Kecamatan,
3. Kebakaran di 21 kecamatan,
4. Gempa bumi di 36 Kecamatan,
5. Tsunami di 6 Kecamatan,
6. Angin kencang/puting beliung di 17 Kecamatan.

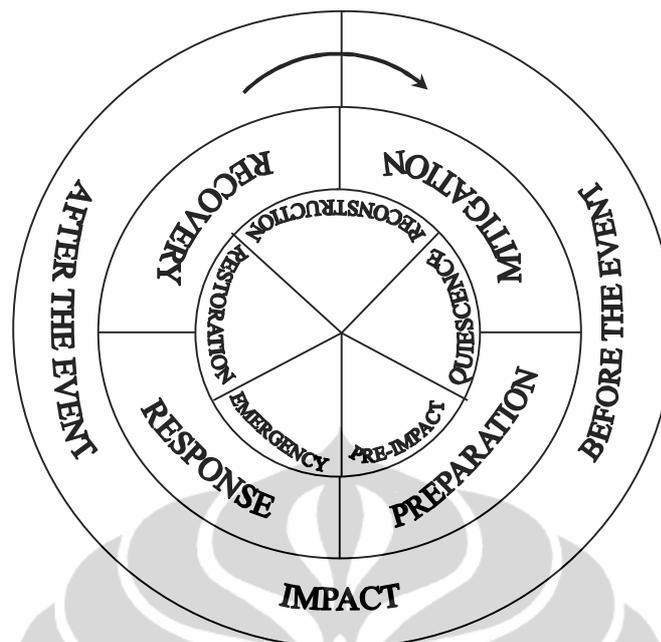
Melihat data diatas, bencana yang sering terjadi adalah gempa bumi karena terjadi merata di semua Kecamatan di Ciamis, kemudian bencana kebakaran dan tanah longsor terjadi di 21 kecamatan. Meskipun tsunami terjadi di 6 kecamatan, namun pengalaman bencana tsunami Pangandaran tahun 2006 menyebabkan bencana tsunami tersebut sangat diwaspadai, oleh karena itu pengembangan desa tangguh bencana dilakukan di dua desa di kecamatan Pangandaran yaitu Desa Pananjung dan Desa Pangandaran.

### 2.4. Manajemen Bencana

Manajemen bencana modern mengacu pada pendekatan empat fase, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Coppola (2007 hal 8) menjelaskan tiap komponen tersebut sebagai berikut:

1. *Mitigation. Involves reducing or eliminating the likelihood or the consequences of a hazard, or both. Mitigation seeks to “treat” the hazard such that it impacts society to a lesser degree* (Pada tahap mitigasi, dilakukan upaya untuk mengurangi akibat yang didapat dari bahaya, mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi bahaya yang dapat berdampak pada masyarakat pada tahap seminimal mungkin).

2. *Preparedness. Involves equipping people who may be impacted by a disaster or who may be able to help those impacted with the tools to increase their chance of survival and to minimize their financial and other losses* (Merupakan upaya membekali masyarakat yang mungkin akan terkena dampak bencana atau yang dapat menolong dari dampak bencana dengan peralatan untuk meningkatkan kesempatan mereka bertahan dan meminimalkan finansial dan kerugian lainnya).
3. *Response. Involves taking action to reduce or eliminate the impact of disasters that have occurred or are currently occurring, in order to prevent further suffering, financial loss, or a combination of both. Relief, a term commonly used in international disaster management* (Tanggap darurat, upaya melakukan tindakan untuk mengurangi atau menghapus dampak dari bencana yang telah terjadi atau yang sedang terjadi, dengan tujuan untuk mencegah penderitaan yang berlanjut, kerugian finansial, atau kombinasi keduanya).
4. *Recovery. Involves returning victims' lives back to a normal state following the impact of disaster consequences. The recovery phase generally begins after the immediate response has ended, and can persist for months or year thereafter* (Pemulihan, sebagai upaya untuk mengembalikan korban kembali kepada kehidupan normal setelah terkena dampak bencana. Fase pemulihan pada umumnya dimulai setelah kegiatan tanggap darurat berakhir, dan dapat tetap dapat dilakukan selama berbulan-bulan atau tahunan setelahnya).



Bagan 2.3. Siklus manajemen bencana

Sumber : David Alexander, 2002 (dalam Coppola, 2007 hal 8)

Coppola (2007) menjelaskan bahwa terdapat dua tipe mitigasi, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural. Tipe mitigasi struktural adalah upaya yang dilakukan melalui konstruksi, engineering, perubahan mekanikal lainnya atau perbaikan-perbaikan dalam mengurangi resiko bencana, terkadang mitigasi struktural dapat dikatakan bahwa “manusia mengontrol alam” ketika diterapkan pada bencana alam. Tipe ini pada pelaksanaannya berbiaya tinggi dan di dalamnya termasuk regulasi, penegakan, inspeksi, pemeliharaan, dan isu-isu terbaru (Coppola, 2007 hal. 179).

Tipe mitigasi nonstruktural menurut Coppola (2007 hal. 185) pada umumnya berkaitan dengan pengurangan dalam kemungkinan atau konsekuensi resiko melalui modifikasi perilaku manusia atau proses alamiah, tanpa harus menggunakan *engineered structures*. Tipe ini lebih mempertibangkan mekanisme “manusia beradaptasi terhadap alam.” Tentu saja biaya yang akan dikeluarkan sangat terjangkau dan mempermudah komunitas yang memiliki dana sedikit atau

sumberdaya teknologi untuk diterapkan. Beberapa contoh yang dilakukan dalam mitigasi nonstruktural adalah program pendidikan dan kewaspadaan komunitas, kontrol lingkungan, modifikasi perilaku.

Paul (2011 hal. 158) mencatat bahwa terdapat berbagai kritikan terhadap mitigasi, dimana proyek mitigasi dalam skala besar dan berorientasi pada teknologi tinggi, dan tentu saja hal ini merupakan biaya tinggi. Pencarian dana untuk mengimplementasikan proyek mitigasi tersebut tentu sangat menantang. Pendekatan *top-down* pada umumnya dilakukan untuk mendesain dan mengimplementasikan proyek mitigasi tersebut. Beberapa program mitigasi hanya dapat dilakukan pada pengurangan resiko dari bahaya yang disebabkan alam, dan tidak melakukan perubahan sosial dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Kesiapsiagaan menurut Tierney (2001, dalam Paul 2011 hal. 170) terdiri dari kesiapsiagaan fisik dan kesiapsiagaan sosial. Baik itu kesiapsiagaan fisik dan kesiapsiagaan sosial terdapat lima fase siklus yaitu: meningkatkan kesadaran, assesmen kerentanan dan bahaya, meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dan bagaimana melakukan adaptasi, perencanaan, dan pelatihan.

Di sisi lain, Coppola (2007 hal. 209) menyebutkan bahwa kesiapsiagaan terdiri dari kesiapsiagaan pemerintah dan kesiapsiagaan publik. Kesiapsiagaan pemerintah yang dimaksud Coppola (2007 hal. 210) adalah pemerintah melalui kemampuannya secara efektif melindungi masyarakatnya, ujian yang sebenarnya untuk menunjukkan kemampuan pemerintah adalah terlihat ketika saat terjadi bencana. Kesiapsiagaan pemerintah terdiri dari perencanaan, latihan, pendidikan, perlengkapan, dan kewenangan.

Pada kesiapsiagaan masyarakat, Coppola (2007 hal. 222) menjelaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat merupakan tindakan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk menolong dirinya, keluarga, lingkungannya, dan masyarakat. Untuk lebih efektif maka hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran akan bahaya bencana, juga memberikan keterampilan untuk melakukan penyelamatan, pertolongan pertama.

Tanggap darurat menurut Coppola (2009 hal. 252) merupakan fase yang paling kompleks dalam manajemen bencana. Waktu yang terbatas, kehilangan nyawa, dan kerusakan lainnya. Tanggap darurat tidak hanya meliputi kebutuhan yang diperlukan segera (seperti pertolongan pertama, pencarian dan penyelamatan, dan tempat aman pengungsian), tetapi juga diperlukan pembukaan kembali infrastruktur yang telah rusak (seperti pembukaan jalur transportasi, mengaktifkan kembali listrik dan akses komunikasi, dan distribusi makanan dan air bersih) untuk memperlancar proses tanggap darurat, sehingga dapat mengurangi korban jiwa yang lebih banyak, serta secara cepat mengembalikan fungsi masyarakat agar kembali normal.

Pemulihan menurut Coppola (2007 hal. 302) terdiri dari dua fase yaitu pemulihan jangka pendek dan jangka panjang. Pada pemulihan jangka pendek mulai dilakukan ketika kegiatan tanggap darurat sedang berlangsung. Pemulihan jangka pendek dilakukan untuk mengembalikan kembali kehidupan orang-orang yang tertimpa bencana, dan juga membantu dalam mempersiapkan jalan panjang membangun kembali kehidupan mereka. Pada pemulihan jangka panjang (Coppola, 2007 hal. 302), masyarakat atau negara mulai kembali membangun dan merehabilitasi, untuk bencana berskala besar maka perlu waktu bertahun-tahun, bahkan perbaikan ekonomi masyarakat atau negara juga memerlukan waktu yang lama, sehingga kembali ke kondisi seperti saat kondisi prabencana merupakan suatu tantangan. Tipe pemulihan menurut Coppola (2007 hal. 315) terdiri dari asistensi publik, sektor perumahan, pemulihan ekonomi, pemulihan individu, keluarga, dan sosial.

Penelitian ini lebih melihat pada aspek sebelum terjadinya bencana, yaitu aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Karena pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi resiko bencana, sehingga kegiatannya lebih mengarah pada aspek ketangguhan masyarakat sebelum terjadinya bencana.

## 2.5. Kebijakan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada pada saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pada pelaksanaannya, kegiatan penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahap, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pada tataran perencanaan, BNPB telah membuat Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010 – 2014, dan juga Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN PRB) 2010 – 2012. Renas PB merupakan dokumen perencanaan lima tahun, yang mengacu pada Pasal 35-36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian RAN PRB merupakan dokumen perencanaan dua tahunan, perencanaan pengurangan risiko bencana merupakan bagian dari perencanaan penanggulangan bencana, dan merupakan penjelasan lebih rinci dari kebijakan rencana penanggulangan bencana dalam aspek pengurangan risiko bencana (Bappenas dan BNPB, 2010 hal. 3-9).

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Perda tersebut sekaligus sebagai sebuah kebijakan yang membuat berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Ciamis.

Kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis antara lain adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai dengan Tahun 2014. Pada Perda ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, didalam Perda tersebut terdapat beberapa daerah yang dianggap sebagai rawan bencana alam.

Selain itu, di dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Ciamis telah dibuat dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) untuk 5 tahun (2012 – 2016) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB untuk 2 tahun

(2012 – 2014). Dokumen kebijakan tersebut ternyata lebih dulu menjadi produk kebijakan dibandingkan dengan tingkatan Provinsi Jawa Barat, meski kemudian ada upaya dari BPBD Provinsi Jawa Barat agar BPBD Kabupaten Ciamis menyesuaikan RPBD dan RAD PRB dengan yang dibuat oleh BPBD Provinsi Jawa Barat, namun tidak dapat dilakukan oleh BPBD Kabupaten Ciamis.

Begitupun halnya dengan cakupan kerja dari BPBD Kabupaten Ciamis yang juga mencakup Kabupaten Pangandaran, karena memang pada saat penyusunan dokumen kebijakan RPBD dan RAD PRB posisi 10 Kecamatan di daerah Pangandaran masih merupakan wilayah Kabupaten Ciamis. Sehingga perubahan dokumen kebijakan dilakukan ketika masa waktu kebijakan tersebut selesai.

Kabupaten Ciamis juga telah terdapat dokumen kebijakan rencana kontijensi (Renkon), berdasarkan potensi bencana di Kabupaten Ciamis terdapat 8 jenis ancaman bencana, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran bangunan, kekeringan, angin puting beliung, epidemi dan wabah penyakit. Karena keterbatasan dana yang ada, Kabupaten Ciamis telah memiliki dua dokumern Renkon, diprioritaskan pada bencana yang sering terjadi dan merata di seluruh kecamatan di Ciamis, yaitu Renkon gempa bumi dan Renkon tanah longsor.

Untuk bencana tsunami karena tidak merata terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis, dimana hanya terjadi di 6 kecamatan pesisir yang saat ini menjadi Kabupaten Pangandaran, padahal berdasarkan data BNPB (2011) menempati urutan ke 3 secara nasional, tetapi ternyata tidak diprioritaskan untuk dibuatkan Renkon. Sehingga dengan adanya daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Pangandaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis, melalui Undang-Undang tersebut maka potensi bencana tsunami sudah tidak ada lagi di Kabupaten Ciamis.

## 2.6. Kebijakan dan Program Desa Tangguh Bencana

Kebijakan desa/kelurahan tangguh bencana merupakan perkembangan kebijakan dalam melibatkan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana. Dasar kebijakan tersebut melalui Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012.

Adanya dokumen kebijakan RPBD dan RAD PRB Kabupaten Ciamis maka di daerah desa Pangandaran dan desa Pananjung dapat menjadi *pilot project* desa tangguh bencana di Jawa Barat.

Kebijakan lainnya yang terkait dengan desa/kelurahan tangguh bencana adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk pelaksanaan fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana, dibuat Petunjuk Teknis Desa Tangguh Bencana tahun 2012, yang berisi tentang pedoman,

daerah sasaran, pendanaan, dan indikator minimal pencapaian fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2012.

Pada pelaksanaan desa tangguh bencana yang dilaksanakan di Jawa Barat, memasukkan juga Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam hal ini mengenai Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat, sebagai organisasi di tingkat desa yang bergerak di bidang pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana.

Selain peraturan yang telah disebutkan diatas, kebijakan desa/kelurahan tangguh bencana juga mendorong masyarakat membuat kebijakan dan perencanaan di tingkat desa/kelurahan, hal tersebut sebagai syarat utama dalam mewujudkan desa tangguh bencana.

### **2.7. Komunitas Tangguh Bencana (*Disaster Resilience Community*)**

Adanya konsep masyarakat tangguh tentu tak bisa dilepaskan dari perkembangan teori dan kebijakan global di bidang kebencanaan, seperti melalui *Hyogo Framework for Action (HFA)* dan juga perkembangan pemikiran mengenai komunitas tangguh bencana (*disaster community resilience*). Sebetulnya dapat dikatakan bahwa membahas konsep ketangguhan (*resilience*) tidak bisa dilepaskan dengan konsep kerentanan (*vulnerability*), dan bahkan dua hal tersebut dianggap saling melengkapi.

Buckle (dalam Paton dan Johnston 2006, hal. 97) menyebutkan bahwa ketangguhan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang bahaya dan karakteristik masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dalam pengurangan dampak bencana,
2. Menyebarkan nilai masyarakat, hal ini termasuk nilai positif di masa mendatang, komitmen terhadap masyarakat secara keseluruhan dan tujuan masyarakat.
3. Infrastruktur sosial, termasuk di dalamnya saluran informasi, jaringan sosial, dan organisasi masyarakat,

4. Trend positif dalam sosial ekonomi
5. Kemitraan diantara agensi, kelompok masyarakat dan pengusaha, atau berbagai kombinasi dalam fasilitasi inovasi, menyebarkan pengetahuan, pengalaman dan sumberdaya.
6. Sumberdaya dan keahlian

Pakar lainnya yang mengembangkan karakteristik komunitas tangguh bencana melalui indikator-indikator adalah John Twigg (2007), karakteristik ini dikembangkan sebagai pedoman bagi pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam kegiatan pengurangan resiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim di tingkatan komunitas dan bekerjasama dengan komunitas rentan tersebut.

Pendapat Twigg (2007) ini juga yang menjadi acuan dalam program desa tangguh bencana, dapat dilihat melalui pendahuluan Juknis desa tangguh bencana tahun 2012 yang mengutip bahwa :

Masyarakat yang tangguh bencana (*disaster resilient community*) ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan kalau terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

Terdapat 5 hal penting dalam ketangguhan dan pengurangan resiko bencana, Twigg (2007) menyebutnya sebagai *thematic areas*, dimana hal tersebut berdasar dari *Hyogo Framework for Action* (HFA) dan mencakup seluruh aspek dari ketangguhan, 5 area tematik tersebut adalah:

1. Pemerintah
2. Assesmen resiko
3. Pendidikan dan pengetahuan
4. Manajemen resiko dan pengurangan kerentanan
5. Kesiapsiagaan dan respon bencana

Selengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Karakteristik Masyarakat Tangguh Bencana Menurut Twigg

No	Area Tematik	Komponen Ketangguhan
1	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan, perencanaan, prioritas dan komitmen politik</li> <li>• Sistem hukum dan regulasi.</li> <li>• Terintegrasi dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan.</li> <li>• Terintergrasi dengan respon kedaruratan dan pemulihan.</li> <li>• Mekanisme institusional, kapasitas dan struktur, alokasi pertanggungjawaban.</li> <li>• Kemitraan.</li> <li>• Akuntabilitas dan partisipasi komunitas.</li> </ul>
2	Assesmen resiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan assesmen bahaya/resiko.</li> <li>• Data dan assesmen Kerentanan/kapasitas dan dampak.</li> <li>• Sainifik dan kapasitas teknik dan inovasi.</li> </ul>
3	Pendidikan dan pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publik awareness, pengetahuan, dan keahlian</li> <li>• Manajemen informasi dan sharing</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan</li> <li>• Budaya, perilaku, motivasi</li> <li>• Pembelajaran dan penelitian</li> </ul>
4	Manajemen resiko dan pengurangan kerentanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen sumberdaya alam dan lingkungan</li> <li>• Kesehatan dan well being</li> <li>• Sustainable livelihoods</li> <li>• Perlindungan sosial</li> <li>• Instrumen finansial</li> <li>• Perlindungan fisik: aturan struktural dan teknikal</li> <li>• Rezim Perencanaan</li> </ul>
5	Kesiapsiagaan dan respon bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas organisasi dan koordinasi</li> <li>• Sistem peringatan dini</li> <li>• Kesiapsiagaan dan perencanaan kontinjensi</li> <li>• Sumberdaya kedaruratan dan infrastruktur</li> <li>• Respon kedaruratan dan pemulihan</li> <li>• Partisipasi, volunterisme, akuntabilitas</li> </ul>

Sumber : Twigg (2007)

Berasarkan komponen ketangguhan yang telah dicapai di dalam suatu masyarakat, Twigg (2007) kemudian menyebutkan bahwa terdapat 5 level dalam ketangguhan komunitas tersebut, yaitu:

*Level 1 Little awareness of the issue(s) or motivation to address them. Actions limited to crisis response. Level 2 Awareness of the issue(s) and willingness to address them. Capacity to act (knowledge and skills, human, material and other resources) remains limited. Interventions tend to be one-off, piecemeal and short-term. Level 3 Development and implementation of solutions. Capacity to act is improved and substantial. Interventions are more numerous and long-term. Level 4 Coherence and integration. Interventions are extensive, covering all main aspects of the problem, and they are linked within a coherent long-term strategy. Level 5 A 'culture of safety' exists among all stakeholders, where DRR is embedded in all relevant policy, planning, practice, attitudes and behavior (hal 14).*

(Level 1, Memiliki sedikit kesadaran terhadap isu-isu atau motivasi untuk menangani bencana/krisis. Tindakan yang dilakukan terbatas pada respon terhadap krisis. Level 2, Adanya kesadaran terhadap isu-isu bencana dan keinginan untuk menanganinya. Kapasitas untuk bertindak masih terbatas. Intervensi yang dilakukan biasanya untuk jangka pendek. Level 3, Mengembangkan dan menerapkan solusi. Kapasitas bertindak semakin meningkat. Intervensi yang dilakukan dalam jangka panjang. Level 4, Koordinasi dan integrasi. Intervensi yang dilakukan bersifat meluas dan saling terhubung satu sama lain dalam sebuah strategi jangka panjang yang terkoordinasi. Level 5, Budaya *safety* telah menyatu ke seluruh stakeholder, pengurangan resiko bencana terpadu ke dalam kebijakan, perencanaan, praktik, sikap dan perilaku yang relevan.)

Selain ketangguhan komunitas terhadap bencana secara umum, ternyata berkembang juga ketangguhan masyarakat terhadap tsunami. Morin *et al.*, (2008) melihat bahwa ketangguhan terhadap bencana tsunami merupakan konsep yang masih relatif baru, pengembangannya berorientasi pada mitigasi tsunami, dan dilakukan dalam hal ketika tidak terjadi bencana. Berawal dari Bernard (1999,

dalam Morin *et al* 2008) yang menggambarkan bahwa masyarakat tangguh tsunami sebagai masyarakat yang dapat membuat peta bencana tsunami, mengimplementasikan dan memelihara pendidikan, dan mengembangkan sistem peringatan dini.

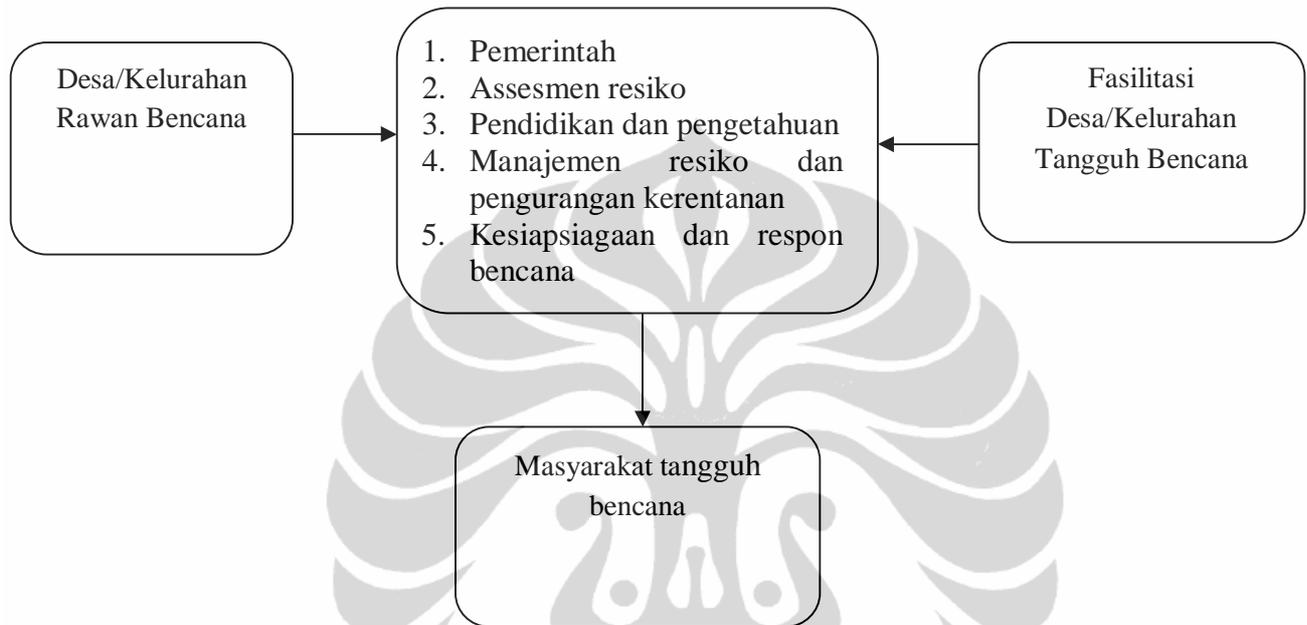
Pada perkembangannya kemudian Dengler (2005, dalam Morin *et al.* 2008) memberikan *benchmark* bagi masyarakat pesisir untuk mengakses status masyarakat tangguh adalah:

1. Memahami bahaya tsunami
2. Kebutuhan peralatan mitigasi
3. Diseminasi informasi tentang bahaya tsunami
4. Pertukaran informasi dengan daerah resiko lainnya, dan
5. Perencanaan kelembagaan dalam manajemen bencana.

Dari berbagai upaya yang dilakukan, ternyata pendidikan merupakan bagian terbesar yang dilakukan dalam berbagai program mitigasi tsunami, dimana hal ini merupakan kunci utama dalam membangun masyarakat pesisir yang tangguh (Morin *et al.*, 2008). Pendidikan kepada masyarakat harus terus diselenggarakan walaupun berada di daerah yang telah memiliki sistem peringatan dini sekalipun. Bahkan juga perlengkapan kesiapsiagaan yang canggih tidak terlepas dari kerusakan atau juga persoalan lainnya ketika saat periode darurat. Seperti tsunami yang terjadi pada 17 Juli 2006 di Pangandaran, saat *Pacific Tsunami Warning Center* mengirimkan peringatan kepada pemerintah Indonesia, dimana peringatan tersebut tidak menjangkau pemerintah setempat dan penduduk, bencana tsunami tersebut mengakibatkan 733 jiwa meninggal di Pangandaran (Morin *et al.*, 2008).

## 2.8. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bagan 2.4. Alur Pikir Penelitian

Hogan (dalam Adi, 2008) melihat bahwa fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, di sisi lain kebanyakan yang terjadi bahwa fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program. Sehingga Adi (2008) menjelaskan bahwa fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat yang merupakan program maupun proses adalah masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kombinasi ideal dimana fasilitasi desa tangguh sebagai sebuah program BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Kabupaten Ciamis, selain sebagai program juga merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, karena dalam fasilitasi tersebut juga melibatkan masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk keberlangsungan program desa tangguh bencana.

Dalam masyarakat tangguh bencana, Twigg (2007) menjadi rujukan program desa tangguh, melalui pengembangan indikator dan karakteristik dalam masyarakat tangguh bencana. Terdapat 5 hal penting dalam ketangguhan dan pengurangan resiko bencana, Twigg (2007) menyebutnya sebagai *thematic areas*, dimana hal tersebut berdasar dari HFA dan mencakup seluruh aspek dari ketangguhan, 5 area tematik tersebut adalah:

1. Pemerintah
2. Assesmen resiko
3. Pendidikan dan pengetahuan
4. Manajemen resiko dan pengurangan kerentanan
5. Kesiapsiagaan dan respon bencana

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran. Kedua desa tersebut merupakan daerah yang rawan bencana tsunami dan gempa bumi. Melalui pengembangan desa tangguh bencana tersebut, pemerintah dan masyarakat berupaya untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana.

**BAB 3**  
**GAMBARAN UMUM DESA TANGGUH BENCANA**  
**DI DESA PANGANDARAN DAN DESA PANANJUNG**  
**KABUPATEN CIAMIS**

**3.1. Gambaran Umum**

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Ciamis berada pada 108°20' sampai dengan 108°40' Bujur Timur dan 7°40'20" sampai dengan 7°41'20" Lintang Selatan (BPS dan Bappeda Kab Ciamis, 2011).

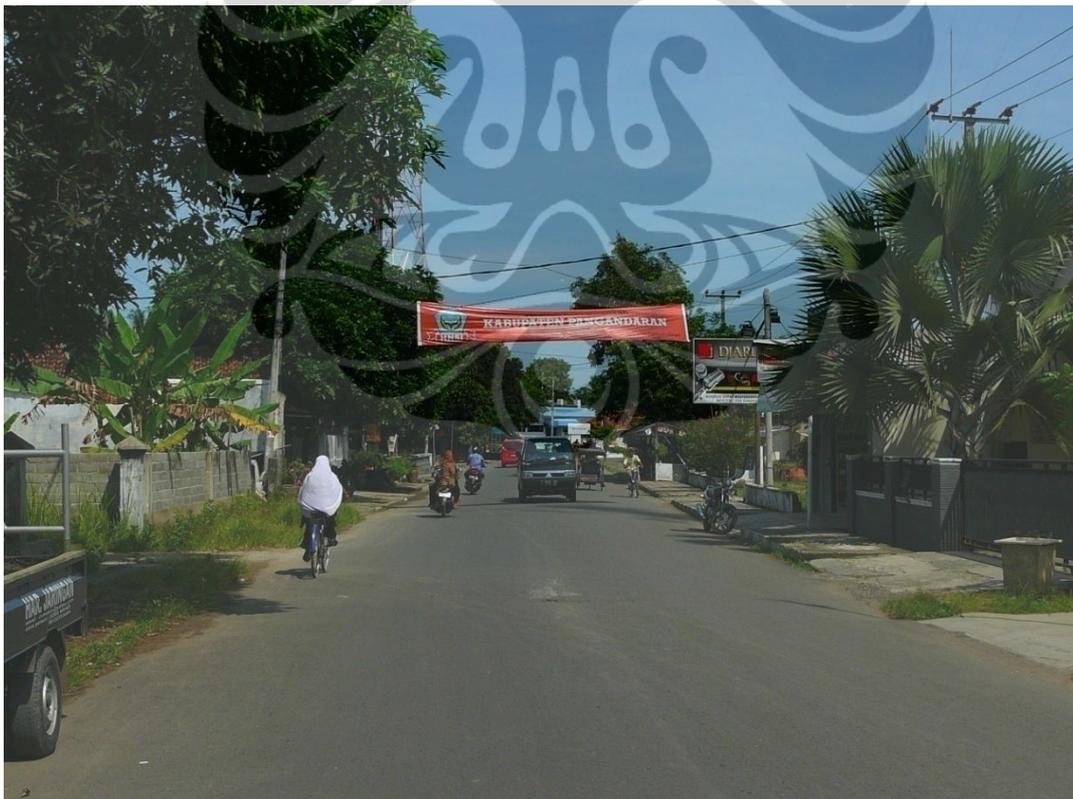
Batas wilayah Kabupaten Ciamis sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah Barat dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sebelah Timur dengan Kota Banjar dan Propinsi Jawa Tengah (BPS dan Bappeda Kab Ciamis, 2011), dan sebelah Selatan sejak tahun 2012 berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran, sehingga batas di sebelah selatan bukan lagi Samudra Indonesia. Jarak dari Ciamis ke Pangandaran adalah 92 km ke arah selatan, apabila melalui kendaraan dapat ditempuh selama sekitar 3 jam.

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Ciamis telah mengalami dua kali pemekaran daerah, yaitu Kota Banjar pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Pangandaran melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Pasal 3 UU No 21 tahun 2012, wilayah Kabupaten Ciamis yang menjadi bagian Kabupaten Pangandaran adalah: Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamulih. Ibukota dari Kabupaten Pangandaran adalah Kecamatan Parigi. Letak ibukota di Kecamatan

Parigi karena posisinya berada di tengah, dilihat dari arah Kecamatan Cimerak maupun Kecamatan Pangandaran, sehingga masyarakat di Kabupaten Pangandaran dapat dengan mudah mendapatkan akses ke Kecamatan Parigi sebagai ibukota Kabupaten Pangandaran. Luas Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan adalah  $\pm 1.010$  km<sup>2</sup>, terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 adalah  $\pm 426.171$  jiwa (BPS dan Bappeda Kab Ciamis, 2011).

Pada saat penelitian ini dilakukan, wilayah Pangandaran masih dalam proses peralihan pemekaran daerah dari Kabupaten Ciamis menuju Kabupaten Pangandaran. Namun meskipun demikian, tampak pada gambar 3.1. telah ada spanduk yang bertuliskan Kabupaten Pangandaran.



Gambar 3.1. Spanduk Kabupaten Pangandaran

Sumber : Pengamatan lapangan

Berdasarkan Koran Priangan, Kabupaten Pangandaran akan diresmikan pada tanggal 18 April 2013, sesuai dengan amanat dari Pasal 9 UU No 21 tahun 2012 bahwa peresmian Kabupaten Pangandaran dilakukan paling lambat 9 bulan sejak diundangkan yaitu sejak 17 November 2012. Penjabat Bupati Pangandaran dilantik pada 22 April 2013 di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Penjabat Bupati Pangandaran tersebut adalah Endjang Naffandy.



Gambar 3.2. Pelantikan sejumlah Penjabat Daerah Otonomi Baru di Kementerian Dalam Negeri

Sumber : Pemerintah Kabupaten Ciamis (2013)

Selain perkembangan mengenai pemekaran daerah otonomi baru, Kabupaten Ciamis merupakan daerah rawan bencana tsunami dan gempa bumi yang termasuk dalam kategori tinggi, data BNPB (2011) menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis masuk ke dalam 3 besar daerah yang rawan tsunami dan gempa bumi setelah Kota Banda Aceh Provinsi Nangore Aceh Darussalam dan Kabupaten Sikka Provinsi

Nusa Tenggara Timur. Daerah yang merupakan rawan tsunami dan gempa bumi berdasarkan dokumen RPBD Kabupaten Ciamis adalah terdapat di 6 Kecamatan yang pada saat ini masuk kedalam wilayah Kabupaten Pangandaran, yaitu Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, dan Kalipucang.

Bencana tsunami dan gempa bumi di Kabupaten Ciamis yang dapat terdeteksi berdasarkan dokumen RPBD Kabupaten Ciamis adalah sejak tahun 1840, meskipun pusatnya terjadi di Yogyakarta hingga daerah Trenggalek tetapi tercatat juga bahwa daerah Ciamis khususnya wilayah Pangandaran terkena dampak dari bencana tsunami dan gempa bumi tersebut, namun korban dari peristiwa tidak terdapat datanya. Bencana gempa bumi dan tsunami dengan pusat di sebelah selatan laut Pangandaran yang tercatat adalah sejak tahun 1921, kemudian pola tersebut berulang kembali pada tahun 1977, 1994, dan kemudian terakhir pada tahun 2006.

Tabel 3.1. Bencana Tsunami di Pangandaran

No	Tahun	Wilayah Terjadinya Tsunami	Korban
1	1840	Yogyakarta, Trenggalek	Tidak ada data
2	1859	Yogyakarta, Trenggalek	Tidak ada data
3	1921	Ciamis, Tasikmalaya, Yogyakarta	Tidak ada data
4	1977	Ciamis, Tasikmalaya, Yogyakarta	± 200 jiwa
5	1994	Ciamis, Tasikmalaya, Yogyakarta	± 200 jiwa
6	2006	Ciamis, Tasikmalaya, Yogyakarta	Meninggal 405 jiwa, luka-luka 274 jiwa, hilang 27 jiwa, mengungsi 13.198 jiwa

Sumber : RPBD Kabupaten Ciamis 2012 – 2016

Penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah dengan membentuk BPBD Kabupaten Ciamis melalui Perda No. 3 Tahun 2010 tentang BPBD Kabupaten Ciamis. Dengan terjadinya pemekaran daerah di pesisir selatan ciamis menjadi Kabupaten Pangandaran, pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Ciamis dalam penanggulangan bencana di wilayah Pangandaran masih menjadi tanggung jawab BPBD Kabupaten Ciamis, sesuai

dengan RPBD Kabupaten Ciamis 2012 – 2016, yaitu dilaksanakan hingga tahun 2016. BPBD Kabupaten Ciamis juga telah memiliki kantor sebagai operasional kegiatannya, tampak depan kantor tersebut dapat dilihat pada gambar 3.3. di bawah ini.



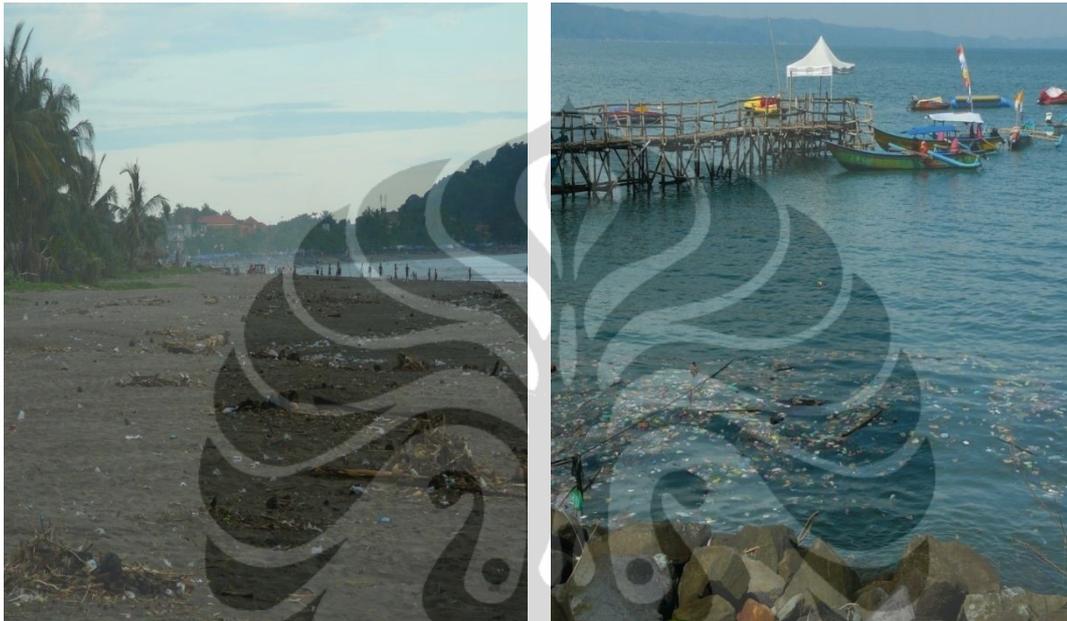
Gambar 3.3. Kantor BPBD Kabupaten Ciamis

Sumber : Pengamatan lapangan

Pangandaran selain dikenal karena rawan tsunami dan gempa bumi, sudah sejak lama merupakan daerah tujuan wisata pantai yang sangat diminati di daerah Jawa Barat. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2013, jumlah kunjungan wisata ke Pangandaran sepanjang tahun 2012 mencapai 1.584.422 orang.

Sebagai daerah primadona wisata pantai di daerah Jawa Barat ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis menyebutkan bahwa terdapat berbagai kegiatan rutin wisata seperti Festival Layang-layang Pangandaran, Hajat Laut, Pemilihan Putra-Putri Pariwisata. Fasilitas yang tersedia sangat beragam, yaitu olahraga air seperti jetski, banana boat, memancing, berperahu, dan juga tersedia hotel dengan tarif

bervariasi. Berdasarkan data dari buku petunjuk pariwisata Kabupaten Ciamis, daftar Hotel yang ada di Pangandaran mencapai lebih dari 100 buah. Sebagai daerah pariwisata pantai, terkadang aspek kebersihan pantai masih kurang diperhatikan, seperti tampak pada gambar 3.4.a. dan 3.4.b. di bawah ini.



Gambar 3.4.a Kondisi Pantai Barat

Gambar 3.4.b Kondisi Pantai Timur

Gambar 3.4. Kondisi Pantai Barat dan Pantai Timur di Pangandaran

Sumber : Pengamatan lapangan

### 3.2. Desa Tangguh Bencana

Berdasarkan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/kelurahan Tangguh bencana, yang dimaksud Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

Desa/kelurahan tangguh bencana dimulai pada tahun 2011 dan dilaksanakan di 33 Provinsi. Pada tahun 2011 kegiatan desa/kelurahan tangguh bencana masih belum memiliki dasar Perka BNPB, sehingga kegiatan tersebut masih tercakup ke dalam 3 besaran kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi PRB
2. Desa/Kelurahan tangguh bencana
3. Gladi dan renkon

Pengembangan dan penyempurnaan dilakukan pada tahun 2012, desa/kelurahan tangguh bencana dilaksanakan di 21 Provinsi dengan tema daerah yang terkena dampak tsunami. (PT, 22 Maret 2013)

Desa yang menjadi sasaran adalah harus yang sudah pernah dibina dari berbagai organisasi non pemerintah atau Kementerian/Lembaga Pemerintah, sehingga langkah BNPB dalam program desa/kelurahan tangguh bencana adalah meningkatkan penguatan kapasitas desa tersebut dalam pengurangan resiko bencana (Majalah Gema BNPB, Mei 2012).

Pada tahun 2012, BNPB melaksanakan program desa/kelurahan tangguh bencana di 21 provinsi, kemudian satu provinsi yaitu Bengkulu tidak dapat melaksanakan program tersebut dan mengembalikan dana fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana ke BNPB, sehingga pada tahun 2012 pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana diadakan di 20 Provinsi.

Indikator Program Desa/Kelurahan tangguh bencana tersebut berdasarkan Juknis tahun 2012 adalah:

1. Peta ancaman bencana
2. Peta dan analisis kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana
3. Peta dan analisis kapasitas dan potensi sumber daya
4. Draf Rencana Penanggulangan Bencana
5. Draf Rencana Aksi Komunitas
6. Relawan Penanggulangan Bencana (termasuk forum PRB)
7. Sistem Peringatan Dini berbasis masyarakat

8. Rencana kontijensi (termasuk evakuasi)
9. Pola Ketahanan Ekonomi

Untuk pendanaan fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana pada tahun 2012 berasal dari APBN dengan total anggaran Rp. 6.366.347.400,- dana tersebut adalah melalui dana penguatan kelembagaan BNPB.

Tabel 3.2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2012

No	Provinsi	Alokasi Dana
1	NAD	303.996.400
2	Sumatera Utara	307.095.000
3	Sumatera Barat	296.015.000
4	Bengkulu	297.415.000
5	Lampung	293.265.000
6	Banten	296.805.000
7	Jawa Barat	298.785.000
8	Jawa Tengah	294.785.000
9	Jawa Timur	301.515.000
10	DIY	296.525.000
11	Bali	305.911.000
12	NTB	301.685.000
13	NTT	304.855.000
14	Sulawesi Utara	302.315.000
15	Sulawesi Barat	304.465.000
16	Sulawesi Tengah	299.855.000
17	Gorontalo	300.985.000
18	Maluku	308.485.000
19	Maluku Utara	310.140.000
20	Papua	320.315.000
21	Papua Barat	321.135.000
	<b>Jumlah</b>	<b>6.366.347.400</b>

Sumber : Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB (2012)

Program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012, secara umum telah dibuat kebijakan BNPB tentang pedoman desa/kelurahan tangguh bencana yang ditandatangani pada Januari tahun 2012, dalam pelaksanaannya kemudian dibuat Petunjuk Teknis (Juknis) yang

dibuat oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB pada Maret 2012, Juknis tersebut disosialisasikan untuk digunakan dalam pelaksanaan fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2012.

Berdasarkan Juknis, tujuan program pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana adalah:

1. Mendorong terwujudnya masyarakat Desa/Kelurahan Tangguh dalam menghadapi Bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
2. Mendorong sinergi untuk saling melengkapi dengan seluruh program yang ada di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, termasuk sektor swasta.

Berdasarkan data Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB (2012) alokasi dana untuk Provinsi Jawa Barat adalah Rp. 298.785.000. Dana tersebut dibagi ke dalam 4 alokasi yaitu:

1. Belanja bahan sebesar Rp. 50.200.000,- yang terdiri dari ATK, spanduk, penggandaan bahan, seminar kit dan atribut peserta.
2. Belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp. 144.360.000,- yang terdiri dari paket pertemuan di Kabupaten, uang saku peserta, transport peserta, konsumsi dan snack dan uang transport peserta pertemuan di desa.
3. Belanja jasa profesi sebesar Rp. 72.000.000,- yang terdiri dari honor fasilitator provinsi, kabupaten dan fasilitator dari LSM/NGO/Perguruan Tinggi.
4. Belanja perjalanan lainnya sebesar Rp. 32.225.000,- yang terdiri dari konsultasi ke Pusat (Tiket, Uang harian dan Penginapan), transportasi dari provinsi ke desa, transportasi dari kabupaten ke desa dan penginapan di desa bagi fasilitator.

Pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana di Jawa Barat pada tahun 2012 dilaksanakan di Kabupaten Ciamis, yaitu di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung. Dua desa tersebut merupakan daerah yang terkena dampak langsung

tsunami pada tahun 2006. Dua desa tersebut juga telah mendapatkan dampingan dari program Rekompak-JRF dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

Utamanya adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui BPBD Kabupaten Ciamis telah memiliki dokumen PRB, yaitu RPBD Kabupaten Ciamis tahun 2012 – 2016, dan RAD PRB Kabupaten Ciamis tahun 2012- 2014, sehingga melalui dokumen-dokumen tersebut mendapatkan prioritas untuk difasilitasi program desa/kelurahan tangguh bencana oleh BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.3. Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Barat

No	Tahun	Kota/Kabupaten	Tema	Keterangan
1	2011	Bandung Barat	-	Dilaksanakan sebelum Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
2	2012	Ciamis	Tsunami	Dilaksanakan setelah terbit Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, yaitu di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis. Dilengkapi dengan Juknis fasilitasi pemberdayaan masyarakat menuju desa/kelurahan tangguh bencana 2012.
3	2013	Pangandaran	<i>Multi Hazard</i>	Dalam proses pelaksanaan. Dilengkapi dengan Juknis fasilitasi pemberdayaan masyarakat menuju desa/kelurahan tangguh bencana 2013. Lokasi pelaksanaan di Kecamatan Cimerak yaitu di Desa Legok Jawa dan Desa Cimaranti.

Sumber: diolah dari hasil wawancara

Program desa/kelurahan tangguh bencana yang diselenggarakan oleh BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Kabupaten Ciamis ini memiliki 3 kriteria, berdasarkan Perka BNPB No 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan tangguh bencana adalah:

1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, Tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam program ini. Tingkat ini dicirikan dengan:
  - a. Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan
  - b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes
  - c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/ kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.
  - d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya
  - e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatankegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan
  - f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana
  
2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya. Tingkat ini adalah tingkat menengah yang dicirikan dengan:
  - a. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan
  - b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa
  - c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif
  - d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi

para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif

3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama. Tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan:
  - a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan
  - b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB
  - c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat
  - d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan
  - e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan
  - f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

### 3.3. Program Rekompak-JRF

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman berbasis masyarakat (Rekompak-JRF) adalah nama program pembangunan kembali pemukiman pasca gempa bumi yang awalnya hanya di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Ketika terjadi tsunami pada tanggal 17 Juli 2006 di kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, program bantuan Rekompak-JRF dimulai pada tahun 2008 di kawasan Pangandaran dan sekitarnya dan berakhir pada tahun 2012 (Rekompak-JRF, 2012 hal. 7). Program Rekompak-JRF ini melaksanakan 643 kegiatan dengan menyerap Bantuan Dana Lingkungan (BDL) sekitar 25 Milyar (“Wakil Bupati Ciamis,” 2011).

Program Rekompak-JRF mempunyai sumber dana yang bersifat hibah dari *Java Reconstruction Fund* (JRF) dan lembaga pelaksana adalah Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan *Grant Agreement* antara

Pemerintah Indonesia dengan JRF yang ditandatangani pada 6 Februari 2007 dengan No. TF090014-IND (Rekompak-JRF, 2012 hal. 7).

Dalam kegiatannya di Kabupaten Ciamis, Kompak-JRF dalam teknis pelaksanaan dilakukan oleh DMC Pangandaran mendampingi 17 desa di kawasan pesisir pantai pangandaran dan sekitarnya yang terkena dampak langsung bencana Tsunami pada 17 Juli 2006 yang lalu. Seiring waktu dan respon positif dari berbagai kalangan dan juga permintaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemerintah Daerah Ciamis, Kompak-JRF menambah desa binaan sebanyak 12 desa lagi namun dengan ancaman bencana yang berbeda yaitu bencana gempa bumi dan banjir. Untuk membedakan dari ancaman bencana dan juga waktu dampingan, 17 desa yang pertama dinamakan Desa Reguler dengan ancaman prioritas bencana tsunami dan 12 desa yang kedua dengan ancaman prioritas bencana gempa bumi dan banjir dinamakan Desa Replikasi. Desa-desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan (Rekompak-JRF, 2012 hal. 8).

Tabel 3.4. Desa dampingan dari Program Kompak-JRF

Desa Reguler

Desa Replikasi

No	Kecamatan	Desa
1	Cimerak	Kertamukti
2	Cimerak	Legok jawa
3	Cimerak	Ciparanti
4	Cimerak	Masawah
5	Cijulang	Batukaras
6	Parigi	Cibenda
7	Parigi	Karang Jaladri
8	Parigi	Sukaresik
9	Parigi	Ciliang
10	Parigi	Cikembulan
11	Pangandaran	Wonoharjo
12	Pangandaran	Babakan
13	Pangandaran	Putra Pinggan
14	Pangandaran	Pangandaran
15	Pangandaran	Pananjung

No	Kecamatan	Desa
1	Cijulang	Cijulang
2	Cijulang	Kondangjajar
3	Cijulang	Margacinta
4	Cijulang	Kertayasa
5	Sidamulih	Pajaten
6	Sidamulih	Cikalong
7	Pangandaran	Sidomulyo
8	Kalipucang	Ciparakan
9	Kalipucang	Kalipucang
10	Kalipucang	Cibuluh
11	Kalipucang	Banjarharja
12	Kalipucang	Tunggilis

(Sambungan)

16	Kalipucang	Pamotan
17	Kalipucang	Bagolo

Sumber : Rekompak-JRF Pangandaran (2012)

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program Rekompak-JRF antara lain adalah: Penataan pemukiman pasca bencana tsunami, pembangunan infrastruktur yang berfungsi untuk mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana tsunami, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan Organisasi Pengurangan Resiko Bencana (OPRB).



Gambar 3.5. Relawan OPRB (Organisasi Pengurangan Resiko Bencana)

Sumber : Koleksi Foto Milik SA

Sebagai salah satu tujuan dari program Rekompak-JRF dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana adalah mendorong atau inisiasi kegiatan perencanaan penanggulangan desa seperti pembentukan OPRB desa, walaupun belum menjadi suatu organisasi yang utuh, dengan harapan bahwa masyarakat dibantu oleh pihak terkait dapat membangun organisasi dengan baik dan dapat melanjutkan apa yang sudah dijalankan dalam upaya pengurangan resiko bencana (Rekompak-JRF, 2012 hal 28).

Tabel 3.5. Daftar OPRB di Desa yang telah membentuk OPRB

No	Kecamatan	Desa	Mulai Sosialisasi	Selesai Sosialisasi	Terbentuk OPRB (tanggal)	Pelatihan PRB (tanggal)
1	Cimerak	Kertamukti	6/10/2010	10/2/2011	22/1/2011	22-23/1/2011
2	Cimerak	Legok Jawa	6/10/2010	12/2/2011	23/1/2011	22-23/1/2011
3	Cimerak	Ciparanti	6/10/2010	15/2/2011	28/1/2011	28-29/1/2011
4	Cimerak	Masawah	6/10/2010	10/2/2011	29/1/2011	28-29/1/2011
5	Cijulang	Batukaras	6/10/2010	14/2/2011	8/1/2011	7-8/1/2011
6	Parigi	Cibenda	10/12/2010	25/2/2011	18/1/2011	18-19/1/2011
7	Parigi	Karang Jaladri	10/12/2010	25/2/2011	18/1/2011	18-19/1/2011
8	Parigi	Sukaresik	4/12/2010	19/2/2011	6/2/2011	5-6/2/2011
9	Parigi	Ciliang	28/9/2010	15/3/2011	18/3/2011	17-18/3/2011
10	Parigi	Cikembulan	27/9/2010	15/3/2011	18/3/2011	17-18/3/2011
11	Pangandaran	Wonoharjo	4/12/2010	3/2/2011	6/2/2011	5-6/2/2011
12	Pangandaran	Babakan	1/9/2010	26/2/2011	4/3/2011	3-4/3/2011
13	Pangandaran	Putra Pinggan	15/12/2010	26/2/2011	4/3/2011	3-4/3/2011
14	Pangandaran	Pangandaran	15/12/2010	8/3/2011	11/3/2011	10-11/3/2011
15	Pangandaran	Pananjung	15/12/2010	8/3/2011	11/3/2011	10-11/3/2011

(Sambungan)

	ran					/3/2011
16	Kalipucang	Pamotan	25/08/2010	20/1/2011	22/1/2011	21-22 /1/2011
17	Kalipucang	Bagolo	24/08/2010	2/3/2011	5/3/2011	4-5 /3/2011

Sumber : Rekompak-JRF Pangandaran (2012)

Program Rekompak-JRF yang dilakukan melalui sistem pemberdayaan masyarakat telah membantu masyarakat membangun kembali lingkungannya. Berbagai infrastruktur penting yang berfungsi untuk mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana antara lain:

1. Jalan evakuasi apabila terjadi bencana yang tersebar di 17 desa reguler,
2. Jalur menuju bukit evakuasi sehingga mempermudah akses masyarakat menuju tempat yang lebih tinggi apabila terjadi tsunami,
3. Jembatan yang berfungsi untuk menghubungkan jalur evakuasi masyarakat yang terkendala oleh aliran sungai, dibangun di 4 desa,
4. Rambu tsunami sebagai petunjuk arah menuju jalur evakuasi tsunami, terdapat 4 jenis rambu tsunami di 17 desa di kawasan Pangandaran, total rambu tsunami tersebut berjumlah 427,
5. Dilakukan juga pembangunan infrastruktur untuk bencana banjir di 29 desa, yaitu talud, pintu air, drainase, normalisasi sungai, jalan, dan gorong-gorong,
6. Selain pembangunan infrastruktur dalam upaya pengurangan resiko bencana, dilakukan juga pembangunan infrastruktur perbaikan kualitas lingkungan seperti saluran air bersih, MCK, tempat penampungan sementara sistem persampahan dan drainase lingkungan (Rekompak-JRF, 2012).

Salah satu hal yang dapat diamati dengan mudah adalah rambu-rambu tsunami yang menyebar di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung, kondisi rambu-rambu tsunami tersebut masih sangat baik dan terawat. Sehingga informasi yang

disampaikan melalui rambu-rambu tersebut dapat dengan mudah dibaca oleh masyarakat Pangandaran dan juga wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran.



Gambar 3.6. Rambu-rambu Tsunami

Sumber : Pengamatan lapangan

### 3.4. Desa Pananjung

Desa Pananjung memiliki luas 471,13 ha. meliputi 3 Dusun, 6 RW dan 39 RT. Secara umum kondisinya di dataran rendah dengan kondisi datar dan landai dari arah pantai dan bergelombang di ujung utara. dengan ketinggian 0 – 7 m dpl. Batas Desa Pananjung sebelah utara adalah Desa Purbahayu, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia, sebelah timur adalah Desa Pangandaran, sebelah barat adalah Desa Wonoharjo.

Kantor Desa Pananjung letaknya bersebelahan dengan kantor Kecamatan Pangandaran, sehingga jarak dari Desa Pananjung ke Kecamatan Pangandaran adalah 0,05 km, ke Ibukota Kabupaten 90 km, ke ibukota Provinsi 230 km, dan ke ibukota negara 380 km. Kondisi kantor desa tersebut tampaok rapi, terdapat sebuah ambulan desa, dan juga memiliki pekarangan yang luas, jika terjadi

bencana kantor desa ini juga dapat dijadikan tempat evakuasi sementara, karena juga memang di depan kantor desa ini juga merupakan lapangan yang dijadikan tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana.



Gambar 3.7. Kantor Desa Pananjung

Sumber : Pengamatan lapangan

Jumlah penduduk Desa Pananjung pada tahun 2012 adalah 8.283 jiwa, terdiri dari 4.170 laki-laki, dan 4.113 perempuan.

Tabel 3.6. Keadaan Penduduk Desa Pananjung

No	Dusun	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	Karang Salam	1490	1504	2994
2	Karang Sari	1340	1391	2731
3	Bojong Jati	1340	1218	2558
<b>Jumlah</b>		<b>4170</b>	<b>4113</b>	<b>8283</b>

Sumber : Desa Pananjung 2012

Sumber pendapatan ekonomi atau mata pencaharian penduduk Desa Pananjung di dominasi oleh Petani, Pedagang dan Peternak. Berikut tabel mata pencaharian:

Tabel 3.7. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pananjung

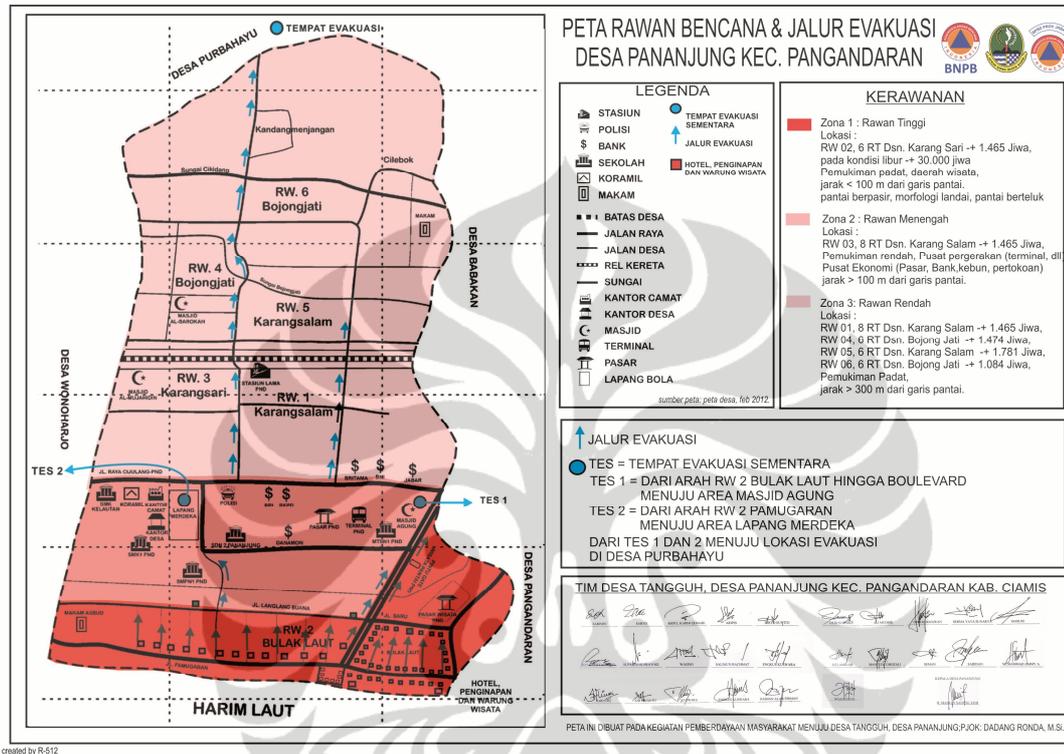
No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.167
2	Nelayan	389
3	Pengusaha Sedang / Besar	78
4	Pengrajin / Industri Kecil	36
5	Buruh Industri	85
6	Buruh Bangunan	154
7	Buruh Perkebunan (besar/kecil)	72
8	Pedagang	544
9	Pengangkutan	13
10	PNS	49
11	TNI	5
12	Pensiunan (PNS/TNI)	38
13	Peternak	492

Sumber : Desa Pananjung 2012

Data mengenai kebencanaan di Desa Pananjung berdasarkan data dari RPBD Kabupaten Ciamis 2012-2016, Desa Pananjung merupakan daerah rawan bencana tsunami dengan kategori ancaman tsunami tinggi, sehingga masuk ke dalam zona bahaya tsunami I.

Berdasarkan data pemetaan di Desa Pananjung terdapat 3 kategori rawan bencana, yaitu zona 1 yang memiliki rawan tinggi terhadap bencana terdapat di Dusun Karang Sari. Daerah tersebut merupakan pemukiman padat dan daerah wisata dimana ketika kondisi libur mencapai  $\pm$  30.000 jiwa. Berikutnya adalah zona 2 yang memiliki rawan menengah terhadap bencana yaitu terdapat di dusun Karang Salam, jarak dari garis pantai adalah  $>$  100 m, daerah tersebut merupakan pemukiman, terminal, pusat kegiatan ekonomi seperti pasar, bank, perkebunan,

dan pertokoan. Berikutnya adalah zona 3 yang memiliki rawan rendah terhadap bencana yaitu terdapat di Dusun Karang salam dan Dusun Bojong Jati, jarak dari garis pantai adalah  $> 300$  m, daerah tersebut merupakan pemukiman padat.



Gambar 3.8 Peta Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi Desa Pananjung

Sumber : Dokumentasi Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Ciamis

### 3.5. Desa Pangandaran

Desa Pangandaran merupakan desa pemekaran dari Desa Pananjung berdasarkan SK Bupati Ciamis Nomor : 06/PM.024.1.022/SK/1983 tanggal 28 Februari 1983. Luas wilayah Desa Pangandaran 667, 87 Ha, yang terdiri dari pemukiman 137,87 Ha, dan Pegunungan/CagarAlam/TWA 530 Ha. Batas wilayah Desa Pangandaran sebelah utara adalah Desa Babakan, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia, sebelah timur adalah Desa Pananjung, dan sebelah barat adalah Samudera Indonesia.



Gambar 3.9. Batas Desa Pangandaran dan Desa Pananjung

Sumber: Pengamatan lapangan

Jarak dari Desa Pangandaran ke Kecamatan Pangandaran adalah sekitar 0,5 Km, ke ibukota kabupaten adalah 90 Km, ke ibukota Provinsi adalah 230 Km, dan ke ibukota negara adalah 380 Km. Kantor Desa Pangandaran terletak tidak jauh dari gerbang tol Pangandaran, jarak kantor tersebut ke laut agak jauh, dari pengamatan yang dilakukan terlihat bahwa kantor desa tersebut dalam tahap pembangunan lantai 2, kegiatan di lantai 1 tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kantor Desa Pangandaran terlihat memiliki lahan yang kurang luas, sehingga upaya yang dilakukan adalah membangun 2 lantai.



Gambar 3.10. Kantor Desa Pangandaran

Sumber : Pengamatan lapangan

Jumlah penduduk di Desa Pangandaran pada akhir tahun 2010 adalah 9756 jiwa, terdiri dari 4901 laki-laki, serta 4855 perempuan.

Tabel 3.8. Keadaan Penduduk Desa Pangandaran

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			L	P	Jumlah
1	Pangandaran Barat	940	1.512	1.497	3.009
2	Pangandaran Timur	763	1.354	1.339	2.693
3	Parapat	1.367	2.034	2.019	4.054
<b>Jumlah</b>		<b>3.070</b>	<b>4.901</b>	<b>4.855</b>	<b>9.756</b>

Sumber : Desa Pangandaran 2011

Mata pencaharian penduduk di Desa Pangandaran terbanyak bekerja sebagai buruh nelayan, wiraswasta, dan PNS.

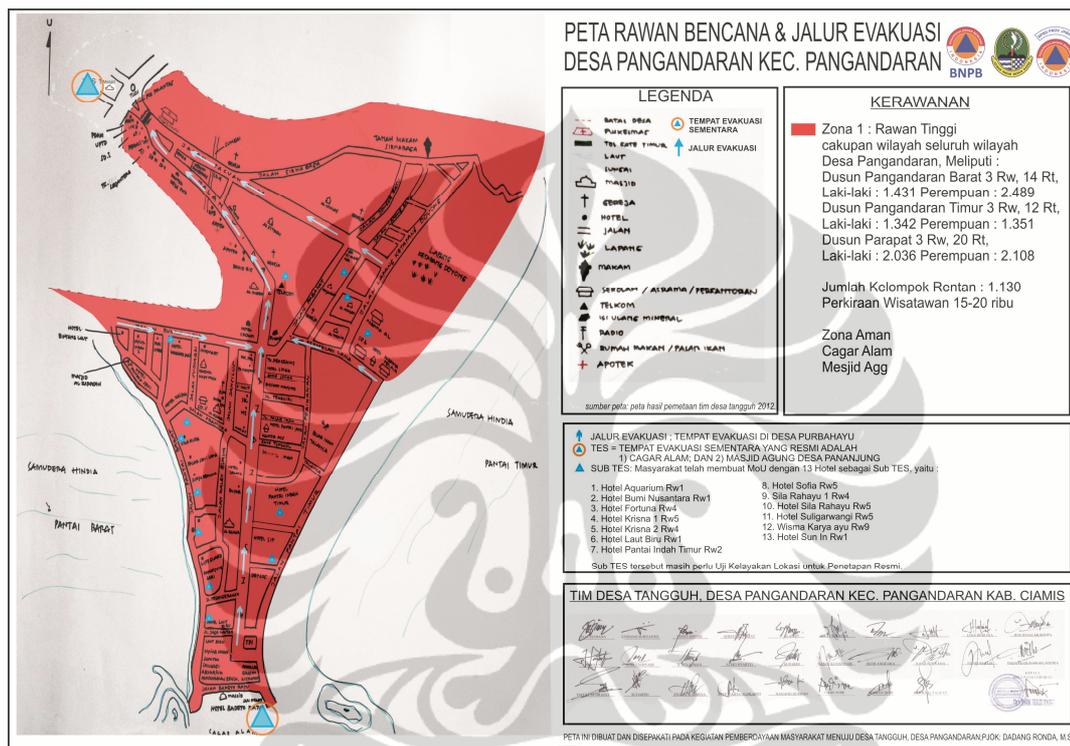
Tabel 3.9. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pangandaran

No	Status/Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Perangkat Desa	11
2	PNS	769
3	ABRI/POLRI	21
4	Bidan	3
5	Pedagang	91
6	Pensiunan	50
7	Pegawai swasta	250
8	Wiraswasta	1.103
9	Jasa angkutan roda	15
10	Nelayan	643
11	Buruh nelayan	1.141
12	Petani	123
13	Buruh tani	192
14	Pelaku jasa/keterampilan/tukang	68
	<b>Jumlah</b>	<b>4.480</b>

Sumber : Desa Pangandaran 2012

Data kebencanaan di Desa Pangandaran berdasarkan data dari RPBD Kabupaten Ciamis 2012-2016, Desa Pangandaran merupakan daerah rawan bencana tsunami dengan kategori ancaman tsunami rendah, sehingga masuk ke dalam zona bahaya tsunami II. Data ini sepertinya perlu ditinjau kembali, karena pada kenyataannya di Desa Pangandaran merupakan daerah zona merah, dengan kategori bahaya yang tinggi.

Berdasarkan data hasil pemetaan yang dilakukan dalam kegiatan fasilitasi desa tangguh bencana di Desa Pangandaran pada Gambar 3.11. daerah rawan bencana di desa pangandaran berada di zona 1 yaitu memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana tsunami dan gempa bumi.



Gambar 3.11. Peta Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi Desa Pangandaran

Sumber : Dokumentasi Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Ciamis

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Pemerintah**

##### 4.1.1 Kebijakan Desa Tangguh Bencana

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Jawa Barat pada tahun 2012 melaksanakan program desa tangguh bencana, yang merupakan *pilot project* dari BNPB di Kabupaten Ciamis, yaitu tepatnya di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran. Pada saat kegiatan tersebut berlangsung, kondisi pemerintahan di daerah Pangandaran berada pada kondisi transisi sebagai daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Pangandaran, dengan adanya UU Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Meski demikian, BPBD Kabupaten Ciamis masih ikut serta dan menjadi bagian penting dalam memfasilitasi kegiatan desa tangguh bencana di dua desa yang telah menjadi sasaran program tersebut.

Tujuan dari desa tangguh bencana tersebut adalah mensubsidi program ke daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Upaya tersebut dilakukan karena pemerintah daerah rata-rata mengalokasikan dana yang sedikit dalam kegiatan pencegahan bencana di setiap BPBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tujuan besarnya adalah untuk menguatkan kapasitas di daerah (provinsi, kota dan kabupaten), karena biasanya Provinsi/Kab/Kota mendapat dana yang kecil di bagian pencegahan. Karena itu, kegiatan yang sudah dilakukan selama 3 tahun ini berasal dari alokasi APBN lebih pada kegiatan pencegahan. (PT, 22 Maret 2013)

Kalau untuk desa tangguh, pertama kami di daerah kan belum ada kemampuan, masih disubsidi program, itupun kan baru programnya dari pencegahan dan kesiapsiagaan, direktorat yah, dari direktorat pencegahan dan kesiapsiagaan, dari BNPB. Provinsi juga masih bantu, itu pun melalui

provinsi, jadi melalui provinsi itu hirarkis pemerintahan. (AT, 2 April 2013)

#### 4.1.2. Model Fasilitasi Desa Tangguh Bencana

Pemilihan lokasi program dilakukan berdasarkan data dan laporan dari Kabupaten, kemudian penetapan lokasi sasaran program berasal dari Provinsi, disini BNPB tidak mencampuri dan mengusulkan harus dilaksanakan di desa/kelurahan mana. BPBD Provinsi Jawa Barat kemudian menetapkan lokasi program di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung.

Ini merupakan program nasional. Penentuannya dari pusat berdasarkan kejadian dan laporan dari daerah. Seperti ini misalnya, katakanlah BPBD Provinsi atau nasional sudah mengetahui bahwa telah terjadi bencana tsunami, kemudian NGO-NGO yang masuk nasional sudah mengetahui, berarti ini untuk di Jawa Barat *pilot project*, katakanlah Ciamis udah memenuhi syarat. (HY, 26 Maret 2013)

Walaupun kami yang mengusulkan tapi tetap harus melalui *leading* sektor Provinsi, jadi untuk saat ini desa tangguh itu baru programnya melalui BNPB, itu ada Perkanya No 2 kalo enggak salah tahun 2012. (AT, 2 April 2013)

Desa Pangandaran dan Desa Pananjung yang pada tahun 2006 lalu terkena dampak langsung tsunami telah mendapatkan pendampingan program kebencanaan baik itu dari NGO maupun Pemerintah. Oleh karena itu, melalui BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Ciamis, bertujuan melanjutkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung.

Desa yang menjadi sasaran adalah harus yang sudah pernah dibina dari berbagai organisasi atau K/L, sehingga langkah BNPB adalah meningkatkan penguatan desa tersebut. Untuk di Jawa Barat pada tahun 2012 dilaksanakan di Kabupaten Ciamis yaitu di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung. (PT, 22 Maret 2013)

Pertemuan di Kabupaten/Kota merupakan kegiatan penting dan bagian dari fasilitasi desa tangguh bencana sebelum dilaksanakan di desa/kelurahan yang menjadi sasaran program.

Pelaksanaan desa tangguh terdapat dua besaran pertemuan, yaitu Pertemuan kesatu dilaksanakan di Kabupaten, diikuti oleh Provinsi dan Kabupaten, dan serta perwakilan dari dua desa/kelurahan. Pertemuan kedua dilaksanakan di desa/kelurahan. (PT, 22 Maret 2013)

Berdasarkan dari hasil wawancara narasumber, tidak terdapat kegiatan pertemuan di Kabupaten Ciamis yang secara khusus membahas desa tangguh yang akan dilaksanakan di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung. Kegiatan tersebut langsung diadakan di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran.

Tidak ada kegiatan persiapan di Kabupaten Ciamis, dari Provinsi langsung fokus di lokasi Desa Pangandaran dan Desa Pananjung. (HY, 26 Maret 2013)

Dari beberapa narasumber yang telah diwawancara tidak dapat menunjukkan tanggal dan bulan yang pasti kapan dilaksanakannya fasilitasi Desa Tangguh Bencana tersebut. Pada pelaksanaannya pertama dilakukan di Desa Pananjung, kemudian berikutnya dilaksanakan di Desa Pangandaran.

Pertemuan di desa tersebut dilakukan selama 5 kali dalam 3 hari, jadi dilakukan di tiap desa sebanyak 5 kali, masing-masing pertemuan 3 hari. Dengan capaian target di Bulan Desember harus sudah selesai. (PT, 22 Maret 2013)

Pada program desa tangguh bencana, pemerintah daerah baik itu Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai fasilitator. Fasilitator kebanyakan berasal dari BPBD Provinsi Jawa Barat, sedangkan dari BPBD Kabupaten Ciamis satu orang yaitu Kepala Seksi Pencegahan Agus Taryana, dan dari PMI.

#### 4.1.3 Output Fasilitasi Desa Tangguh Bencana

BNPB memiliki alasan sendiri mengapa di dalam Juknis tahun 2012 adalah untuk mencapai 9 indikator. Pencapaian Indikator di Jawa Barat yaitu di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung yang sampai laporannya ke BNPB adalah tercapainya 7 indikator desa tangguh bencana yang telah diatur melalui Juknis tahun 2012.

Di dalam pertemuan itu untuk mendapatkan 9 indikator, untuk tahun 2012 desa tangguh yang sudah ada Perka BNPB, karena Perka BNPB tersebut masih baru sehingga Provinsi boleh dari 9 indikator tersebut minimal terdapat 7 indikator, di Jawa Barat telah mencapai 7 indikator. (PT, 22 Maret 2013)

Sementara itu, dari pihak BPBD Kabupaten Ciamis merasa bahwa 9 indikator tersebut telah dilaksanakan dan disampaikan sehingga 9 indikator tersebut telah terpenuhi.

Jadi ada 9 indikator yang harus dipenuhi atau minimalnya 5 indikator, itu jadi kriteria-kriteria tersebut sudah masuk kepada desa tangguh itulah nanti. Alhamdulillah 9 indikator tadi terpenuhi. Nah membentuk dokumen, alhamdulillah itu, desa tangguh tersebut udah punya peta kemana harus evakuasi, kemana harus mengungsi, bilamana terjadi bencana sudah mampu gimana harus menanggulangi. FKDM ini juga bagian daripada tadi, karena dia dilatih untuk desa tangguh, pesertanya juga membentuk Forum Kesiapan Dini Masyarakat, terletak di dalam desa tersebut, bagian satu organisasi kebencanaan di desa itu. (AT, 2 April 2012)

Desa tangguh sendiri sebetulnya harus telah difasilitasi oleh pemerintah maupun NGO, sehingga BPBD melanjutkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakatnya untuk mencapai tingkatan desa tangguh bencana yang lebih baik.

Kan rata-rata di sini masih baru peraturannya, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Oleh karena itu mengapa daerah pesisir itu kemarin, seperti tadi sudah pernah dipegang oleh NGO-NGO, jadi dasar-dasar

penanganan bencana sudah mengetahui. Jadi dengan adanya program desa tangguh sudah tidak aneh lagi, karena tidak dari nol lagi dan sudah mengetahui dasar-dasarnya. Sosialisasi, kemudian pembentukan FKDM, dan simulasi. Penilaian indikator mungkin termasuk ke dalam sosialisasi, ditanya di desa apakah siap atau tidak, katakanlah indikator-indikator sudah terbentuk, sudah mendengarnya tidak. Kalau belum disesuaikan dengan Juklak tersebut, diikuti juklak tersebut. (HY, 26 Maret 2013)

#### 4.1.4 Upaya Integrasi Ketangguhan Bencana Kedalam Perencanaan dan Kebijakan Desa

Salah satu output dalam fasilitasi desa tangguh bencana adalah adanya dokumen perencanaan dan kebijakan desa, yaitu penanggulangan bencana, rencana aksi komunitas, dan rencana kontijensi. Fasilitasi desa tangguh bencana yang telah dilakukan adalah menyusun draft dari 3 dokumen kebijakan dan perencanaan yang berkaitan dengan desa tangguh bencana tersebut, kemudian selanjutnya adalah dari pihak pemerintah desa yang menjadikan draft tersebut menjadi dokumen perencanaan dan kebijakan yang resmi.

Sebelum kegiatan sosialisasi di desa, belum ada Perdes yang berkaitan bencana, nah didorong untuk memenuhi indikator-indikator tersebut. Setelah kegiatan, Perdesnya waktu kemarin kegiatan sosialisasi mah belum ada. (HY, 26 Maret 2013)

Untuk di Desa Pananjung, draft perencanaan dan kebijakan tersebut telah disyahkan menjadi sebuah Peraturan Desa yaitu melalui Surat Keputusan Kepala Desa Pananjung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis tahun 2012 sampai tahun 2017.

Adapun berkaitan draf-draf setelah terbentuknya kepengurusan FKDM ini tentunya dari Desa Pananjung sudah membentuk surat keputusan itu surat keputusan Kepala Desa Pananjung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran

Kabupaten Ciamis tahun 2012 sampai tahun 2017. Draf-draf ini ada terlampir mungkin dalam buku dokumen ini yang mungkin nanti bisa di *copy* ataupun apa yang dibutuhkan oleh bapak silahkan dengan catatan saya mohon agar bisa dipertanggung jawabkan kemudian. (MG, 30 Mei 2013).

Lain halnya dengan Desa Pangandaran, belum ada sebuah peraturan desa yang berdasarkan dari draft dokumen perencanaan dan kebijakan setelah fasilitasi desa tangguh bencana dilaksanakan di Desa Pangandaran. Akan tetapi, kebijakan yang ada adalah Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor: 360/13.Kpts/Desa/2012 tentang Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran.

Untuk pemerintah itu kan diharapkan bahkan diharuskan membuat suatu kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan desa. Memang ketentuan-ketentuan itu, kebijakan itu belum ditetapkan. Kami nantinya akan berpijak dari sana, kebijakan pemerintah desa yang pertama untuk sekarang kita sudah 3 tahun ini masukkan dalam anggaran, baik kegiatan organisasi maupun membuat dana cadangan untuk penanggulangan kebencanaan. Pengalaman dulu kan ketika terjadi bencana, karena tidak disiapkan dananya. Minimal untuk penanggulangan awal kita udah siapkan dananya. Kita sudah itu kebijakan anggaran. Untuk kepentingan kegiatan organisasi juga ada dana disiapkan untuk apabila terjadi bencana tersebut. (US, 10 Mei 2013)

Selanjutnya di Desa Pangandaran ternyata selain kebijakan yang menjadikan FKDM sebagai sebuah forum yang menjadi bagian dari Desa dan memberikan dana untuk operasional FKDM, juga adanya kebijakan dana untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Kebijakan dana kebencanaan tersebut ternyata sudah mulai dilakukan dan sudah berlangsung selama 3 tahun.

Tabel 4.1 Kebijakan Desa yang terkait dengan Desa Tangguh Bencana

No	Pemerintah Desa	Kebijakan	Tentang
1	Desa Pangandaran	Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor: 360/13.Kpts/Desa/2012	Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat Desa Pangandaran
2	Desa Pananjung	Surat Keputusan Kepala Desa Pananjung Nomor 4 Tahun 2012	Penanggulangan Bencana di Desa Pananjung

Sumber: diolah dari hasil penelitian lapangan

## 4.2. Data dan assesmen resiko

### 4.2.1 Data dan Assesmen Bahaya/Resiko

Sejak terjadinya bencana tsunami di Pangandaran pada 17 Juli tahun 2006, maka adanya upaya dari pemerintah desa untuk mulai menyiapkan data dan assesmen bahaya/resiko yang ada di desanya masing-masing, setiap desa memiliki bahaya/resiko yang berbeda. Sumber dan potensi bencana juga tidak hanya berasal dari wilayah Pangandaran, ketika terjadi juga potensi atau sumber bencana dari luar wilayah pangandaran tetapi dapat juga berdampak terhadap wilayah Pangandaran, maka hal ini juga perlu mendapatkan perhatian. Sehingga upaya di tingkat Kabupaten Ciamis yang dilakukan adalah pengurangan resiko bencana yang terintegrasi ke kebijakan rencana tata ruang dan wilayah.

Kabupaten Ciamis alhamdulillah sudah masuk di dalam pembangunan PRB ini yah. Masuk di dalam RTRW sudah diamankan, jadi tidak semena-mena membuat usulan infrastruktur tanpa ada analisis resiko. Nah apa itu analisis resiko bencana, ya perizinan itu jangan hanya IMB begitu saja, tidak. Apalagi alih fungsi sawah, hutan jadi pasar, sawah jadi bangunan, betul-betul dianalisis atau kajian lingkungan hidupnya, amdalnya, barulah dikeluarkan. Nah berbagai aspek ini jangan ayeuna membuat bangunan menjadikan bencana. (AT, 3 Juni 2013)

Di Desa Pananjung selain bahaya tsunami dapat dilihat salah satu bahaya/resiko yang sering terjadi adalah adanya permasalahan pada saluran air di anak kali Cikidang, hal ini yang kemudian seringkali menimbulkan bencana banjir di Desa Pananjung sehingga perlu adanya normalisasi.

Agenda untuk Forum Kesiapsiagaan di desa ini adalah yang pertama peta rawan bencana dan jalur evakuasi itu sendiri, yang kedua adalah gambaran umum istilahnya profil dan tindakan pada saat terjadinya bencana. Di kita ada saluran atau anak kali, namanya anak kali Cikidang hanya kelemahan di kita ada saluran air tapi tidak ada normalisasinya, itu sudah berkali-kali kita ajukan pak ke tingkat pusat dan provinsi dan menjadi prioritas utama, nah jadi manakala warga kita sudah diberikan pembekalan minimalnya ilmu pengetahuan hanya saja tanpa didukung dengan adanya realisasi visi itu sama saja, akan selalu begitu dan begitu. (MG, 30 Mei 2013)

Desa Pananjung memiliki bahaya/resiko banjir yang datang secara rutin di musim penghujan. Perbaikan saluran air yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengurangi resiko/bahaya banjir yang sering terjadi. Pemerintah desanya sendiri telah menjadikannya prioritas utama untuk ditanggulangi, namun karena keterbatasan dana sehingga masih memerlukan bantuan dari pemerintah untuk merealisasikan perbaikan saluran air untuk mengurangi resiko/bahaya banjir yang rutin terjadi.

Di Desa Pangandaran upaya untuk mengurangi bahaya/resiko tsunami diantaranya dilakukan melalui mitigasi bencana, yaitu adanya pemecah gelombang yang terdapat di pantai timur Pangandaran, rambu-rambu tsunami dan evakuasi yang terdapat hampir di seluruh kawasan pesisir. Bahaya/resiko lainnya yang perlu diperhatikan adalah adanya angin badai yang dapat terjadi di sekitar pantai.

Kalau disini ketinggian gelombangnya tidak begitu tinggi, paling hanya sampe 30 meter. Saya waktu terjadi tsunami kebetulan posisinya ketika itu ada di pasar mambo, perapatan, disini ada jalan tembus dari pantai

barat ke pantai timur, dari pantai itu hanya 150 meter. Di desa pangandaran ini sebagian besar di pinggir-pinggir pantainya itu bangunan-bangunan yang kokoh, sehingga setelah menyentuh bangunan itu air laut kembali lagi. Kemudian di pinggir pantai setelah tsunami itu kan dibangun pengamanan-pengamanan dan pemecah gelombang. (US, 10 Mei 2013)

#### 4.2.2 Data dan Assesmen Kerentanan/Kapasitas

Terdapat berbagai hal dalam data dan assesmen kerentanan/kapasitas yang dilakukan melalui fasilitasi desa tangguh bencana, baik itu desa Pangandaran maupun Desa Pananjung sebetulnya sudah melakukan kegiatan tersebut sebelum pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana, karena memang telah masuk berbagai program pemerintah maupun LSM, seperti Rekompak, ADRA Indonesia, dll.

Karena kapasitas kapabilitas masyarakat baik stakeholder desa belum tahu gimana, makanya peran serta masyarakat diaktifkan. Siapa yang kena korban bencana jadi jangan salah sasaran, harus tepat sasaran. Penguatan kapasitas relawan-relawan di Ciamis itu kan dari PRB tadi untuk menuju desa tangguh. (AT, 3 Juni 2013)

Kegiatan assesmen kerentanan/kapasitas yang difasilitasi dalam mewujudkan desa tangguh bencana bersumber dari data-data yang ada di desa tersebut, sehingga data dan informasi desa yang akurat sangat diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap kerentanan yang ada di desanya.

Kita juga harus menginventarisir data-data, karena langkah yang harus kita lakukan harus sesuai dengan kondisi wilayah, jumlah penduduknya berapa sampai pada usia juga diperhitungkan, evakuasinya nanti itu sesuai dengan potensi kependudukan yang ada. Pengusaha juga siap membantu penanggulangan bencana, salah satunya fasilitas yang mereka miliki silahkan apabila diperlukan, seperti hotel 3 lantai mereka siap dijadikan salah satu tempat evakuasi. Kita hanya sampai survei saja hotel yang

mana yang layak dan siap, kemudian ada petanya, tadinya akan kita lanjutkan dengan perjanjian/MoU dengan mereka pengusaha, belum dilakukan baru proses. (US, 10 Mei 2013)

Adanya kerjasama dengan dunia usaha oleh pemerintah desa merupakan langkah yang sangat baik, sehingga terjalinnya kerjasama tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi daerah Pangandaran yang merupakan daerah pariwisata, dimana dunia usaha yang rata-rata adalah perhotelan sudah menyanggupi untuk ikut andil dalam menjadikan hotel-hotelnya sebagai tempat evakuasi sementara, 13 Hotel untuk dijadikan sebagai sub tempat evakuasi sementara apabila terjadi bencana, yaitu:

1. Hotel Aquarium
2. Hotel Bumi nusantara
3. Hotel Fortuna
4. Hotel Krisna 1
5. Hotel Krisna 2
6. Hotel Laut Biru
7. Hotel Pantai Indah Timur
8. Hotel Sofia
9. Sila Rahayu 1
10. Hotel Sila Rahayu
11. Hotel Suligarwangi
12. Wisma Karya Ayu
13. Hotel Sun In

Dari data pemetaan yang ada, hotel-hotel tersebut sebagai sub tempat evakuasi sementara ternyata masih perlu dilakukan uji kelayakan lokasi untuk penetapan resmi. Dibawah ini merupakan gambar dari hotel-hotel yang diamati, yaitu Hotel Laut Biru dan Hotel Pantai Indah. Pada Hotel Laut Biru, merupakan bangunan berlantai 3 dan hanya terdiri dari satu gedung saja. Hotel Pantai Indah pada gambar ini adalah bagian belakang, hotel tersebut memiliki lahan luas dan ada bangunan 3 lantai serta juga ada bangunan rumah-rumah kecil seperti tampak

di gambar. Hotel-hotel dengan bangunan tinggi dan kokoh tersebut dapat menjadi tempat evakuasi sementara ketika terjadinya bencana.



4.1.a. Hotel Laut Biru

4.1.b. Hotel Pantai Indah Timur

Gambar 4.1 Hotel yang Dijadikan Sub Tempat Evakuasi Sementara di Desa Pangandaran

Sumber : Pengamatan lapangan

Pola perekonomian masyarakat rata-rata sangat bergantung dari wisawatan, di sekitar pantai sangat banyak tenda-tenda dari pedagang yang berjualan dan bangunannya tidak permanen, dan sangat memenuhi daerah pantai sehingga terlihat semerawut, mereka berjualan atau menawarkan jasa pariwisata baik itu di daerah pantai barat maupun di pantai timur. Kondisi ini tentu dapat dikatakan sangat rentan.

Masyarakat pangandaran pada umumnya itu mengandalkan pantai, mengandalkan pantai dalam hal ini mengandalkan libur-liburan sekolah, ataupun libur secara rutin seperti hari sabtu minggu, apalagi libur-libur

nasional yang skala besar, seperti tahun baru, idul fitri ya bapak boleh cek sendirilah itu pasti biasanya pedagang bukannya berkurang tetapi justru bertambah lebih besar. Jadi secara tidak langsung mengurai panorama keindahan pantai karena berdiri disana tenda-tenda biru dan PKL-PKL. Sebetulnya dulu pesisir pantai pangandaran sepanjang wilayah pantai itu banyak pohon-pohon besar, mangrove, ketapang, itu kan lumayan ya, minimalnya ya agak tahan lah terhadap ombak begitu. Kebetulan setelah kita mendapatkan pengetahuan dari BPBD, kita lakukan sosialisasi kepada mereka-mereka yang hotelnya fisiknya baguslah begitu. Kita berupaya kerjasama pak dengan pengusaha, diantaranya Hotel Surya Pesona, Hotel UNI Beach, Hotel Sandaan, banyak pak lah yang jelas hotel-hotel besar yang berada di sekitaran pantai. (MG, 30 Mei 2013)

### **4.3. Pendidikan dan Pengetahuan**

#### **4.3.1 *Publik Awareness*, Pengetahuan, dan Keahlian**

Masyarakat Pangandaran saat ini dapat dengan mudah mengakses informasi sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan mengenai bencana, khususnya yang berkaitan dengan potensi bencana di Pangandaran, seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dll.

Informasi bencana setelah terjadi tsunami pangandaran itu memang banyak sih, media-media yang menginformasikan penanggulangan bencana. Mereka mungkin sudah pada tahu bagaimana cara menghadapi bencana dan kebetulan di kita sudah terjadi bencana itu dan pengalaman mereka sudah punya pengetahuan. Di Pangandaran itu yang perlu diselamatkan itu bukan hanya penduduk pangandaran saja, tapi juga pendatang yang kemungkinan wisatawan itu mereka mungkin dengan tsunami tidak seperti warga kita. Makanya disini cukup diperhatikan oleh pemerintah. (US, 10 Mei 2013)

Karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah Pangandaran, ada benarnya bahwa wisatawan tersebut banyak yang tidak mengetahui cara

menghadapi bencana, sehingga masyarakat Pangandaran yang telah lebih mengetahui perlu terus-menerus meningkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana.

Karena memang secara tidak langsung masyarakat sudah pintar sendiri, dengan kejadian yang pernah terjadi di daerah lain, tidak mungkin masyarakat akan mengasingkan diri, tapi akan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Karena di tempat lain sudah pernah terjadi, seperti halnya di Aceh gitu kan masyarakat pergi ke tempat yang tinggi, jadi karena masyarakat sudah pintar nyarinya ke tempat yang lebih tinggi. Mesjid Agung memang tempatnya lebih tinggi dan Desa Purbahayu datarannya memang lebih tinggi. (MG, 30 Mei 2013)

#### 4.3.2 Manajemen Informasi dan Sharing

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan FKDM kepada masyarakat di desa masing-masing memiliki perbedaan. Upaya yang dilakukan dapat berupa kegiatan resmi ataupun tidak resmi. Kegiatan tidak resmi biasanya penyebaran informasi dilakukan melalui diskusi warung kopi, sedangkan secara resmi dilakukan melalui kegiatan pemerintah desa maupun FKDM.

Berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat sebelum kita menghadapi bencana kita kasih pemahaman dulu bagaimana jika terjadi dan apa yang akan kita lakukan minimalnya ya pada saat terjadi kita tidak panik dan mengutamakan keluarga ataupun nyawa kita sendiri dulu, selanjutnya setelah kita selamat baru kita upayakan bersama-sama menolong dengan masyarakat. (MG, 30 Mei 2013)

Kegiatan penyebaran informasi sedapat mungkin dilakukan secara resmi, substansi yang diberikan biasanya berupa pemahaman kepada masyarakat untuk tidak panik ketika terjadi bencana, dan kemudian setelah dapat menyelamatkan diri barulah berupaya untuk menolong yang lainnya.

Di Desa Pangandaran, selain upaya dalam menyebarkan informasi melalui RT dan RW, dan juga membentuk kader-kader di tingkatan RT, terdapat juga perencanaan untuk memperluas penyebaran informasi kepada perusahaan dan juga pegawai hotel yang ada di Desa Pangandaran.

Itu memang konsep-konsep kita untuk penanggulangan bencana salah satunya adalah membentuk kader-kader di bawah supaya mereka bisa ikut paling tidak menginformasikan tentang bencana terhadap masyarakat luas. Melalui sosialisasi, ini menjadi program FKDM untuk membentuk kader-kader di masing-masing RT, disini ada 45 RT dan 9 RW. Rencana kita selain ke RT-RT, juga FKDM merencanakan untuk adanya pengkaderan di perusahaan-perusahaan. Paling tidak satu hotel atau satu perusahaan ada kader, jadi di setiap perusahaan ada orang yang terlatih sebagai kader penanggulangan bencana. (US, 10 Mei 2013)

Bahkan terdapat kegiatan di Desa Pangandaran yang diselenggarakan oleh OPRB bekerja sama dengan ADRA Indonesia dalam mensosialisasikan hotel siaga bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Desember 2012.

#### 4.3.3 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan desa tangguh bencana pada dasarnya sudah dilakukan sejak tahun 2008 ketika masuknya kegiatan Rekompak di daerah Pangandaran. Fasilitasi desa tangguh bencana merupakan *pilot project* BNPB yang dilaksanakan di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung oleh BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Ciamis, adapun yang direkrutnya adalah orang-orang yang masih sama dengan sebelumnya, di satu sisi terlihat kejenuhan dari salah satu pesertanya.

Kalo kemaren kegiatannya ya itu kegiatan-kegiatan disiplin ala militer, kesalahan sedikit *pushup* dsb. Dilaksanakan 5 hari kalo enggak salah. Lima hari dengan kegiatan hampir subpokoknya itu sama kan relawan, dari Rekompak, PNPM, organisasi UN dsb, banyaklah ke Pangandaran

memberi bekal seperti itu, dan orang yang direkrutnya itu-itu juga, jenuh gitu materina. (DH, 27 Maret 2013)

Desa Pangandaran boleh dikatakan yang paling aktif mengirimkan peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi. Hal ini juga didukung oleh Pemerintah Desa dengan memberikan transport kepada peserta yang mengikuti pendidikan dan latihan di luar kota.

Kegiatan agak sering setelah terbentuknya BPBD, 3 bulan sekali mah ada lah. Kita masukkan dalam anggaran, kita menyiapkan dana untuk kegiatan-kegiatan, seperti sekarang ada pelatihan untuk transport kita kasih, seperti ada pertemuan atau kegiatan-kegiatan. Kegiatan yang diikuti terutama kegiatan yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten maupun Provinsi. (US, 10 Mei 2013)

SA sangat aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar Pangandaran yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang diikutinya antara lain adalah pemuda siaga bencana, dan kemudian pembekalan fasilitator desa tangguh bencana. Keikutsertaannya karena memang Ketua FKDM Desa Pangandaran tidak dapat mengikuti pendidikan dan latihan, sehingga pada awalnya adalah sebagai wakil dari FKDM Desa Pangandaran, dan kemudian dipersiapkan untuk menjadi fasilitator desa tangguh bencana untuk tahun 2013 yang akan dilaksanakan di 2 Desa di Kecamatan Cimerak.

Penyelenggaraan fasilitasi desa tangguh oleh BPBD kalau tidak salah 4 hari. Dari pagi sampai sore, kadang-kadang dipadatkan. Memang ada kesepakatan belajar, ada kontrak belajar, hp silent. Saya nilai baguslah nya. Setelah desa tangguh, ada program pelatihan di Bandung tapi khusus untuk ketua saja, berarti ketua FKDM Desa Pananjung dan Ketua FKDM Desa Pangandaran. Karena tidak ada yang bersedia, akhirnya saya yang berangkat, FKDM Desa Pananjung juga mewakilkan pada saya. Pelatihannya 2 hari di hotel Lingga, dan 3 hari di lapangan ke arah sebelah atasnya situ Cileunca. Datang ke lokasi kondisinya hujan, kemudian disuruh mendirikan tenda maksimal 15 menit, panjang

tendanya 24 meter, lebarnya 6 meter. Tendanya dua buah, terus bikin posko, pendidikan pokoknya mah. Tanggal 8 – 13 April 2013, saya mengikuti pelatihan untuk pembekalan fasilitator desa tangguh bencana yang diadakan di Hotel Gino Feruci Bandung. Nanti agenda fasilitasi desa tangguh akan dilaksanakan di 2 desa di Kecamatan Cimerak. (SA, 11 Mei 2013)

Lain halnya di Desa Pananjung, sepertinya informasi pendidikan dan pelatihan kurang tersosialisasikan kepada anggota FKDM yang lainnya. Mahfudz Ghozali selaku Sekertaris FKDM ternyata belum mendapatkan informasi dan sangat mengharapkan diadakannya lagi pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan desa tangguh bencana.

Sementara ini dari kita melakukan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana dari BPDB Provinsi dan Kabupaten pada saat tahun 2012 sampai saat ini belum ada lagi, sebetulnya kita harapkan, harapannya gini setelah kita dibekali dan di bentuk minimalnya kita akan melangkah apalagi nih selain agenda-agenda rutin yang sudah ada di kita, jadi minimalnya tetep ada dukungan dan motivasi dari badan yang ada setingkatnya lah yang lebih atas harusnya begitu sih jadi istilahnya bukan independenlah begitu. (MG, 30 Mei 2013)

Dari kedua tersebut dapat dilihat bahwa di Desa Pangandaran terdapat pendelegasian dan pemberian informasi mengenai pendidikan dan pelatihan yang dapat dikatakan baik, terbukti bahwa anggota FKDM Desa Pangandaran dapat ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat. Untuk Desa Pananjung rupanya masih kurang dalam memberikan informasi atau mewakilkan anggotanya apabila ada kegiatan pendidikan dan pelatihan, hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antara Sekertaris FKDM dan Ketua FKDM Desa Pananjung masih terdapat informasi yang tidak sampai, khususnya pada kasus pemuda siaga bencana dimana FKDM Desa Pananjung tidak mengirimkan perwakilannya dan malah menitipkannya ke perwakilan dari Desa Pangandaran.

#### 4.3.4 Budaya, Perilaku, Motivasi

Perilaku dan motivasi yang berkembang di masyarakat Pangandaran setelah terjadinya bencana ternyata dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang mereka alami, setelah terjadinya bencana rupanya terjadi pendataan yang kemudian hasil dari pendataan itu tidak langsung dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, sehingga terjadi sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap upaya pendataan yang dilakukan. Pada perkembangannya ternyata setelah ditunggu sekian lama, bantuan dari pemerintah pun akhirnya mulai berdatangan seperti Rekompak, PNPM, dll.

Kan dulu ada rekompak, sebelum ada rekompak dsb, masyarakat udah dicekoki dengan kebohongan kebohongan semua, masyarakat dicatat didata nanti ada ini ada itu orang dari data, yang akhirnya kan males "*lah sina ngararumpul di Desa bohong wungkul!*" (disuruh berkumpul di desa ternyata bohong!) jadi masyarakat trauma seperti itu. Pas ada yang nyata kayak Rekompak, kayak PNPM, cuek akhirnya, setelah itu ada yang nyata baru bikin proposal dsb. Kami-kami orang yang pertama memberi penjelasan kepada masyarakat. Saya juga sempat bertanya ini nyata apa enggak, tapi nyata dan Alhamdulillah. Kan banyak yang datang sebelumnya, kita yang langsung ke masyarakat akhirnya kita yang dianggap bohong oleh masyarakat. (DH, 27 Maret 2013)

Untuk kegiatan lainnya seperti pada simulasi bencana, masih banyak masyarakat yang tidak turut serta dalam kegiatan tersebut. Masyarakat pada umumnya memilih beraktifitas seperti biasanya untuk mencari nafkah.

Misalnya pada kegiatan simulasi diharapkan semua masyarakat ikut, dan kita instruksikan untuk ikut semua, supaya semua mengetahui bagaimana cara kita menghadapi bencana, tapi itulah hanya sebagian kecil saja masyarakat, bahkan yang dikerahkan mah akhirnya anak-anak sekolah. Jadi masyarakat mungkin karena keterbatasan waktu, dan kesibukan-kesibukan mereka. (US, 10 Mei 2013)

Orang-orang yang sering aktif di kegiatan desa dapat dikatakan antusias mengikuti berbagai program dan kegiatan yang diadakan baik itu oleh pemerintah maupun LSM, namun tidak demikian dengan masyarakat pada umumnya yang tinggal di desa masing-masing. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat yang lebih luas menjadi kendala utama, perilaku tersebut juga diikutsertai dengan motivasi bahwa program atau kegiatan yang diadakan tersebut masyarakat dapat uang, apabila tidak mendapatkan uang maka masyarakat enggan untuk berpartisipasi dan lebih memilih mencari nafkah.

#### **4.4. Manajemen Resiko dan Pengurangan Kerentanan**

##### **4.4.1. Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan**

Terdapat berbagai kegiatan masyarakat yang dilakukan di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung yang berkaitan dengan bagaimana mengelola sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Kegiatan yang dilakukan yang cukup rutin adalah bersih-bersih pantai dan lingkungan di sekitarnya, serta penghijauan melalui penanaman pohon-pohon.

Kalau di pangandaran mah kegiatan sudah dilaksanakan semua, dari penghijauan, bersih-bersih pantai, bakti sosial, dsb. Sampai di Pangandaran juga kan pada waktu dulu sudah tidak ada lahan, semua melaksanakan penghijauan, bari jeung ada yang jadi ada yang tidak. (DH, 27 Maret 2013)

Namun ada juga yang sangat menarik, bahwa di satu sisi diadakan kegiatan penghijauan, tetapi di daerah pantai yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata dan kegiatan ekonomi masyarakat, telah lama terjadinya penebangan pohon-pohon. Ternyata juga tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga pemerintah sendiri, seperti halnya yang dilakukan dalam upaya membangun taman.

Yang biasa berjalan, yang pertama gerakan membersihkan pantai, yang kedua gerakan bersih lingkungan, seperti halnya kebersihan selokan

ataupun daerah-daerah rawan bencana ataupun di tempat-tempat kumuh lah. Di daerah rawan bencana banjir tentunya Dusun Karangsalam RT 06 RW 05, RT 07 RW 05 dan Bojongjati RT 02 RW 06 itu sangat rawan terjadi bencana. Kegiatan bersih pantai sebenarnya sudah dari dulu sebelum saat tsunami terjadi, hanya saja dulu memang ada pohon-pohon besar disepanjang wilayah pantai pangandaran. Hanya saja mereka-mereka atas nama warga banyak yang berkepentingan, diantaranya bermacam-macam lah ada yang mencari nafkah, mendirikan warung, segala macam, adapun dari pemerintah yang menghimbau untuk membangun taman dan segala macam. Jadi terjadi disana pak penebangan besar-besaran, dalam artian pohon-pohon yang dulu ada disepanjang pinggir pantai itu ditebangi pak. (MG, 30 Mei 2013)

Sementara itu di daerah Desa Pangandaran yang sebagian besarnya adalah wilayah Cagar alam seluas 530 Ha, diyakini telah memberikan perlindungan dari bahaya bencana tsunami, karena keberadaan cagar alam tersebut dapat membentengi daerah Pangandaran yang langsung ke laut lepas, sehingga dampak bencana yang diakibatkan oleh bencana tsunami tidak terlalu parah. Daerah cagar alam juga merupakan salah satu daerah wisata di Pangandaran, banyak wisatawan ke cagar alam untuk mengunjungi pantai pasir putih, gua persembuyian jepang ketika perang dunia ke II terjadi, dan potensi wisata alam lainnya. Sehingga keberadaan cagar alam ini sangat penting, baik itu untuk melindungi dari bahaya tsunami dan juga sebagai kawasan wisata alam.

Memang kalau disini kan bencana itu terjadi tsunami, sehingga yang paling ditakuti tsunami, pengalaman yang terjadi air laut surut dulu selama selang waktu setengah jam, disini sampai 200 meter. Keuntungannya kalau di pangandaran ini, di desa pangandaran ini wilayah yang berbentuk leher, sementara yang besarnya adalah wilayah hutan dan cagar alam yang disana tidak ada penghuninya. Pangandaran ini memiliki wilayah 637 Ha, yang sebagian besarnya 530 Ha itu adalah Hutan cagar alam itu, maka ketika tsunami juga ada perlindungan dari sana, terlindungi. (US, 10 Mei 2013)

Salah satu cara lainnya dalam upaya untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan adalah melalui pengajian dan arisan. Dua kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat. Dari kegiatan tersebut dapat perkembangan tentang bagaimana mengelola sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di wilayahnya.

Kita ada pengajian rutin tiap minggu, disini ada banyak masjid ada 9 masjid jami, melalui pengajian di RT atau RW dari sana muncul isu-isu yang perlu ditangani, apalagi menyangkut tentang sanitasi, kesehatan, lingkungan. (SA, 11 Mei 2013)

Melihat beberapa aspek yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat, masih terdapatnya kegiatan yang sangat berpotensi dan perlu ditingkatkan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Selain berfungsi untuk kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, kegiatan tersebut juga dapat lebih meningkatkan daya tarik pariwisata.

#### 4.4.2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Baik itu pemerintah Desa Pangandaran maupun Desa Pananjung mempunyai kebijakan yang berbeda berkaitan dengan perlindungan sosial. Seperti halnya di Desa Pananjung, telah adanya upaya perlindungan sosial untuk masyarakatnya melalui upaya pendanaan yang dimasukkan ke dalam bantuan kelembagaan sosial yang besarnya Rp. 5.000.000,- per tahun.

Kalau pendanaan dari desa untuk bencana kan kita istilahnya tidak kita harap-harapkan, jadi tidak teragendakan secara rutin ataupun dilaksanakan secara rutin ini untuk penanganan bencana, tidak. Karena biasanya kalau ke bencana itukan sifatnya darurat, jadi kita ambil langkah yaitu melalui bantuan kelembagaan sosial. Kalau di plotkan ke bantuan kelembagaan sosial itu kan sifatnya luas, bisa untuk santunan anak yatim

piatu, untuk penyaluran bilamana ada anak yang tidak mampu bisa kita upayakan untuk agar ia bisa bersekolah lagi, dll. Kalau untuk bencana, kita tidak bisa menyebutkan angkanya sendiri sih pak kecuali kalau misalkan dari bencana pada saat itu baru kita tawarkan. Bantuan kelembagaan sosial itu sekitar 5 juta rupiah, ya memang terbilang kecil lah. (MG, 30 Mei 2013)

Di Desa Pangandaran lain kebijakannya, telah ada upaya untuk menganggarkan dana untuk penanggulangan bencana yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- per tahun. Tentu saja hal ini sangat baik sekali, mengingat pengalaman pemerintahan desa sendiri yang ternyata mengalami kesulitan ketika pada waktu yang lalu terjadi bencana tsunami. Sehingga dapat dikatakan bahwa

Uang itu disimpan untuk operasional kalau terjadi bencana, pengalaman dulu kan kita susah, dulu memang tidak ada sama sekali. Dulu kan bagaimana cara penanggulangannya tidak tahu, kalo dulu kan akhirnya bantuan-bantuan dari luar yang datang ke sini. Karena kurang pengalaman akhirnya seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Besarannya kita ada target minimal 5 juta, kalau pendapatannya lebih besar itu bisa diubah, tapi minimal pada angka itu. (US, 10 Mei 2013)

Masyarakat sendiri sebenarnya telah memiliki sistem perlindungan sosial, yaitu melalui kegiatan pengumpulan dana *perelek* dan juga arisan yang diselenggarakan di tingkatan RT. Tapi ternyata tidak di setiap RT kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Banyak manfaat dari dana *perelek* maupun arisan tersebut, khususnya jika terjadi kedaruratan di tingkatan kelompok kecil masyarakat, seperti halnya yang terjadi di tingkatan RT.

Kegotong royongan merupakan nilai-nilai luhur sejak dulu, kita kembalikan lagi, untuk mengatasi kebencanaan yang ada di Pangandaran ini. Alhamdulillah di RT 03 RW 09 saya sekarang ini masih ada *perelek*, itu secara historis juga sebagai nilai kearifan lokal, digunakan untuk kematian, atau ada musibah lainnya di tingkat RT, besarnya sekitar Rp 4000,- per bulan. Ini bisa dicontoh oleh RT lain yang vakum, ini penting

sekali, manakala ada emergency ada yang meninggal, kita bisa beli kain kafan dari uang *perelek* tersebut. Kemudian arisan, disini bukan melihat masalah besar atau kecilnya nominal uang, tetapi silarutrahmi, karena dengan komunikasi tersebut akan mengetahui satu sama lain, akan mengetahui tingkat kemiskinan masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. (SA, 11 Mei 2013)

Dari beberapa uraian diatas, terlihat bagaimana upaya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik itu di Desa Pananjung maupun di Desa Pangandaran yang berkaitan dengan perlindungan sosial, di Desa Pananjung merasa cukup dianggarkan pada dana bantuan kelembagaan sosial, sedangkan di Desa Pangandaran sudah mulai menganggarkan dana penanggulangan bencana. Di tingkatan masyarakat setingkat RT pun, terdapat beberapa upaya yang masih berjalan seperti masih adanya pengumpulan dana *perelek* dan arisan yang dapat digunakan untuk mengatasi kedaruratan di tingkat RT.

#### **4.5. Kesiapsiagaan dan Respon Bencana**

##### **4.5.1 Kapasitas Organisasi dan Koordinasi**

Sebelum dibentuk FKDM melalui fasilitasi desa tangguh bencana tahun 2012 dari BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Ciamis, terdapat organisasi yang berkaitan dengan kegiatan pengurangan resiko bencana yang merupakan bentukan dari Program Rekompak, baik itu di Desa Pananjung maupun di Desa Pangandaran, yaitu OPRB yang dibentuk pada tahun 2010. Melihat dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi Jawa Barat untuk membentuk FKDM ke setiap Kecamatan dan juga Desa yang ada di Jawa Barat, maka organisasi sejenis yang ada sebelumnya di Desa bisa dikatakan harus menyesuaikan ke dalam FKDM, namun ada juga Desa yang masih mempertahankan keberadaan OPRB karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukannya yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana ataupun penanggulangan bencana.

Kebetulan organisasi disini ada 2 yaitu OPRB dan FKDM. Dua organisasi tersebut sasarannya hampir sama, cuman yang membentuk berbeda. Kalau OPRB itu dibentuk oleh yayasan yang didanai oleh dana luar negeri, kalau FKDM itu kan program pemerintah. Tapi bukan berarti OPRB tidak didukung oleh pemerintah, sama juga difasilitasi terbentuknya itu. Kelihatannya ada beberapa orang yang disini masuk disana masuk. Sekarang yang lebih banyak kegiatan itu memang yang diselenggarakan oleh OPRB ini. Biasanya memang kalau yayasan apalagi di danai dari luar negeri banyak kegiatannya, kalau swasta dan dukungan dari luar negeri lebih serius. Kayaknya tidak begitu sulit menggabungkan, tapi kita harus sedia payung sebelum hujan. Supaya tidak terjadi *clash* antara 2 lembaga ini dibuat satu ketentuan, karena kalau nanti kebijakannya berbeda, akhirnya terjadi gesekan, kalau tidak ada payung hukum kan sulit juga, jadi bisa ditengahi oleh aturan yang ada. Kalau melihat orang-orangnya ya tadi ada yang masuk disini ada yang masuk disana. (US, 10 Mei 2013)

Di Desa Pangandaran sendiri kegiatan OPRB dapat dikatakan masih aktif hingga saat ini. Keberadaannya di desa pun diakui melalui adanya SK dari Kepala Desa. Dengan terbentuknya FKDM di Desa Pangandaran melalui fasilitasi desa tangguh bencana pada tahun 2012, dimana sebagai salah satu indikator desa tangguh bencana yaitu adanya forum pengurangan resiko bencana, beberapa anggota OPRB di Desa Pangandaran juga masuk ke dalam susunan pengurus FKDM. Pada perkembangannya ada upaya dari pemerintah Desa untuk menyatukan dua lembaga tersebut ke dalam satu peraturan di tingkat desa.

Sebelum ada FKDM kebetulan saya berada di pengurusan OPRB (Organisasi Pengurangan Resiko Bencana), yang menindaklanjuti program dari Rekompak, kemudian oleh ADRA difasilitasi, akhirnya kita mendapatkan SK di Desa, kemudian Desa juga memfasilitasi dari Alokasi Dana Desa, lumayanlah untuk biaya operasional sebesar Rp. 1.700.000,- . Jadi saya mah di FKDM juga OPRB, duduk di dua organisasi satu tujuan. Jadi maksud saya mah kita jangan menunggu dana dari pemerintah saja,

manakala FKDM tidak jalan karena tergantung dengan anggaran pemerintah, OPRB ini hidup, kita libatkan semua, termasuk ketika ada pemberdayaan dan simulasi ORARI misalnya saya libatkan juga. (SA, 11 Mei 2013)

Di Desa Pananjung juga sebelumnya telah dibentuk OPRB, dan juga telah diberikan SK dari Kepala Desa Pananjung. Beberapa anggota OPRB di Desa Pananjung juga kemudian ikut bergabung ke dalam FKDM Desa Pananjung yang dilaksanakan fasilitasi melalui fasilitasi desa tangguh bencana.

OPRB itu masih ada, tetapi hanya berjalan manakala akan ada kegiatan saja pak. Memang sebagian dari keanggotaan OPRB masuk ke FKDM, tapi tidak semuanya orang-orang yang beranggotakan di OPRB masuk ke FKDM, jadi hanya sebagian saja seperti halnya Bapak Wasdi sebagai ketua karang taruna dia memang masuk ke OPRB ya masuk juga ke FKDM. Karena memang secara tidak langsung sebetulnya sama sih. Sama dalam artian ya sifatnya ya bagaimana cara kita megurangi resiko bencana lah begitu. Kalau OPRB itu kan pembentukan dari Rekompak tapi itu ada dari SK desa juga. (MG, 30 Mei 2013).

Keanggotaan FKDM berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di desa dan juga aparat pemerintah desa. Melihat anggota forum ini yang merupakan perwakilan dari masyarakat dan pemerintah di desa, hal ini akan mempermudah koordinasi dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Tetapi masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana nasib OPRB yang merupakan bentukan dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Rekompak untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Seperti di Desa Pangandaran misalnya, OPRB memiliki kegiatan-kegiatan penting berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, dan juga memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa ornop/LSM yang masuk dan akan melakukan kegiatan penanggulangan bencana di Desa Pangandaran seperti misalnya yang pernah dilakukan yaitu kerjasama dengan ADRA Indonesia.

Kegiatan yang dilakukan ADRA misalnya tidak membuat organisasi baru di masyarakat, tetapi memanfaatkan organisasi yang sudah ada di masyarakat yaitu OPRB.

Sehingga yang dapat dilihat dengan adanya fasilitasi desa tangguh bencana adalah BPBD Provinsi Jawa Barat berupaya untuk membuat lembaga/forum baru yang disesuaikan dengan Perda Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Barat, kemudian organisasi di bidang penanggulangan bencana yang sudah ada di masyarakat seperti halnya OPRB, diajak untuk masuk dan bergabung ke dalam FKDM, dan bahkan ada upaya dari pemerintah desa untuk menggabungkan anggota OPRB ke dalam FKDM.

#### 4.5.2 Sistem Peringatan Dini

Pada proses pemasangan sistem peringatan dini sendiri di Desa Pangandaran, terdapat peristiwa yang cukup mengagetkan, upaya untuk memasang sistem peringatan dini di mesjid dikarenakan sudah pasti dirawat dengan baik, dan selalu dipakai misalnya digunakan untuk adzan. Penolakan tersebut dari Mesjid Mujahidin ketika dikabarkan bahwa di mesjid tersebut akan dipasang alat sistem peringatan dini, pertimbangan lainnya adalah lokasi Mesjid Mujahidin dianggap strategis karena suara dari sistem peringatan dini apabila dipasang di Mesjid Mujahidin bisa menjangkau beberapa titik yang dianggap penting. Setelah Mesjid Mujahidin menolak dipasang alat peringatan dini, akhirnya dipasang di Pos TNI AL. Sehingga sistem peringatan dini yang ada di Desa Pangandaran terdapat di 3 tempat, yaitu dipasang di Pos TNI AL, Mesjid Al Bahar, dan Balawisata (*Lifeguard*), sedangkan satu lagi dipasang di Mesjid Sindangkalang Desa Batukaras Kecamatan Cijulang.

Mesjid Mujahidin menolak untuk dipasang *early warning system* karena pengeras suara ini bisa dipake tiap hari, silahkan mau adzan mau pake ngaji, manakala ti Ciamis mencet bel sirine, ini otomatis akan berhenti, itu sistemna udah gitu. Mereka tidak mau, bahkan dikumpulkeun MUI, Kepala Desa Pak Iwan dikumpulkeun, agar bisa diterima untuk

kemanusiaan, tapi tetap mesjid Mujahidin ini mah jawabnya “da ieu mah ti Kristen” kalau saya mah untuk kemanusiaan mah timana-mana juga bae, akhirnya dipasang di pos Angkatan Laut. Jadi yang difasilitasi ADRA untuk *early warning system* : Angkatan Laut, Mesjid Albahar, teras Balawista (*Lifeguard*). Kan ada 4 pos punya toa masing-masing yang di relai, itu sudah dipasang perangkatnya, sinyalnya udah ada, repeaternya udah ada. (SA, 27 Maret 2013)

Untuk sistem peringatan dini di Desa Pananjung, ternyata masih mengandalkan yang ada di Desa Pangandaran. Sistem peringatan dini yang paling dekat dengan Desa Pananjung adalah di Balawisata. Selain itu, terdapat juga upaya kordinasi yang dilakukan oleh Desa Pananjung dengan Desa Pangandaran dalam hal sistem peringatan dini.

Kalau di Desa Pananjung sendiri, gini pak karena dari bibir pantai itu ada yang mengawasi kita tidak sendiri ada di Desa Pananjung kebetulan di sekitar area Pantai Pangandaran dan area lautnya, itu sudah ada yang menjaga sendiri pak, seperti halnya penjaga pantai sudah jelas menjaga pantai itu sendiri dari Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) gitu, jadi kita tidak terlepas koordinasi dengan badan ataupun intansi yang terkait makala kita membutuhkan pada waktu itu. (MG, 30 Mei 2013).

Alat peringatan dini tersebut mulai diujicobakan di pada tanggal 17 Maret 2013, dan kemudian rutin di setiap tanggal 17. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengecek apakah alat tersebut masih baik atau ada kerusakan. Tanggal 17 yang dipilih merupakan tanggal dimana terjadinya bencana tsunami di Pangandaran.

Ada fasilitas walaupun tidak optimal karena kemaren dicoba enggak jadi, memang ada semacam alarm informasi tsunami itu ada di pasang, tapi memang kelihatannya karena kurang perawatan dan tidak ada perawatan khusus, untuk uji coba saja ada elemen-elemen yang harus diperbaiki dulu. Tapi kemarin waktu simulasi kita mempraktekkan itu, sehingga dapat memberikan perawatan khusus. (US, 10 Mei 2013).

Ketika ujicoba akan dilakukan, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu adanya kerusakan pada alat sistem peringatan dini yang ada, baik alat sistem peringatan dini yang ada di Desa Pangandaran, maupun yang ada di BPBD Kabupaten Ciamis. Kendala itu kemudian dapat teratasi karena alat peringatan dini tersebut sudah diperbaiki dan dapat dioperasikan lagi.

#### 4.5.3 Kesiapsiagaan dan Perencanaan Kontinjensi

Upaya dalam kesiapsiagaan dan perencanaan kontinjensi di tingkat desa melalui FKDM berlangsung dalam pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan. Namun sejak berdirinya FKDM di Desa Pangandaran kegiatan rutin tersebut tidak dapat dikatakan rutin, sebab sejak terbentuknya bulan September 2012 hingga bulan Mei 2013 ternyata baru 3 kali melaksanakan pertemuan untuk membahas berbagai rencana dan peraturan yang akan dikembangkan di Desa Pangandaran.

Kegiatan sendiri yang saya alami memang dari sejak dibentuk FKDM baru tiga kali ada pertemuan resmi. Membahas tentang rencana kerja, dan juga pengajuan konsep peraturan desa, yang selanjutnya menginventarisir bangunan-bangunan yang mungkin bisa digunakan untuk mitigasi bencana. Sekarang ini memang sedang dirancang supaya dalam melaksanakan tugasnya ada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Desa, jadi melangkah itu ada dasar hukumnya, memang peraturan desa tentang bencana itu nantinya mencakup langkah-langkah organisasi yang ada. (US, 10 Mei 2013)

Di masyarakatnya juga ternyata masih kurang kesadarannya untuk mengikuti kegiatan kesiapsiagaan bencana seperti pada kegiatan simulasi yang diadakan oleh FKDM, masyarakat pada umumnya lebih cenderung untuk melakukan aktifitasnya mencari nafkah dibandingkan untuk mengikuti kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan di oleh Desa. Bahkan karena berorientasi hanya mencari uang, terkadang dengan adanya kegiatan tersebut beberapa masyarakat mengharapkan ada uang yang dapat diterima dari kegiatan kesiapsiagaan bencana tersebut.

Respon masyarakat terhadap kesiapsiagaan masih kurang kesadarannya. *Ari kieu mah* (kalau seperti ini), Pak RT pak RW tolong kumpulkan warga *boga* jadwal jam *sabaraha* (punya jadwal jam berapa), *iraha* (kapan), jam *sabaraha sok ek dimana ek* di mesjid di *imah* RW silahkan (jam berapa mau di mesjid atau di rumah), *bade* sosialisasi, *tah* karakter tsunami *teh kieu kieu kieu, daratang kitu nya*. Pas simulasina, *anjir geningan ieu asin keneh, kumaha ieu pagawean can beres* (bagaimana ini pekerjaan belum beres), *aduh aing mah, kitu tah*. Walaupun memang tingkat penedarannya kurang, masyarakat *sina ikut keterlibatan simulasi oge mikir dua kali, aneh nya abdi mah euy. Untung abdi oge kabantuna* (saya merasa terbantu) *ku anak SD. Abdi nyuhunkeun instruksi ti Kepala UPTD untuk di kawasan desa Pangandaran ada 6 SD, kami mohon perwakilannya ada 20 putra putri jadi 40 satu SD teh, ngirimkeun ka tempat lokasi yang akan dilaksanakannya simulasi tsunami. Alhamdulillah Pak, kabantuna ku eta. Ari ti masyarakat, ngan Rt/Rw, malah milih usaha, karep mun tsunami deui karep ceuk aing teh* (terserah kalau terjadi tsunami lagi). Jadi masih *keneh* punya *mindsetnya teh aya duitan euy, aya duitan euy, tah kitu*. (SA, 27 Maret 2013)

Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Pananjung, kegiatan FKDM yang memang sudah diagendakan secara rutin tiap bulannya ternyata tidak dapat terlaksana, hal ini disebabkan karena memang pengurus FKDM yang ada memiliki berbagai jabatan di tingkat desa, organisasi profesi, dan lainnya sehingga tidak dapat fokus untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana.

Kegiatan rutin FKDM pertemuana paling satu bulan sekali. Kegiatannya ya pertemuan, bakti sosial. Kalau umpamana dirutinkan seminggu sekali jadi jenuh. Kalau ada bencana kami siap. Kalau fasilitas mah ada ambulan desa, terus ya kaos seragam sudah ada. Kemarin terjadi vakum karena ada kegiatan pilkada, panitianya kan kita lagi, kita lagi. (DH, 27 Maret 2013)

Di Desa Pananjung sendiri kegiatan pertemuan FKDM tersebut lebih pada evaluasi dari kegiatan yang dilakukan, Desa Pananjung memang telah menjadikan draft-draft dari fasilitasi desa tangguh bencana ke dalam peraturan desa, sehingga

upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kegiatannya-kegiatannya melalui pertemuan yang diadakan.

Awalnya kita sudah mengagendakan secara rutin setiap satu bulan sekali, namun karena banyak kepentingan. Kadang kalau akan ada agenda kepada masyarakat saja baru kita komunikasikan dengan yang lain. Kalau didalam pertemuan rutin biasanya yang dibahas itu agendanya ya evaluasi lah biasanya. Karena dengan adanya evaluasi mengupayakan lah kedepannya supaya lebih baik, lebih bagus dan dapat ditingkatkan. Evaluasi dalam artian apakah kita terlalu dini secara langsung dalam menanggapi bencana sebelumnya, kita turun langsung ke lapangan atau tidak, kegiatan yang sudah dilakukan kita evaluasi. (MG, 30 Mei 2013).

Karena memang pengurus FKDM rata-rata memiliki jabatan di Desa, organisasi masyarakat, dan juga organisasi profesi, maka dapat dilihat bahwa forum tersebut masih perlu ditingkatkan untuk benar-benar mengadakan kegiatan rutinnya. Upaya kesiapsiagaan dan perencanaan kontijensi akan lebih berkembang apabila pengurus dan anggota FKDM tersebut dapat secara rutin mengadakan pertemuan.

#### 4.5.4 Respon Kedaruratan dan Pemulihan

Desa Pananjung ternyata sering mengalami bencana rutin yaitu banjir, kegiatan respon kedaruratan juga dilakukan oleh FKDM Desa Pananjung bersama dengan instansi lainnya yang ada di Desa. Hal yang dilakukan dalam kegiatan respon bencana tersebut yaitu membagikan logistik dan melakukan evakuasi.

Sekarang di lapangan kegiatan kebencanaan baru satu kali pada waktu banjir di Bojongjati. Dari FKDM turunlah gitu, belum lamalah hujan-hujan kemarin, sekitar Januari Februari. Tapi tidak dari FKDM semua, dari instansi juga ada, kita merapat bareng-bareng, kontrol dan sebagainya, ya ngasih yang emergensi, semacam air minum, sarimi pokoknya udah siap cepat saji, logistik, membantu evakuasi. Kebetulan tidak banyak

dievakuasi cuman satu RT, besoknya udah surut lagi kebetulan. Memang hampir 40% Desa terendam, daerah sana pesawahan. (DH, 27 Maret 2013)

Meskipun hanya dengan mengandalkan tenaga dalam melakukan kegiatan respon bencana, FKDM Desa Pananjung dapat melaksanakan dengan baik pembagian logistik dan evakuasi korban banjir.

Pada saat itu kita pernah terjadi banjir di akhir-akhir tahun 2012 itu terjadi banjir besar, lumayan itu. Biasanya di desa kita seting terjadi banjir besar itu sekitar September-Oktober. Karena pada saat terjadi memang musim penghujan yang cukup kencanglah, kadang selain banjir pun bersamaan dengan angin yang kencang disini. Pada saat mulai terjadi bencana langsung seperti halnya banjir kita langsung turun ke lapangan, jadi sementara ini masih sangat sederhana dan masih mengandalkan yang ada di kita, seperti tenaga. Jadi ada waktu itu alhamdulillah kita dari forum kita bagi-bagi tugas dan turun ke lokasi, yang dilakukan diantaranya pertama tentunya kita yang paling utama itu menyelamatkan nyawa warga, jadi kita evakuasi dulu warga ke tempat yang lebih aman lalu kita menyelamatkan barang-barang ataupun perlengkapan rumah tangga milik warga yang ada di sekitar. (MG, 30 Mei 2013).

Jika melihat rutinnnya bencana banjir, maka FDKM Desa Pananjung perlu untuk mengembangkan pola pendekatan yaitu tidak bertumpu pada kegiatan respon bencana, tetapi juga semakin meningkatkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, terlebih lagi di daerah yang rawan banjir.

Pengalaman di Desa Pangandaran untuk pemulihan pascabencana adalah adanya program bantuan pemulihan ekonomi masyarakat dan juga perbaikan rumah, bantuan tersebut juga ternyata mengalami kendala di dalam pelaksanaannya, diantaranya masih ada ketidaktepatan sasaran dari penerima bantuan-bantuan tersebut. Hal ini tentu membuat kecemburuan sosial dan ketegangan terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat harus mengambil langkah tertentu dan membuat

kebijakan untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat dari program-program yang tidak tepat sasaran dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Selanjutnya yang paling merepotkan adalah pada saat pasca bencana. Yah yang namanya orang, itu kan biasanya temperamennya tinggi, pasca bencana menyita tenaga, pikiran dan mental. Hal ini perlu diperhatikan karena pada pascabencana, mental orang kan terganggu, maka sangat sensitif, jadi cara penanggulangannya betul-betul harus memperhatikan keadilan dalam membuat kebijakan terhadap masyarakat. Contohnya ketika itu setelah terjadi bencana ada bantuan yang disalurkan terhadap korban, nah ketika itu ada bantuan yang bukan untuk korban tetapi untuk pemulihan ekonomi masyarakat, karena momennya ketika itu momen bencana maka yang meminta bantuan adalah korban, maka ketika penyaluran bantuan itu bukan kepada korban kemudian timbul kecemburuan, padahal programnya kan lain, karena programnya bersamaan maka itu dianggap untuk korban bencana. Dari sana akhirnya berkembang, salah satunya yaitu ada bantuan untuk pedagang asongan dan tukang beca, siapa pun tahu mereka tidak selamanya berada di pantai, bahkan ada yang tinggalnya di Kalipucang dan Padaherang, mungkin saja ketika terjadi bencana di Pangandaran mereka sedang tenang-tenang dan istirahat tapi mereka mendapatkan bantuan, karena memang konteksnya bantuan itu pemulihan ekonomi kan gitu, karena memang dia usahanya disini. Karena momennya bencana, akhirnya terjadi kecemburuan. Tadinya ada bantuan untuk rumah rusak, kerusakan apa saja diajukan, akibat dari itu akhirnya yang kewalahan kan pemerintah, akibat dari kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah dari atas kurang hati-hati memberikannya. Akhirnya langkah yang diambil oleh pemerintah desa karena tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban bencana, maka masyarakat yang mengajukan harus membentuk kelompok dan kelompok itulah yang mengajukan dan diketahui oleh RT dan RW setempat. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2007 dan ketegangan di masyarakat pascabencana itu berlangsung hingga tahun 2010. Pemulihan psikologis pun ada di lakukan pemerintah maupun LSM setelah terjadinya bencana,

anak-anak diajak ke pantai, dan ada juga orang-orang dewasa yang karena keluarganya meninggal ketika terjadi bencana tsunami, sehingga setelah upaya pemulihan yang dilakukan masyarakat lebih tenang dan melanjutkan kembali aktifitasnya. (US, 10 Mei 2013)

Pemulihan psikologis, perbaikan pemukiman tempat tinggal dan juga pemulihan ekonomi masyarakat sangat diperlukan oleh masyarakat setelah terjadinya bencana. Disini terlihat sangat diperlukannya peran pemerintah, organisasi masyarakat/LSM, dan juga dunia usaha dalam upaya pemulihan psikologis dan juga pemulihan ekonomi. Bahkan pemerintah desa juga perlu mengambil tindakan dan kebijakan yang memberikan rasa keadilan di masyarakat apabila terjadi persoalan yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam penyaluran bantuan pemulihan pascabencana di masyarakat.

#### 4.5.5 Partisipasi dan Kerelawanan

Partisipasi dan kerelawanan yang ada di masyarakat dapat dikatakan memiliki kategori yang berbeda-beda, apabila terjadi bencana misalnya timbul rasa kerelawanan dan partisipasinya dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Secara tidak langsung, kalau masyarakat kita bila dilihat dari rasa, swadaya, ataupun partisipasinya, ataupun sifat kemanusiaannya masih tinggi jadi tidak hanya mengandalkan dari forum ataupun badan yang beranggotakan lebih sedikitlah dibanding dari jumlah warga yang lebih besar dari kita gitu pak, jadi secara tidak langsung masyarakat ikut langsung membantu pada saat terjadi bencana secara langsung. (MG, 30 Mei 2013).

Tetapi lain halnya apabila dalam kegiatan pra bencana yang rutin diselenggarakan, berbagai macam pola partisipasi dan kerelawanan hadir disitu, ada yang berpartisipasi aktif, ada yang mau uangnya saja, ada juga yang berpartisipasi sekedarnya, dan bahkan juga ada yang tidak ikut serta.

Karena masyarakat majemuk kembali lagi ke masyarakat sebetulnya, masyarakat yang tidak peduli kalo disuruh-suruh aduh susah, ada yang datang sendiri meminta jatah setelah dikasih lalu pulang, ada. Ada yang punya kepedulian ikut bersih-bersih lingkungan ada, ada juga yang hanya bersihkan rumah saja. Jadi majemuklah orangnya, majemuk dengan berbagai alasan, berbagai kepentingan. Tidak mudah mencari orang yang memang ikhlas. (DH, 27 Maret 2013)



## **BAB 5 PEMBAHASAN**

### **5.1. Pembahasan Pemerintah**

Pemerintah merupakan aspek penting di dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana, Twigg (2007) menyebutkan bahwa pemerintah sebagai acuan utama yang dapat berpengaruh dan relevan pada semua kegiatan pengurangan resiko bencana, pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Seperti misalnya pada perencanaan, regulasi, sistem kelembagaan, kemitraan dan akuntabilitas merupakan aspek yang menjadi bagian dari kegiatan pemerintah. Sehingga pemerintah menjadi fokus penting di dalam masyarakat tangguh bencana.

Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berupaya mewujudkan masyarakat tangguh bencana melalui fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana. Pada pelaksanaannya, terdapat perbedaan dalam Perka BNPB tentang desa/kelurahan tangguh bencana dengan Juknis tahun 2012, perbedaan mendasar tersebut terdapat pada pencapaian indikator desa/kelurahan tangguh bencana. Pada Perka BNPB, terdapat capaian 6 aspek yang terdiri dari 60 indikator, dan kemudian menilai desa/kelurahan tangguh bencana tersebut ke dalam 3 kriteria, yaitu desa/kelurahan tangguh pratama, madya, dan utama. Sedangkan dalam Juknis capaian desa/kelurahan melalui 9 indikator, dimana dalam pelaksanaannya minimal tercapai 5 indikator.

Pada pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana tahun 2012, seluruh kegiatannya mengacu kepada Juknis tahun 2012. Dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2012 ini adalah mengupayakan tercapainya 9 indikator di setiap desa/kelurahan yang menjadi sasaran program. Sembilan indikator yang ada tersebut merupakan sebagian kecil dari indikator yang disyaratkan melalui Perka BNPB tentang pedoman desa/kelurahan tangguh bencana.

Dalam upaya mewujudkan tatanan yang ideal dalam masyarakat tangguh bencana, Twigg (2007) menjelaskan bahwa tidak semua elemen-elemen dalam ketangguhan bencana diperlukan, oleh karena itu, setiap karakteristik tangguh

bencana sangat tergantung kepada lokasi, waktu, dan tipe bahaya/potensi bencana. Hal ini menurut Twigg (2007) berarti bahwa perlu adanya proses partisipatoris yang komprehensif di tingkatan lokal, sehingga dapat memunculkan karakteristik ketangguhan masyarakat terhadap bencana yang sesuai dengan masyarakat tersebut.

Fasilitasi desa tangguh bencana kemudian berupaya untuk mengintegrasikan dokumen perencanaan dan kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan ke dalam Peraturan Desa. Melihat yang terjadi di Desa Pananjung adalah dengan disyahnkannya menjadi Peraturan Desa hasil dari kegiatan fasilitasi tersebut, yaitu Rencana Aksi Komunitas, Rencana Penanggulangan Desa, rencana kontijensi, dan relawan penanggulangan bencana/forum pengurangan resiko bencana. Melalui Peraturan Desa Pananjung No. 04 Tahun 2012 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis Tahun 2012 – 2017. Disini dapat dilihat bahwa kebijakan yang ada adalah sebatas pada Rencana Penanggulangan Bencana, sedangkan dokumen lainnya seperti Rencana Aksi Komunitas, dan Rencana Kontijensi masih berupa draft yang ikut terlampir.

Berbeda halnya dengan di Desa Pangandaran, belum adanya sebuah Peraturan Desa untuk mensyahkan hasil dari kegiatan fasilitasi desa tangguh tersebut, seperti Rencana Aksi Komunitas, Rencana Penanggulangan Desa, Rencana Kontijensi. Kebijakan yang telah ada adalah Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor: 360/13.Kpts/Desa/2012 tentang Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran. Kebijakan yang ada telah mensyahkan sebuah kelembagaan relawan di bidang pengurangan resiko bencana maupun penanggulangan bencana.

## **5.2. Pembahasan Data dan Assemen Resiko**

Twigg (2007) menyebutkan bahwa assesmen bahaya/resiko dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan semua sumber keahlian yang ada. Temuan-temuan dari assesmen bahaya/resiko tersebut disebarluaskan, didiskusikan, dipahami dan disepakati di antara semua

stakeholder, dan dimasukkan ke dalam perencanaan penanggulangan bencana masyarakat. Keterampilan dan kapasitas untuk melaksanakan pengkajian bahaya dan risiko yang dihadapi masyarakat dibina terus melalui dukungan dan pelatihan.

Pada Assesmen kerentanan/kapasitas, menurut Twigg (2007) harus menggambarkan secara komprehensif mengenai kerentanan dan kapasitas yang ada di masyarakat. Assesmen kerentanan/kapasitas tersebut menurut Twigg (2007) dilakukan secara partisipatoris kedalam pemetaan dan didokumentasikan dengan baik, dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana ternyata juga menggunakan pendekatan pemetaan partisipatif. Adi (2008) menjelaskan bahwa pemetaan partisipatoris digunakan untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi di area mana saja masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat dan juga untuk memetakan potensi-potensi yang terkait dengan aset komunitas.

Di dalam kegiatan pemetaan yang dilaksanakan dalam fasilitasi desa tangguh bencana tersebut terdapat 3 kegiatan pemetaan sebagai indikator Desa tangguh bencana, yaitu:

1. Peta ancaman bencana
2. Peta dan analisis kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana
3. Peta dan analisis kapasitas dan potensi sumber daya

Dari ketiga indikator kegiatan pemetaan tersebut, hasilnya disajikan dalam sebuah peta yang merangkum dari tiga indikator desa tangguh tersebut baik itu di Desa Pangandaran maupun di Desa Pananjung. Peta yang merangkum aspek bahaya, kerentanan dan kapasitas dari fasilitasi desa tangguh bencana tersebut masih belum tersebar secara luas ke masyarakat, seperti misalnya dipasang di beberapa titik-titik penting yang dapat diakses oleh masyarakat.

### 5.3. Pembahasan Pendidikan dan Pengetahuan

Berdasarkan Adi (2008) jika melihat pemberdayaan sebagai sebuah program atau proses dalam komunitas, maka diperlukannya pemercepat perubahan atau fasilitator, dimana fasilitator tersebut tidak harus selalu hadir terus-menerus dalam kelompok sasaran, disini fasilitator berfungsi menjadikan kelompok sasaran lebih pandai sehingga dapat lebih mengembangkan kelompoknya setelah program selesai dilaksanakan.

Terhadap suatu komunitas yang proses pemberdayaannya sudah berlangsung secara berkesinambungan, Adi (2008) menjelaskan bahwa dalam kondisi tersebut permasalahan bukan berarti tidak ada, tetapi bagaimana komunitas tersebut dapat menjalin sumberdaya eksternal dan menggali potensi internal komunitas tersebut.

Dalam hal posisi agen pemberdayaan masyarakat, menurut Adi (2008) terdapat dua hal yaitu jika agen pemberdayaan masyarakat berasal dari eksternal maka program pemberdayaan masyarakat diikuti dengan terminasi, sedangkan agen pemberdayaan masyarakat dari internal maka arah proses pemberdayaan masyarakat akan berkelanjutan.

Fasilitasi desa tangguh sebagai sebuah program yang dilaksanakan oleh BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Kabupaten Ciamis, selain sebagai program juga merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, karena dalam fasilitasi tersebut juga melibatkan masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk keberlangsungan program desa tangguh bencana, yaitu melalui Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) dan kemudian membentuk kader-kader tanggap bencana di tingkatan masyarakat.

Jika melihat dari upaya yang dilakukan oleh Desa Pananjung maupun Desa Pangandaran melalui FKDM, terdapat perencanaan untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan kepada pegawai hotel dan dunia usaha, dan juga kader-kader tanggap bencana di tingkat RT. Kegiatan tersebut sangat penting, sayangnya masih belum dapat dilaksanakan oleh FKDM di Desa Pananjung maupun di Desa Pangandaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai proses

berkelanjutan dari desa tangguh bencana belum dapat memberdayakan masyarakat yang lebih luas di Desa Pangandaran maupun di Desa Pananjung, dan hanya berhenti di tingkatan aparat desa saja.

Untuk pelatihan di luar Pangandaran ternyata masih kurang diikuti oleh perwakilan dari FKDM Desa Pananjung, misalnya pada pelatihan pemuda siaga bencana yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat, karena kurangnya koordinasi dan pemberian informasi, sehingga sangat disayangkan anggota ataupun pengurus FKDM di Desa Pananjung tidak mengikuti pelatihan lanjutan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat tersebut. Padahal apabila dapat diinformasikan dengan baik kepada seluruh anggota FKDM, setidaknya ada yang berminat dan bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berikutnya. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya anggota FKDM.

#### **5.4. Pembahasan Manajemen Resiko dan Pengurangan Kerentanan**

Dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, Twigg (2007) menyebutkan bahwa masyarakat harus memahami fungsi dan karakteristik lingkungan dan ekosistem, potensi resiko yang disebabkan oleh alam, dan kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan.

Setelah terjadinya bencana tsunami di Pangandaran, diadakan penanaman kembali pohon, bersih-bersih pantai dan kegiatan lingkungan lainnya. Begitu juga setelah pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana diadakan kegiatan bersih-bersih pantai, FKDM Desa Pangandaran melakukan kegiatan bersih-bersih pantai di desanya, begitu juga dengan FKDM Desa Pananjung. Kegiatan-kegiatan lingkungan tersebut dapat dikatakan hanya dilakukan apabila ada momen-momen tertentu saja, dan jika diagendakan secara rutin dalam waktu dekat, misalnya sebulan sekali belum dapat terlaksana, karena memang pengurus dan anggota FKDM memiliki kesibukan dan agenda masing-masing.

Serlanjutnya adalah mengenai perlindungan sosial. Twigg (2007) menjelaskan bahwa perlindungan sosial dan di dalamnya termasuk modal sosial, gotong royong, jaringan sosial, dan mekanisme yang dapat membantu

pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini juga mencakup kemudahan akses dalam memperoleh bantuan sosial dari pemerintah, asuransi dari resiko bencana, dan perlindungan sosial yang sudah ada sejak lama di masyarakat.

Model perlindungan sosial yang ada di Pananjung dialokasikan melalui desa sebesar 5 juta pertahun, tetapi tidak dikhususkan untuk penanggulangan bencana, melainkan untuk berbagai permasalahan sosial yang ada di desa. Di Desa Pangandaran, model perlindungan sosial yang disediakan oleh desa yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, dialokasikan minimal sebesar 5 juta.

Untuk kegiatan perlindungan sosial yang ada di masyarakat seperti gotong royong, arisan dan *perelek* perlu ditingkatkan, karena memang tidak semua RT masih melaksanakan rutinitas tersebut. Hal ini sangat penting karena dapat memberikan pertolongan pertama dalam kedaruratan yang terjadi di tingkatan RT.

### **5.5. Pembahasan Kesiapsiagaan dan Respon Bencana**

Berdasarkan Perka BNPB No. 1 tahun 2012, dalam upaya pengurangan risiko bencana, Desa perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum ini dapat dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah ada di desa. Forum ini tidak menjadi bagian dari struktur resmi pemerintah desa/kelurahan, tetapi pemerintah dapat terlibat di dalamnya bersama dengan komponen masyarakat sipil lainnya.

Pembentukan Forum PRB Desa menurut Perka BNPB No. 1 tahun 2012, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Ada keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam kepengurusan.
3. Perlu dijamin agar forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif. Forum PRB Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang cukup dan status hukum yang pasti, sehingga dapat

menjalin kerjasama dan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintahan desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Forum perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarnya.

Persoalan yang terjadi di Desa Pangandaran adalah adanya organisasi yang merupakan bentukan dari program Rekompak yang lebih dulu telah melakukan pemberdayaan masyarakat pasca bencana tsunami di Pangandaran, yaitu OPRB. Organisasi tersebut aktif melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana di Desa Pangandaran. Bahkan ADRA Indonesia juga ketika melakukan kegiatannya tahun 2012 di Pangandaran bermitra dengan OPRB. OPRB sendiri status keberadaannya melalui SK Kepala Desa Pangandaran, dan di awal kegiatannya memperoleh anggaran dana dari desa sebesar 1.700.000,- pertahun, di tahun 2013 mencapai Rp. 5.000.000,- pertahun. Pemerintah Desa Pangandaran kemudian pada perkembangannya masih dalam proses untuk melebur keberadaan OPRB ini ke dalam FKDM, sebuah forum yang diamatkan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat.

Untuk Desa Pananjung, karena memang OPRB sendiri sudah tidak ada kegiatannya, sehingga tidak terjadi persoalan di dalam pembentukan FKDM setelah fasilitasi desa tangguh bencana, akan tetapi FKDM di Desa Pananjung tidak mendapatkan alokasi dana dari desa, sehingga jika kegiatannya dilaksanakan secara rutin maka perlu untuk memikirkan biaya operasional kelembagaan tersebut.

Kemudian adalah adanya kader tanggap bencana di tingkatan masyarakat, atau yang telah direncanakan di Desa Pangandaran hingga ke tingkat RT, dan pegawai hotel. Perka BNPB No 1 tahun 2012 menyebutnya sebagai tim siaga bencana masyarakat, tim ini menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Berdasarkan Perka BNPB No 1 tahun 2012, kegiatan pada saat tidak terjadi bencana dari tim ini dapat menjadi pendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana, anggota tim ini dapat saja berasal dari anggota Forum PRB

Desa/Kelurahan, tetapi akan lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi relawan bencana. Di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung kader tanggap bencana ataupun tim siaga bencana masyarakat ini belum dapat terealisasikan.

Selanjutnya mengenai sistem peringatan dini, di Desa Pangandaran sudah memiliki sistem peringatan dini yang dipasang di 3 tempat, yaitu di Pos TNI AL, Balawisata, dan masjid Al Bahar. Alat tersebut merupakan bantuan dari ADRA Indonesia, sehingga sempat terjadi ketegangan ketika sebelumnya direncanakan akan dipasang di Mesjid Mujahidin, meskipun telah dimediasi oleh MUI dan Kepala Desa Pangandaran, namun pengurus mesjid mujahidin tidak bersedia alat peringatan dini dipasang, akhirnya kemudian alat tersebut dipasang di Pos TNI AL. Pada perkembangannya, setiap tanggal 17 alat peringatan dini tersebut diujicobakan terhitung mulai bulan Mei 2013, akan tetapi terjadi ketika akan diujicoba, terjadi kerusakan pada alat peringatan dini tersebut, yaitu di Kabupaten Ciamis terkena sambaran petir, sedangkan yang di Desa Pangandaran karena kehabisan air *accu* pada alat tersebut dan tidak terkontrol sehingga mengalami kerusakan. Setelah mengalami perbaikan, bulan berikutnya sudah mulai bisa dioperasikan kembali. Melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan upaya pemeliharaan dan pengecekan rutin terhadap alat peringatan dini tersebut.

## 5.6 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adi (2008) pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan ke dalam pemberdayaan masyarakat sebagai suatu program dan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses. Pada pemberdayaan masyarakat sebagai suatu program, menurut Adi (2008) apabila program telah selesai dilaksanakan maka pemberdayaan masyarakat dianggap telah selesai dilakukan. Berbeda halnya dengan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses, menurut Adi (2008) adalah:

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin

melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja (hal. 84).

Pemberdayaan masyarakat di Indonesia tentunya akan membahas tentang persoalan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, karena pembangunan di tingkat desa masih belum dapat dikembangkan secara optimal (Adi, 2008). Adi (2008) menyebutkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat desa dimulai dari praktik dimana kebutuhan di dalam masyarakat dalam situasi sosial yang dihadapi, terutama pada negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang cepat.

Upaya pengembangan masyarakat pada level lokal atau desa, diperlukan adanya bantuan dari tenaga kader (Adi, 2008). Menurut Adi, seorang kader bisa saja melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, dan lainnya, ketika para kader tersebut sudah mendapatkan pendidikan yang dirasakan memadai. Adapun tugas kader menurut Adi (2008) adalah :

1. Sebagai pelopor dalam pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksana dan pemelihara kegiatan program pembangunan desa
3. Menjaga terjadinya kelangsungan kegiatan
4. Membantu dan menghubungkan antara warga masyarakat dan lembaga-lembaga yang bekerja dalam pembangunan desa (hal. 279).

Konsep kader di dalam Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 adalah melalui kelompok siaga bencana atau tim relawan penanggulangan bencana. Berdasarkan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, yang dimaksud dengan kelompok siaga bencana atau tim relawan penanggulangan bencana adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan resiko bencana.

Dari segi kebijakan mengenai kelompok siaga bencana, adanya ketidakjelasan, yaitu di dalam Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 pada bagian “peran pemangku kepentingan non-pemerintah dan masyarakat” bahwa kelompok siaga bencana dibuat terlebih dahulu, baru kemudian dapat ditingkatkan menjadi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di tingkat desa. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kelompok siaga bencana dilakukan terlebih

dahulu sebagai tahapan awalnya, baru kemudian dapat ditingkatkan menjadi Forum PRB pada tingkatan desa. Berbeda halnya pada Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 bagian “Pembentukan Forum PRB desa/kelurahan” disebutkan bahwa desa/kelurahan membentuk Forum PRB, baru kemudian dapat membentuk kelompok siaga bencana.

Pada pelaksanaannya, fasilitasi desa tangguh bencana membentuk Forum PRB terlebih dahulu di tingkatan desa, di Desa Pananjung dan Pangandaran yaitu dibentuknya Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat, dan belum membentuk kader tanggap bencana. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana yang dilakukan adalah baru dilaksanakan pada tingkatan desa, dan pada pelaksanaannya dari tingkatan desa sendiri belum menyentuh pemberdayaan masyarakat ke level masyarakat pada umumnya, sehingga dapat dilihat bahwa “kader tanggap bencana” yang berdasarkan pengurus FKDM ataupun “kelompok siaga bencana” berdasarkan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, belum juga terbentuk, karena memang pemberdayaan masyarakat tersebut berhenti di tingkatan desa.

Hal ini terlihat misalnya pada fasilitasi desa tangguh bencana dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung, pembentukan kader tanggap bencana masih pada tahap rencana, hal ini dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan US yang menyatakan bahwa “nantinya kita akan membentuk kader tanggap bencana” dan juga seperti yang diungkapkan oleh DH dari Desa Pananjung misalnya, masyarakat di Desa Pananjung juga ada yang mau bekerja secara sukarela di dalam kegiatan-kegiatan seperti penanggulangan bencana, tetapi memang jumlahnya tidak banyak dan juga banyaknya yang ingin ikut serta dengan dorongan ekonomis yaitu alasan untuk mendapatkan uang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, karena kader memang merupakan tenaga sukarela dari masyarakat setempat, Adi (2008) menjelaskan bahwa kader perlu memiliki kesadaran diri dan merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat dan juga mempunyai jiwa sukarela dalam memberikan bantuan terhadap sesama.

Di dalam Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa kriteria dari kelompok siaga bencana adalah:

1. Kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana,
2. Pada saat tidak terjadi bencana, kelompok siaga bencana menjadi pendorong upaya-upaya pengurangan resiko bencana,
3. Anggota kelompok siaga bencana dapat berasal dari Forum PRB Desa/Kelurahan, namun lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang siap sedia menjadi relawan bencana.

Melihat dari pemberdayaan masyarakat dalam desa tangguh bencana yang telah dilakukan ternyata baru pada level desa saja, maka sangat penting untuk mengembangkannya kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga perlu untuk membentuk kader tanggap bencana atau kelompok siaga bencana di masyarakat. Hal yang selalu penting untuk diperhatikan adalah pengembangan kapasitas kemampuan dan keterampilan para kader di dalam persoalan bencana, sehingga kader-kader tersebut merupakan modal manusia dalam masyarakat, apalagi bila pemberdayaan masyarakat tersebut dilihat sebagai suatu proses yang berkelanjutan.

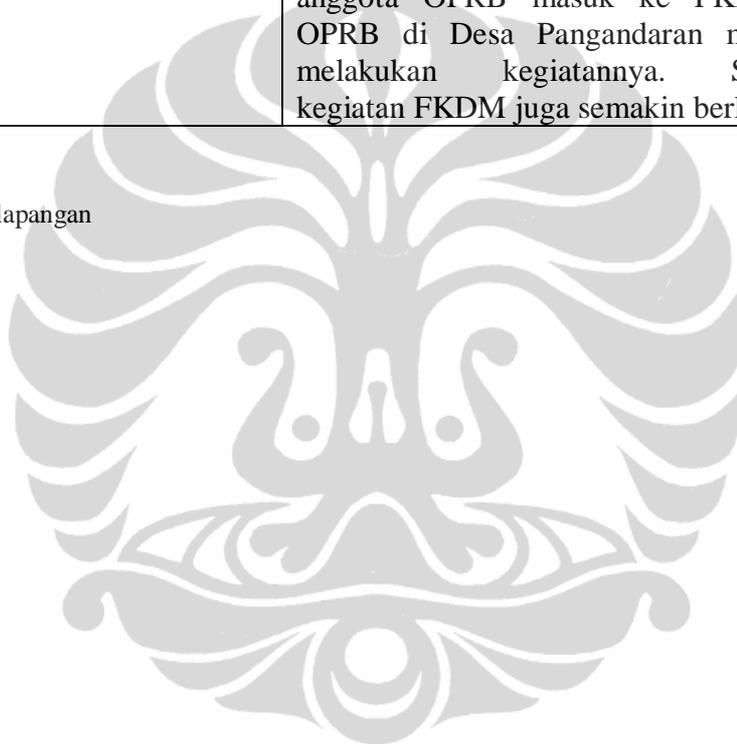
Tabel 5.1. Rangkuman Hasil dan Pembahasan Penelitian

No	Komponen	Penjelasan
1	Pemerintah	Juknis desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2012 meringkas fasilitasi desa tangguh bencana dengan output 9 indikator. Draft dokumen perencanaan masih dalam proses untuk mengintegrasikan ke dalam peraturan desa.
2	Assesmen resiko	Sudah mempunyai peta kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. Akan tetapi belum terpublikasikan kepada masyarakat yang lebih luas.
3	Pendidikan dan pengetahuan	Sudah direncanakan untuk membuat kader tanggap bencana di tingkat RT, dan juga di kader dari pegawai hotel dan pelaku dunia usaha lainnya. Namun karena keterbatasan kebanyakan bersifat informal, informasi ke masyarakat yang lebih luas melalui obrolan warung kopi. Sehingga belum dapat memberdayakan masyarakat yang lebih luas dan hanya berhenti di tingkatan aparat desa saja. Untuk kegiatan pelatihan di luar Pangandaran atau Pananjung yang di selenggarakan oleh BNPB, BPBD Provinsi, atau BPBD Kabupaten, hanya 1 orang yang aktif mengikutinya yaitu SA dari Desa Pangandaran.
4	Manajemen resiko dan pengurangan kerentanan	Perlindungan sosial yang diselenggarakan di Desa Pananjung masih belum mengalokasikan secara khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana, sehingga dana 5 juta pertahun masih menyatu pada dana kelembagaan sosial, padahal di Desa Pananjung rutin terkena bencana banjir setiap tahunnya. Desa Pangandaran sudah mulai mengalokasikan dana penanggulangan bencana sejak 3 tahun yang lalu dengan kisaran sebesar 5 juta pertahun. Untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan telah ada kegiatan seperti penanaman pohon, bersih-bersih pantai, sehingga kegiatan tersebut perlu dilakukan secara rutin.

(Sambungan)

5	Kesiapsiagaan dan respon bencana	<p>Sistem peringatan dini mulai diujicobakan setiap tanggal 17 sejak Mei 2013, akan tetapi karena alat peringatan dini tersebut rusak akhirnya gagal diujicobakan. Pada bulan berikutnya alat tersebut sudah rutin diujicobakan.</p> <p>Terdapat dua organisasi yaitu OPRB dan kemudian FKDM. Di Desa Pananjung beberapa anggota OPRB masuk ke FKDM, di Desa Pangandaran meskipun beberapa anggota OPRB masuk ke FKDM tetapi OPRB di Desa Pangandaran masih aktif melakukan kegiatannya. Selanjutnya kegiatan FKDM juga semakin berkurang.</p>
---	----------------------------------	--

Sumber: temuan lapangan



## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Dalam hal menuju masyarakat tangguh bencana, aspek pemerintah merupakan bagian terpenting, karena merupakan penggerak dalam hal kebijakan, perencanaan, dan inisiatif lainnya yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana. Fasilitasi desa tangguh bencana yang dilaksanakan di pada bulan September 2012 di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan desa dalam pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat.

Kebijakan desa tangguh bencana adalah melalui Perka BNPB No 1 tahun 2012, tetapi dalam pelaksanaannya mengacu pada Juknis Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tahun 2012, dimana pencapaiannya adalah minimal 5 indikator terpenuhi dari 9 indikator desa tangguh bencana. Dari fasilitasi desa tangguh bencana di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung, indikator-indikator tersebut dapat terpenuhi, karena kegiatan partisipatif seperti pemetaan kapasitas, resiko dan acaman bencana dapat terpenuhi, draft perencanaan telah tersusun, dan forum bernama FKDM telah terbentuk, adapun fasilitasi berupa sistem peringatan dini dan pola ketahanan ekonomi telah diberikan.

Salah satu upaya menuju desa tangguh bencana yang dilakukan adalah integrasi draft dokumen perencanaan (aksi komunitas, penanggulangan bencana, dan kontijensi) hasil dari kegiatan fasilitasi desa tangguh ke dalam peraturan desa. Meskipun demikian, ternyata upaya yang dilakukan masih mengalami kendala misalnya yang terjadi di Desa Pangandaran, hanya ada SK yang berkaitan dengan FKDM, sedangkan draft dokumen masih dalam proses dan belum dijadikan peraturan desa. Untuk di Desa Pananjung telah ada SK tentang Penanggulangan Bencana, tetapi rencana aksi komunitas dan rencana kontijensi masih berupa draft yang dilampirkan di dalam SK tentang Penanggulangan Bencana.

Assesmen resiko dilaksanakan melalui kegiatan pemetaan pasrtisipatif, dari peta tersebut berupaya menyatukan tiga aspek penting yaitu kapasitas, kerentanan, dan bahaya bencana. Namun demikian, peta tersebut belum terpublikasikan kepada masyarakat yang lebih luas baik itu di Desa Pananjung maupun di Desa Pangandaran.

Dalam aspek pendidikan dan pengetahuan, baik itu yang diselenggarakan di dalam maupun di luar, perlu adanya keaktifan dan kordinasi yang baik dari berbagai pihak, khususnya FKDM. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sumberdaya FKDM dan masyarakat Desa Pananjung dan Desa Pangandaran.

Manajemen resiko dan pengurangan kerentanan yang telah ada di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung terdapat dalam berbagai kegiatan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan telah ada seperti bersih-bersih pantai dan juga penanaman pohon, tetapi masih kurang dilaksanakan secara rutin. Untuk perlindungan sosial, Di Desa Pangandaran sudah dimulai, dengan megalokasikan minimal 5 juta, sedangkan di Desa Pananjung masih dicampur di dalam dana kelembagaan sosial.

Pada kesiapsiagaan dan respon bencana, di Desa Pananjung ternyata ada bencana yang rutin yaitu banjir, sehingga aparat desa, FKDM Desa Panjung dan masyarakat sudah semestinya aktif dalam kegiatan kesiapsiagaan dan respon bencana. Selain itu juga, mestinya mengupayakan perbaikan saluran air yang ada di sumber-sumber banjir tersebut. Untuk sistem peringatan dini hingga saat ini baru ada di Desa Pangandaran, dan secara rutin mulai diujicoba setiap tanggal 17. Tanggal 17 merupakan peristiwa bencana tsunami pangandaran yang terjadi di tahun 2006.

Adanya dua organisasi penanggulangan bencana di tingkat desa, yaitu OPRB dan kemudian FKDM. Perka BNPB No 1 tahun 2012 sendiri mensyarakatkan bahwa memang pilihan apakah akan mengembangkan forum yang sudah ada, atau membentuk yang baru, namun BPBD Provinsi Jawa Barat mengamanatkan berdirinya FKDM mengacu kepada Perda Provinsi Jabar tentang Penanggulangan

bencana. Sehingga keberadaan OPRB dan FKDM ada di Desa Pananjung maupun di Desa Pangandaran. OPRB Desa Pangandaran dapat dikatakan lebih aktif dibandingkan dengan FKDM Pangandaran. Kalau melihat OPRB di Desa Pananjung sudah tidak aktif lagi, dan beberapa anggotanya masuk ke FKDM.

Intensitas kegiatan FKDM di Desa Pananjung maupun di Desa Pangandaran setelah fasilitasi yang diadakan BPBD semakin menurun, pertemuan rutin dan agenda yang disusun saat fasilitasi desa tangguh bencana tidak dapat terpenuhi, hal ini karena beberapa pengurus intinya aktif di berbagai kegiatan desa dan organisasi profesi lainnya, sehingga tidak dapat fokus dalam mengembangkan FKDM, juga adanya alasan utama yaitu minimnya dana untuk kegiatan FKDM.

Hal yang paling penting diperhatikan adalah masih kurangnya upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih luas, fasilitasi desa tangguh bencana dapat dikatakan hanya berhenti pada tingkat aparat desa dan organisasi tingkat desa saja, masyarakat yang lebih luas sebetulnya perlu pemberdayaan melalui adanya kader-kader tanggap bencana.

## 6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, saran dari penelitian ini adalah :

1. Mengintegrasikan dokumen perencanaan penanggulangan bencana, rencana aksi komunitas, dan perencanaan kontijensi ke dalam peraturan desa.
2. Mempublikasikan peta kapasitas, kerentanan, dan bahaya bencana di titik-titik yang dapat diakses oleh masyarakat ataupun wisatawan di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung.
3. Perlu adanya kebijakan desa yang mengalokasikan dana khusus untuk penanggulangan bencana, seperti yang telah dilakukan di Desa Pangandaran.

4. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dengan aktif mengikuti pelatihan baik di dalam maupun di luar, dan juga merealisasikan kader tanggap bencana atau kader siaga bencana yang telah direncanakan, dengan sasaran pelaku usaha/pegawai hotel, dan juga kader hingga tingkat RT. Sehingga upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya berhenti sampai di tataran aparat desa saja, tetapi juga harus direalisasikan hingga pemberdayaan ke tingkat masyarakat yang lebih luas.
5. Perlu adanya kegiatan lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam yang rutin, sehingga kebersihan lingkungan dan kelestarian ekosistem dapat terjaga. Mengingat salah satu objek wisata yang ada di Desa Pangandaran adalah kawasan hutan cagar alam.
6. Perlu pertimbangan yang matang mengenai keberadaan OPRB disamping FKDM, apakah memang sebaiknya dilebur kedalam FKDM atau dibiarkan berdiri sendiri, tentunya melihat intensitas kegiatan dan keuntungan yang diperoleh di desanya masing-masing. Disamping itu, perlu untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan pertemuan rutin FKDM.
7. Untuk saran pada penelitian selanjutnya, mengingat bahwa cakupan studi ketangguhan masyarakat terhadap bencana cukup luas, ada baiknya untuk meneliti aspek yang lebih khusus mengenai komponen desa tangguh bencana yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial: Pengantar pada pengertian dan beberapa pokok bahasan*. Depok: Fisip UI Press.
- . (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: Dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: Fisip UI Press.
- . (2008). *Intervensi komunitas: Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ayawaila, Gerzon R. (2008). *Dokumenter: Dari ide sampai produksi*. Jakarta: FFTV-IKJ Press.
- Buckle, Philip. (2006). Assessing Social Resilience. In Paton, Douglas., and Johnston, David (Ed). *Disaster resilience: An integrated approach* (pp 88-104). Illinois: Charles C Thomas Publisher.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Coppola, Damon P. (2007). *Introduction to international disaster management*. United States: Butterworth-Heinemann.
- Dominelli, Lena. (2012). *Green social work: From environmental crises to environmental justice*. Cambridge: Polity Press.
- Hogan, Christine. (2002). *Understanding facilitation: Theory and principles*. London: Kogan Page.
- Kirst-Ashman, Karen K. (2010). *Introduction to social work and social welfare: Critical thinking perspectives*. Belmont: Brooks/Cole Cengage Learning.
- Maarif, Syamsul. (2012). *Pikiran dan gagasan penanggulangan bencana di indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Neuman, M. Lawrence. (2006). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Boston: Pearson.
- Paul, Bimal Kanti. (2011). *Environmental hazards and disasters: Contexts, perspectives and management*. West Sussex: Wiley-Blackwell.

Ritter, J.A., Vakalahi, H.F.O., & Kiernan-Sterm, M.. (2009). *101 Careers in social work*. New York: Springer.

Soetomo. (2011). *Pemberdayaan masyarakat: Mungkinkah muncul antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Twigg, John. (2007). *Characteristics of a disaster-resilient community*. UK: Interagency Group.

### **Serial:**

Koordinasi, Tantangan dalam Penanggulangan Bencana. (2012, Mei). *Gema BNPB*, 24-27.

Morin, Julie., De Coster, Benjamin., Paris, Raphael., Lavigne, Franck. Flohic, Francois., and Le Floch, Damien. (2008). Tsunami-resilient communities development in Indonesia through educative actions lessons from the 26 december 2004 tsunami. *Disaster Prevention and Management: An International Journal (Social perspectives on disasters in Southeast Asia)*, 17, 430-446.

Norris, Fran H., Stevens, Susan P., Pfefferbaum, Betty., Wyche, Karen F., and Pfefferbaum, Rose L. (2008). Community resilience as a methapor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41, 127-150.

### **Publikasi Elektronik:**

Analisa. (2012, 18 Juni). BNPB siapkan desa tangguh kurangi risiko bencana. Februari 21, 2013.

[http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/18/57209/bnpb\\_siapkan\\_desa\\_tangguh\\_kurangi\\_risiko\\_bencana/#.UScUETd3Cho](http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/18/57209/bnpb_siapkan_desa_tangguh_kurangi_risiko_bencana/#.UScUETd3Cho).

Gitews. (2010). Peta bahaya tsunami ciamis. November 23, 2012.

[http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E1/sumber\\_lainnya/peta\\_bahaya/jawa\\_ciamis/Peta%20Bahaya%20Tsunami%20-%20Ciamis.pdf](http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E1/sumber_lainnya/peta_bahaya/jawa_ciamis/Peta%20Bahaya%20Tsunami%20-%20Ciamis.pdf)

Infojabar. (2012, 4 September). Pangandaran akan menjadi desa tangguh bencana. Februari 21, 2013. <http://www.infojabar.com/2012/09/pangandaran-akan-menjadi-desa-tangguh.html>

- Kabar Priangan. (2012, 29 Februari). BPBD primadona studi banding. September 28, 2012. <http://www.kabar-priangan.com/news/detail/3235>
- Pikiran Rakyat. (2011, 10 November). Ciamis kembangkan pembangunan berbasis mitigasi bencana. November 19, 2012. <http://www.pikiran-rakyat.com/node/165211>
- Rekompak Cipta Karya. (2012, 25 Januari) . Pelatihan exit strategi rekoopak di kabupaten ciamis 18 – 19 januari 2012. November 19, 2012. <http://rekoopakciptakarya.org/news/2012/01/279/>
- Rerkompak-JRF. (2011, 04 Februari). Wakil Bupati Ciamis: Rekoopak-JRF akan kami jadikan model pembangunan desa berbasis masyarakat. Maret 16, 2013. <http://www.rekoopakjrf.org/?act=isiberita&id=257>

### **Skripsi dan Tesis:**

- Alhadi, Zikri. (2011). *Upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami: suatu studi manajemen bencana*. Depok: FISIP UI.
- Fitrintia, Irene Sondang. (2011). *Strategi adaptasi komunitas pesisir terhadap pengelolaan bencana: Studi kasus komunitas muara baru dan kawasan pluit terhadap banjir di DKI Jakarta*. Depok: FISIP UI.
- Laksono, P.M. (1980). *Pengambilan keputusan bertransmigrasi: Kasus daerah terancam bencana alam gunung merapi*. Depok: FISIP UI.
- Steven. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanganan pra bencana kebakaran di tingkat komunitas (studi kasus pada Masyarakat RW 02, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat)*. Depok: FISIP UI.
- Yadrison. (2003). *Implementasi fungsi program penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat*. Depok: FISIP UI.

### **Dokumen:**

- Bappenas. (2006). *Identifikasi program/kegiatan dan usulan pendanaan dalam rangka rehabilitasi wilayah pasca gempa bumi dan tsunami Pangandaran dan sekitarnya*. Jakarta: Bappenas.

- . (2009). *Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di provinsi jawa barat dan kabupaten cilacap provinsi jawa tengah*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas dan BNPB. (2010). *Rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana 2010 – 2012*. Jakarta: Bappenas dan BNPB.
- Bappenas dan UNDP. (2007). *Panduan untuk fasilitator infomobilisasi: Teknik fasilitasi partisipatif pendampingan masyarakat*. Jakarta: Pe-PP, Bappenas-UNDP.
- BNPB. (2011). *Indeks rawan bencana indonesia*. Jakarta: BNPB.
- . (2010). *Rencana nasional penanggulangan bencana 2010 – 2014*. Jakarta: BNPB.
- BPS Kabupaten Ciamis, dan Bappeda Kabupaten Ciamis. (2011). *Ciamis dalam angka 2011*. Ciamis: BPS dan Bappeda Kabupaten Ciamis.
- Desa Pangandaran. (2011). *Profil Desa Pangandaran*.
- Desa Pananjung. (2012). *Profil Desa Pananjung*.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. (2010). *Pedoman pengorganisasian pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat*. Jakarta: NMC Rekompak-JRF.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2013). *Laporan pertanggungjawaban bupati kabupaten ciamis tahun 2012*. Ciamis: Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Rekompak-JRF. (2012). *Kegiatan pengurangan bencana Rekompak-JRF DMC Pangandaran Kabupaten Ciamis*.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis tahun 2005 Sampai dengan Tahun 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012  
Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Petunjuk Teknis Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana tentang Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat  
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2012.

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Ciamis 2012 –  
2012.

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis 2012 – 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang  
Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang  
Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat.

**Keputusan:**

Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor: 360/13.Kpts/Desa/2012 tentang  
Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat Desa Pangandaran.

Keputusan Kepala Desa Pananjung Nomor 4 tahun 2012 tentang Penanggulangan  
Bencana di Desa Pananjung.

## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Penelitian	Kerangka Pembahasan	Informasi	Teori	Informan
Pelaksanaan fasilitasi desa tangguh bencana di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran	<b>Pemerintah</b>	<p>Kebijakan desa tangguh bencana</p> <p>Model fasilitasi desa tangguh bencana</p> <p>Output fasilitasi desa tangguh bencana</p> <p>Upaya integrasi ketangguhan bencana kedalam perencanaan dan kebijakan desa</p>	<p>Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat (Hogan, Adi)</p> <p><i>Disaster Resilience community</i> (Twigg, Morin et al, )</p> <p>Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana tahun 2012</p> <p>Petunjuk Teknis Desa Tangguh Bencana Tahun 2012</p> <p>Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>	<p>Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB</p> <p>Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ciamis</p> <p>Aparat Desa Pananjung dan Pangandaran</p>

	<b>Data dan assesmen resiko</b>	Data dan assesmen bahaya/resiko.  Data dan assesmen Kerentanan/kapasitas	<i>Disaster Resilience community</i> (Twigg, Morin <i>et al,</i> )  Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana tahun 2012  Petunjuk Teknis Desa Tangguh Bencana Tahun 2012	Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ciamis  Aparat Desa Pananjung dan Pangandaran  Relawan FKDM Desa Pangandaran dan Desa Pananjung
	<b>Pendidikan dan pengetahuan</b>	<i>Publik awareness</i> , pengetahuan, dan keahlian  Manajemen informasi dan sharing  Pendidikan dan pelatihan  Budaya, perilaku, motivasi	Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat (Hogan, Adi)  <i>Disaster Resilience community</i> (Twigg, Morin <i>et al,</i> )  Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana tahun 2012  Petunjuk Teknis Desa Tangguh Bencana Tahun 2012	Aparat desa Pangandaran dan Pananjung  Relawan FKDM Desa Pangandaran dan Desa Pananjung

	<b>Manajemen resiko dan pengurangan kerentanan</b>	Manajemen sumberdaya alam dan lingkungan  Perlindungan sosial	<i>Disaster Resilience community</i> (Twigg, Morin <i>et al,</i> )  UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana	Aparat desa Pangandaran dan Pananjung  Relawan FKDM Desa Pangandaran dan Desa Pananjung
	<b>Kesiapsiagaan dan respon bencana</b>	Kapasitas organisasi dan koordinasi  Sistem peringatan dini  Kesiapsiagaan dan perencanaan kontinjensi  Respon kedaruratan dan pemulihan  Partisipasi dan kerelawanan	Manajemen bencana (Coppola, Paul)  <i>Disaster Resilience community</i> (Twigg, Morin <i>et al,</i> )  UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana  Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ciamis  Aparat desa Pangandaran dan Pananjung  Relawan FKDM Desa Pangandaran dan Desa Pananjung

## PEDOMAN OBSERVASI

No	Komponen	Informasi	Keterangan
1	Sarana dan prasarana umum	Sarana dan prasarana umum yang berada di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran Kabupaten Ciamis yang mendukung desa tangguh bencana.	Gedung/bangunan fasilitas umum yang mendukung desa tangguh bencana.
2	Infrastruktur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana	Infrastruktur yang ada di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran Kabupaten Ciamis yang mendukung desa tangguh bencana	Sistem peringatan dini bencana, jalur evakuasi.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode	Pertanyaan	Informasi	Keterangan
A	Pemerintah	<p>Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB</p> <p>Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ciamis</p> <p>Aparat Desa Pananjung dan Pangandaran</p>	
A.1.	Kebijakan desa tangguh bencana	<p>Desa tangguh bencana dimulai pada tahun 2011 dan dilaksanakan di 33 Provinsi. Pada tahun 2011 kegiatan desa tangguh bencana masih belum memiliki dasar Perka BNPB, sehingga kegiatan tersebut masih tercakup ke dalam 3 besaran kegiatan yaitu: Sosialisasi PRB, Desa Tangguh bencana, gladi dan renkon. Pada tahun 2011, pelaksanaan desa tangguh bencana daerah Jawa Barat dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat. Pengembangan dan penyempurnaan dilakukan pada tahun 2012, desa tangguh bencana dilaksanakan di 21 Provinsi dengan tema daerah yang terkena dampak tsunami. (PT, 22 Maret 2013)</p> <p>Ini merupakan program nasional. Penentuannya dari pusat berdasarkan kejadian dan laporan dari daerah. Seperti ini misalnya, katakanlah BPBD Provinsi atau nasional sudah mengetahui bahwa telah terjadi bencana tsunami, kemudian NGO-NGO yang masuk nasional sudah mengetahui, berarti ini untuk di Jawa Barat <i>pilot project</i>, katakanlah Ciamis udah memenuhi syarat. (HY, 26 Maret 2013)</p> <p>Kalau untuk desa tangguh, pertama kami di daerah kan belum ada kemampuan, masih disubsidi program, itupun kan baru programnya dari pencegahan dan</p>	

		kesiapsiagaan, direktorat yah, dari direktorat pencegahan dan kesiapsiagaan, dari BNPB. Walaupun kami yang mengusulkan tapi tetap harus melalui <i>leading</i> sektor Provinsi, jadi untuk saat ini desa tangguh itu baru programnya melalui BNPB, itu ada Perkanya No 2 kalo enggak salah tahun 2012. Provinsi juga masih bantu, itu pun melalui provinsi, jadi melalui provinsi itu hirarkis pemerintahan. Jadi habis desa tangguh udah bagus, ada struktur organisasinya di lapangan yaitu FKDM, ini merapat di Desa. Kalo desa tangguh itu saja kan memang tapi untuk menindaklanjuti, nah di Provinsi itu ada Perdanya No. 2 tahun 2010, di dalam Pasal 95, itu diamanatkan adalah FKDM (Forum Kesiapan Dini Masyarakat), nah makanya dipadukan itu. (AT, 2 April 2013)	
A.2.	Model fasilitasi desa tangguh bencana	Pelaksanaan desa tangguh terdapat dua besaran pertemuan, yaitu Pertemuan kesatu dilaksanakan di Kabupaten, diikuti oleh Provinsi dan Kabupaten, dan serta perwakilan dari dua desa/kelurahan. Pertemuan kedua dilaksanakan di desa/kelurahan. Fasilitator kegiatan tersebut 4 orang yang terdiri: 2 orang dari BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten, 2 orang dari LSM/NGO dan Universitas Lokal. Pertemuan di desa tersebut dilakukan selama 5 kali dalam 3 hari, jadi dilakukan di tiap desa sebanyak 5 kali, masing-masing pertemuan 3 hari. Dengan capaian target di Bulan Desember harus sudah selesai. (PT, 22 Maret 2013)	
A.3.	Output fasilitasi desa tangguh bencana	Di dalam pertemuan itu untuk mendapatkan 9 indikator, untuk tahun 2012 desa tangguh yang sudah ada Perka BNPB, karena Perka BNPB tersebut masih baru sehingga Provinsi boleh dari 9 indikator tersebut minimal terdapat 7 indikator, di Jawa Barat telah mencapai 7 indikator. (PT, 22 Maret 2013)  Jadi ada 9 indikator yang harus dipenuhi atau minimalnya 5 indikator, itu jadi kriteria-kriteria tersebut sudah masuk kepada desa tangguh itulah nanti. Alhamdulillah 9 indikator tadi terpenuhi. Nah membentuk dokumen, alhamdulillah	

		<p>itu, desa tangguh tersebut udah punya peta kemana harus evakuasi, kemana harus mengungsi, bilamana terjadi bencana sudah mampu gimana harus menanggulangi. FKDM ini juga bagian daripada tadi, karena dia dilatih untuk desa tangguh, pesertanya juga membentuk Forum Kesiapan Dini Masyarakat, terletak di dalam desa tersebut, bagian satu organisasi kebencanaan di desa itu. (AT, 2 April 2012)</p> <p>Kan rata-rata di sini masih baru peraturannya, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Oleh karena itu mengapa daerah peisisir itu kemarin, seperti tadi sudah pernah dipegang oleh NGO-NGO, jadi dasar-dasar penanganan bencana sudah mengetahui. Jadi dengan adanya program desa tangguh sudah tidak aneh lagi, karena tidak dari nol lagi dan sudah mengetahui dasar-dasarnya. Sosialisasi, kemudian pembentukan FKDM, dan simulasi. Penilaian indikator mungkin termasuk ke dalam sosialisasi, ditanya di desa apakah siap atau tidak, katakanlah indikator-indikator sudah terbentuk, sudah mendengarnya tidak. Kalau belum disesuaikan dengan Juklak tersebut, diikuti juklak tersebut. (HY, 26 Maret 2013)</p>	
A.4.	Upaya integrasi ketangguhan bencana kedalam perencanaan dan kebijakan desa	<p>Sebelum kegiatan sosialisasi di desa, belum ada Perdes yang berkaitan bencana, nah didorong untuk memenuhi indikator-indikator tersebut. Setelah kegiatan, Perdesnya waktu kemarin kegiatan sosialisasi mah belum ada. (HY, 26 Maret 2013)</p> <p>Adapun berkaitan draf-draf setelah terbentuknya kepengurusan FKDM ini tentunya dari Desa Pananjung sudah membentuk surat keputusan itu surat keputusan Kepala Desa Pananjung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis tahun 2012 sampai tahun 2017. Draft-draft ini ada terlampir mungkin dalam buku dokumen ini yang mungkin nanti bisa di <i>copy</i> ataupun apa yang dibutuhkan oleh bapak silahkan dengan catatan saya mohon agar bisa dipertanggung jawabkan kemudian. (MG, 30 Mei 2013).</p>	

		<p>Untuk pemerintah itu kan diharapkan bahkan diharuskan membuat suatu kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan desa. Memang ketentuan-ketentuan itu, kebijakan itu belum ditetapkan. Kami nantinya akan berpijak dari sana, kebijakan pemerintah desa yang pertama untuk sekarang kita sudah 3 tahun ini masukkan dalam anggaran, baik kegiatan organisasi maupun membuat dana cadangan untuk penanggulangan kebencanaan. Pengalaman dulu kan ketika terjadi bencana, karena tidak disiapkan dananya. Minimal untuk penanggulangan awal kita udah siapkan dananya. Kita sudah itu kebijakan anggaran. Untuk kepentingan kegiatan organisasi juga ada dana disiapkan untuk apabila terjadi bencana tersebut. (US, 10 Mei 2013)</p>	
<b>B</b>	<b>Data dan assesmen resiko</b>	<p>Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ciamis</p> <p>Aparat Desa Pananjung dan Pangandaran</p> <p>Relawan FKDM Desa Pangandaran dan Desa Pananjung</p>	
B.1.	Data dan assesmen bahaya/resiko.	<p>Kabupaten Ciamis alhamdulillah sudah masuk di dalam pembangunan PRB ini yah. Masuk di dalam RTRW sudah diamanatkan, jadi tidak semena-mena membuat usulan infrastruktur tanpa ada analisis resiko. Nah apa itu analisis resiko bencana, ya perizinan itu jangan hanya IMB begitu saja, tidak. Apalagi alih fungsi sawah, hutan jadi pasar, sawah jadi bangunan, betul-betul dianalisis atau kajian lingkungan hidupnya, amdalnya, barulah dikeluarkan. Nah berbagai aspek ini jangan ayeuna membuat bangunan menjadikan bencana. (AT, 3 Juni 2013)</p> <p>Agenda untuk Forum Kesiapsiagaan di desa ini adalah yang pertama peta rawan bencana dan jalur evakuasi itu sendiri, yang kedua adalah gambaran umum istilahnya profil dan tindakan pada saat terjadinya bencana. Di kita ada saluran atau anak kali, namanya anak kali Cikidang hanya kelemahan di kita ada saluran air tapi tidak ada normalisasinya, itu sudah berkali-kali kita ajukan pak ke tingkat pusat dan</p>	

		<p>provinsi dan menjadi prioritas utama, nah jadi manakala warga kita sudah diberikan pembekalan minimalnya ilmu pengetahuan hanya saja tanpa didukung dengan adanya realisasi visi itu sama saja, akan selalu begitu dan begitu. (MG, 30 Mei 2013)</p> <p>Kalau disini ketinggian gelombangnya tidak begitu tinggi, paling hanya sampe 30 meter. Saya waktu terjadi tsunami kebetulan posisinya ketika itu ada di pasar mambo, perapatan, disini ada jalan tembus dari pantai barat ke pantai timur, dari pantai itu hanya 150 meter. Di desa pangandaran ini sebagian besar di pinggir-pinggir pantainya itu bangunan-bangunan yang kokoh, sehingga setelah menyentuh bangunan itu air laut kembali lagi. Kemudian di pinggir pantai setelah tsunami itu kan dibangun pengamanan-pengamanan dan pemecah gelombang. (US, 10 Mei 2013)</p>	
B.2.	Data dan assesmen Kerentanan/kapasitas	<p>Karena kapasitas kapabilitas masyarakat baik stakeholder desa belum tahu gimana, makanya peran serta masyarakat diaktifkan. Siapa yang kena korban bencana jadi jangan salah sasaran, harus tepat sasaran. Penguatan kapasitas relawan-relawan di Ciamis itu kan dari PRB tadi untuk menuju desa tangguh. (AT, 3 Juni 2013)</p> <p>Kita juga harus menginventarisir data-data, karena langkah yang harus kita lakukan harus sesuai dengan kondisi wilayah, jumlah penduduknya berapa sampai pada usia juga diperhitungkan, evakuasinya nanti itu sesuai dengan potensi kependudukan yang ada. Pengusaha juga siap membantu penanggulangan bencana, salah satunya fasilitas yang mereka miliki silahkan apabila diperlukan, seperti hotel 3 lantai mereka siap dijadikan salah satu tempat evakuasi. Kita hanya sampai survei saja hotel yang mana yang layak dan siap, kemudian ada petanya, tadinya akan kita lanjutkan dengan perjanjian/MoU dengan mereka pengusaha, belum dilakukan baru proses. (US, 10 Mei 2013)</p>	

		<p>Masyarakat pangandaran pada umumnya itu megandakan pantai, mengandakan pantai dalam hal ini mengandakan libur-liburan sekolah, ataupun libur secara rutin seperti hari sabtu minggu, apalagi libur-libur nasional yang skala besar, seperti tahun baru, idul fitri ya bapak boleh cek sendirilah itu pasti biasanya pedagang bukannya berkurang tetapi justru bertambah lebih besar. Jadi secara tidak langsung mengurai panorama keindahan pantai karena berdiri disana tenda-tenda biru dan PKL-PKL. Sebetulnya dulu pesisir pantai pangandaran sepanjang wilayah pantai itu banyak pohon-pohon besar, mangrove, ketapang, itu kan lumayan ya, minimalnya ya agak tahan lah terhadap ombak begitu. Kebetulan setelah kita mendapatkan pengetahuan dari BPBD, kita lakukan sosialisasi kepada mereka-mereka yang hotelnya fisiknya baguslah begitu. Kita berupaya kerjasama pak dengan pengusaha, diantaranya Hotel Surya Pesona, Hotel UNI Beach, Hotel Sandaan, banyak pak lah yang jelas hotel-hotel besar yang berada di sekitaran pantai. (MG, 30 Mei 2013)</p>	
<b>C</b>	<b>Pendidikan dan pelatihan</b>	<p>Aparat desa Pangandaran dan Pananjung</p> <p>Relawan FKDM Desa Pangandaran dan Desa Pananjung</p>	
C.1.	<i>Publik awareness, pengetahuan, dan keahlian</i>	<p>Informasi bencana setelah terjadi tsunami pangandaran itu memang banyak sih, media-media yang menginformasikan penanggulangan bencana. Mereka mungkin sudah pada tahu bagaimana cara menghadapi bencana dan kebetulan di kita sudah terjadi bencana itu dan pengalaman mereka sudah punya pengetahuan. Di Pangandaran itu yang perlu diselamatkan itu bukan hanya penduduk pangandaran saja, tapi juga pendatang yang kemungkinan wisatawan itu mereka mungkin dengan tsunami tidak seperti warga kita. Makanya disini cukup diperhatikan oleh pemerintah. (US, 10 Mei 2013)</p> <p>Karena memang secara tidak langsung masyarakat sudah pintar sendiri, dengan kejadian yang pernah terjadi di daerah lain, tidak mungkin masyarakat akan</p>	

		<p>mengasingkan diri, tapi akan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Karena di tempat lain sudah pernah terjadi, seperti halnya di Aceh gitu kan masyarakat pergi ke tempat yang tinggi, jadi karena masyarakat sudah pintar nyarinya ke tempat yang lebih tinggi. Mesjid Agung memang tempatnya lebih tinggi dan Desa Purbahayu datarannya memang lebih tinggi. (MG, 30 Mei 2013)</p>	
C.2.	Manajemen informasi dan sharing	<p>Berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat sebelum kita menghadapi bencana kita kasih pemahaman dulu bagaimana jika terjadi dan apa yang akan kita lakukan minimalnya ya pada saat terjadi kita tidak panik dan mengutamakan keluarga ataupun nyawa kita sendiri dulu, selanjutnya setelah kita selamat baru kita upayakan bersama-sama menolong dengan masyarakat. (MG, 30 Mei 2013)</p> <p>Itu memang konsep-konsep kita untuk penanggulangan bencana salah satunya adalah membentuk kader-kader di bawah supaya mereka bisa ikut paling tidak menginformasikan tentang bencana terhadap masyarakat luas. Melalui sosialisasi, ini menjadi program FKDM untuk membentuk kader-kader di masing-masing RT, disini ada 45 RT dan 9 RW. Rencana kita selain ke RT-RT, juga FKDM merencanakan untuk adanya pengkaderan di perusahaan-perusahaan. Paling tidak satu hotel atau satu perusahaan ada kader, jadi di setiap perusahaan ada orang yang terlatih sebagai kader penanggulangan bencana. (US, 10 Mei 2013)</p>	
C.3.	Pendidikan dan pelatihan	<p>Kalo kemaren kegiatannya ya itu kegiatan-kegiatan disiplin ala militer, kesalahan sedikit <i>pushup</i> dsb. Dilaksanakan 5 hari kalo enggak salah. Lima hari dengan kegiatan hampir subpokoknya itu sama kan relawan, dari Rekompak, PNPM, organisasi UN dsb, banyaklah ke Pangandaran memberi bekal seperti itu, dan orang yang direkrutnya itu-itu juga, jenuh gitu materina. (DH, 27 Maret 2013)</p> <p>Sementara ini dari kita melakukan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana dari</p>	

		<p>BPDB Provinsi dan Kabupaten pada saat tahun 2012 sampai saat ini belum ada lagi, sebetulnya kita harapkan, harapannya gini setelah kita dibekali dan di bentuk minimalnya kita akan melangkah apalagi nih selain agenda-agenda rutin yang sudah ada di kita, jadi minimalnya tetep ada dukungan dan motivasi dari badan yang ada setingkatnya lah yang lebih atas harusnya begitu sih jadi istilahnya bukan independenlah begitu. (MG, 30 Mei 2013)</p> <p>Kegiatan agak sering setelah terbentuknya BPBD, 3 bulan sekali mah ada lah. Kita masukkan dalam anggaran, kita menyiapkan dana untuk kegiatan-kegiatan, seperti sekarang ada pelatihan untuk transport kita kasih, seperti ada pertemuan atau kegiatan-kegiatan. Kegiatan yang diikuti terutama kegiatan yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten maupun Provinsi. (US, 10 Mei 2013)</p> <p>Penyelenggaraan fasilitasi desa tangguh oleh BPBD kalau tidak salah 4 hari. Dari pagi sampai sore, kadang-kadang dipadatkan. Memang ada kesepakatan belajar, ada kontrak belajar, hp silent. Saya nilai baguslah nya. Setelah desa tangguh, ada program pelatihan di Bandung tapi khusus untuk ketua saja, berarti ketua FKDM Desa Pananjung dan Ketua FKDM Desa Pangandaran. Karena tidak ada yang bersedia, akhirnya saya yang berangkat, FKDM Desa Pananjung juga mewakilkan pada saya. Pelatihannya 2 hari di hotel Lingga, dan 3 hari di lapangan ke arah sebelah atasnya situ Cileunca. Datang ke lokasi kondisinya hujan, kemudian disuruh mendirikan tenda maksimal 15 menit, panjang tendanya 24 meter, lebarnya 6 meter. Tendanya dua buah, terus bikin posko, pendidikan pokoknya mah. Tanggal 8 – 13 April 2013, saya mengikuti pelatihan untuk pembekalan fasilitator desa tangguh bencana yang diadakan di Hotel Gino Feruci Bandung. Nanti agenda fasilitasi desa tangguh akan dilaksanakan di 2 desa di Kecamatan Cimerak. (SA, 11 Mei 2013)</p>	
--	--	--	--

C.4.	Budaya, perilaku, motivasi	<p>Kan dulu ada rekompak, sebelum ada rekompak dsb, masyarakat udah dicekoki dengan kebohongan kebohongan semua, masyarakat dicatat didata nanti ada ini ada itu orang dari data, yang akhirnya kan males “<i>lah sina ngararumpul di Desa bohong wungkul!</i>” jadi masyarakat trauma seperti itu. Pas ada yang nyata kayak Rekompak, kayak PNPM, cuek akhirnya, setelah itu ada yang nyata baru bikin proposal dsb. Kami-kami orang yang pertama memberi penjelasan kepada masyarakat. Saya juga sempat bertanya ini nyata apa enggak, tapi nyata dan Alhamdulillah. Kan banyak yang datang sebelumnya, kita yang langsung ke masyarakat akhirnya kita yang dianggap bohong oleh masyarakat. (DH, 27 Maret 2013)</p> <p>Misalnya pada kegiatan simulasi diharapkan semua masyarakat ikut, dan kita instruksikan untuk ikut semua, supaya semua mengetahui bagaimana cara kita menghadapi bencana, tapi itulah hanya sebagian kecil saja masyarakat, bahkan yang dikerahkan mah akhirnya anak-anak sekolah. Jadi masyarakat mungkin karena keterbatasan waktu, dan kesibukan-kesibukan mereka. (US, 10 Mei 2013)</p>	
<b>D</b>	<b>Manajemen resiko dan pengurangan kerentanan</b>	<p>Aparat desa Pangandaran dan Pananjung</p> <p>Relawan FKDM Desa Pangandaran dan Desa Pananjung</p>	
D.1.	Manajemen sumberdaya alam dan lingkungan	<p>Yang biasa berjalan yang pertama gerakan membersihkan pantai, yang kedua gerakan bersih lingkungan seperti halnya kebersihan selokan ataupun daerah-daerah rawan bencana ataupun di tempat-tempat kumuh lah. Di daerah rawan bencana banjir tentunya Dusun Karangsalam RT 06 RW 05, RT 07 RW 05 dan Bojongjati RT 02 RW 06 itu sangat rawan terjadi bencana. Kegiatan bersih pantai sebenarnya sudah dari dulu sebelum saat tsunami terjadi, hanya saja dulu memang ada pohon-pohon besar disepanjang wilayah pantai pangandaran. Hanya saja mereka-mereka atas nama warga banyak yang berkepentingan, diantaranya bermacam-macam lah</p>	

		<p>ada yang mencari nafkah, mendirikan warung, segala macam, adapun dari pemerintah yang menghimbau untuk membangun taman dan segala macam. Jadi terjadi disana pak penebangan besar-besaran dalam artian pohon-pohon yang dulu ada disepanjang pinggir pantai itu ditebangi pak. (MG, 30 Mei 2013)</p> <p>Upami di pangandaran mah kegiatan ayeuna teh kegiatan anu sudah dilaksanakan semua, dari penghijauan, bersih-bersih pantai, bakti sosial, dsb. Sampai di pangandaran ge kan pada waktu dulu sudah tidak ada lahan, semua melaksanakan penghijauan bari jeung aya nu jadi aya nu henteu. (DH, 27 Maret 2013)</p> <p>Kita ada pengajian rutin tiap minggu, disini ada banyak masjid ada 9 masjid jami, melalui pengajian di RT atau RW dari sana muncul isu-isu yang perlu ditangani, apalagi menyangkut tentang sanitasi, kesehatan, lingkungan. (SA, 11 Mei 2013)</p> <p>Memang kalau disini kan bencana itu terjadi tsunami, sehingga yang paling ditakuti tsunami, pengalaman yang terjadi air laut surut dulu selama selang waktu setengah jam, disini sampai 200 meter. Keuntungannya kalau di pangandaran ini, di desa pangandaran ini wilayah yang berbentuk leher, sementara yang besarnya adalah wilayah hutan dan cagar alam yang disana tidak ada penghuninya. Pangandaran ini memiliki wilayah 637 Ha, yang sebagian besarnya 530 Ha itu adalah Hutan cagar alam itu, maka ketika tsunami juga ada perlindungan dari sana, terlindungi. (US, 10 Mei 2013)</p>	
D.2.	Perlindungan sosial	<p>Kalau pendanaan dari desa untuk bencana kan kita istilahnya tidak kita harap-harapkan, jadi tidak teragendakan secara rutin ataupun dilaksanakan secara rutin ini untuk penanganan bencana, tidak. Karena biasanya kalau ke bencana itukan sifatnya darurat, jadi kita ambil langkah yaitu melalui bantuan kelembagaan sosial. Kalau di plotkan ke bantuan kelembagaan sosial itu kan sifatnya luas, bisa untuk santunan</p>	

		<p>anak yatim piatu, untuk penyaluran bilamana ada anak yang tidak mampu bisa kita upayakan untuk agar ia bisa bersekolah lagi, dll. Kalau untuk bencana, kita tidak bisa menyebutkan angkanya sendiri sih pak kecuali kalau misalkan dari bencana pada saat itu baru kita tawarkan. Bantuan kelembagaan sosial itu sekitar 5 juta rupiah, ya memang terbilang kecil lah. (MG, 30 Mei 2013)</p> <p>Kegotong royongan merupakan nilai-nilai luhur sejak dulu, kita kembalikan lagi, untuk mengatasi kebencanaan yang ada di pangandaran ini. Alhamdulillah di RT 03 RW 09 saya sekarang ini masih ada <i>perelek</i>, itu secara historis juga sebagai nilai kearifan lokal, digunakan untuk kematian, atau ada musibah lainnya di tingkat RT, besarnya sekitar Rp 4000,- per bulan. Ini bisa dicontoh oleh RT lain yang vakum, ini penting sekali, manakala ada emergency ada yang meninggal, kita bisa beli kain kafan dari uang <i>perelek</i> tersebut. Kemudian arisan, disini bukan melihat masalah besar atau kecilnya nominal uang, tetapi silarutrahmi, karena dengan komunikasi tersebut akan mengetahui satu sama lain, akan mengetahui tingkat kemiskinan masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. (SA, 11 Mei 2013)</p> <p>Uang itu disimpan untuk operasional kalau terjadi bencana, pengalaman dulu kan kita susah, dulu memang tidak ada sama sekali. Dulu kan bagaimana cara penanggulangannya tidak tahu, kalo dulu kan akhirnya bantuan-bantuan dari luar yang datang ke sini. Karena kurang pengalaman akhirnya seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Besarannya kita ada target minimal 5 juta, kalau pendapatannya lebih besar itu bisa diubah, tapi minimal pada angka itu. (US, 10 Mei 2013)</p>	
<b>E</b>	<b>Kesiapsiagaan dan respon bencana</b>	<p>Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ciamis</p> <p>Aparat desa Pangandaran dan Pananjung</p>	

		Relawan FKDM Desa Pangandaran dan Desa Pananjung	
E.1.	Kapasitas organisasi dan koordinasi	<p>Kebetulan organisasi disini ada 2 yaitu OPRB dan FKDM. Dua organisasi tersebut sasarannya hampir sama, cuman yang membentuk berbeda. Kalau OPRB itu dibentuk oleh yayasan yang didanai oleh dana luar negeri, kalau FKDM itu kan program pemerintah. Tapi bukan berarti OPRB tidak didukung oleh pemerintah, sama juga difasilitasi terbentuknya itu. Kelihatannya ada beberapa orang yang disini masuk disana masuk. Sekarang yang lebih banyak kegiatan itu memang yang diselenggarakan oleh OPRB ini. Biasanya memang kalau yayasan apalagi di danai dari luar negeri banyak kegiatannya, kalau swasta dan dukungan dari luar negeri lebih serius. Kayaknya tidak begitu sulit menggabungkan, tapi kita harus sedia payung sebelum hujan. Supaya tidak terjadi <i>clash</i> antara 2 lembaga ini dibuat satu ketentuan, karena kalau nanti kebijakannya berbeda, akhirnya terjadi gesekan, kalau tidak ada payung hukum kan sulit juga, jadi bisa ditengahi oleh aturan yang ada. Kalau melihat orang-orangnya ya tadi ada yang masuk disini ada yang masuk disana. (US, 10 Mei 2013)</p> <p>Sebelum ada FKDM kebetulan saya berada di pengurusan OPRB (Organisasi Pengurangan Resiko Bencana), yang menindaklanjuti program dari Rekompak, kemudian oleh ADRA difasilitasi, akhirnya kita mendapatkan SK di Desa, kemudian Desa juga memfasilitasi dari Alokasi Dana Desa, lumayanlah untuk biaya operasional sebesar Rp. 1.700.000,- . Jadi saya mah di FKDM juga OPRB, duduk di dua organisasi satu tujuan. Jadi maksud saya mah kita jangan menunggu dana dari pemerintah saja, manakala FKDM tidak jalan karena tergantung dengan anggaran pemerintah, OPRB ini hidup, kita libatkan semua, termasuk ketika ada pemberdayaan dan simulasi ORARI misalnya saya libatkan juga. (SA, 11 Mei 2013)</p> <p>OPRB itu ada, tetapi hanya berjalan manakala akan ada kegiatan saja pak. Memang sebagian dari keanggotaan OPRB masuk ke FKDM, tapi tidak semuanya orang-</p>	

		<p>orang yang beranggotakan di OPRB masuk ke FKDM, jadi hanya sebagian saja seperti halnya Bapak Wasdi sebagai ketua karang taruna dia memang masuk ke OPRB ya masuk juga ke FKDM. Karena memang secara tidak langsung sebetulnya sama sih. Sama dalam artian ya sifatnya ya bagaimana cara kita megurangi resiko bencana lah begitu. Kalau OPRB itu kan pembentukan dari Rekompak tapi itu ada dari SK desa juga. (MG, 30 Mei 2013).</p>	
E.2.	Sistem peringatan dini	<p>Ada fasilitas walaupun tidak optimal karena kemaren dicoba enggak jadi, memang ada semacam alarm informasi tsunami itu ada di pasang, tapi memang kelihatannya karena kurang perawatan dan tidak ada perawatan khusus, untuk uji coba saja ada elemen-elemen yang harus diperbaiki dulu. Tapi kemarin waktu simulasi kita memperaktekkan itu, sehingga dapat memberikan perawatan khusus. (US, 10 Mei 2013).</p> <p>Mesjid Mujahidin menolak untuk dipasang <i>early warning system</i> karena pengeras suara ini bisa dipake tiap hari silahkan mau adzan mau pake ngaji, manakala ti Ciamis mencet bel sirine, ini otomatis akan berhenti, itu sistemna udah gitu. Mereka tidak mau, bahkan dikumpulkeun MUI, Kepala Desa Pak Iwan dikumpulkeun, agar bisa diterima untuk kemanusiaan, tapi tetap mesjid Mujahidin ini mah jawabnya “da ieu mah ti Kristen” kalau saya mah untuk kemanusiaan mah timana-mana juga bae, akhirnya dipasang di pos Angkatan Laut. Jadi yang difasilitasi ADRA untuk <i>early warning system</i> : Angkatan Laut, Mesjid Albahar, teras Balawista (<i>Lifeguard</i>). Kan ada 4 pos punya toa masing-masing yang di relai, itu sudah dipasang perangkatnya, sinyalnya udah ada, repeaternya udah ada. (SA, 27 Maret 2013)</p> <p>Kalau di Desa Pananjung sendiri, gini pak karena dari bibir pantai itu ada yang mengawasi kita tidak sendiri ada di Desa Pananjung kebetulan di sekitar area Pantai Pangandaran dan area lautnya, itu sudah ada yang menjaga sendiri pak, seperti</p>	

		halnya penjaga pantai sudah jelas menjaga pantai itu sendiri dari Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) gitu, jadi kita tidak terlepas koordinasi dengan badan ataupun instansi yang terkait makala kita membutuhkan pada waktu itu. (MG, 30 Mei 2013).	
E.3.	Kesiapsiagaan dan perencanaan kontinjensi	<p>Respon masyarakat terhadap kesiapsiagaan masih kurang kesadarannya. Ari kieu mah, Pak RT pak RW tolong kumpulkan warga boga jadwal jam sabaraha, iraha, jam sabaraha sok ek dimana ek di mesjid di imah RW silahkan, bade sosialisasi, tah karakter tsunami teh kieu kieu kieu, daratang kitu nya. Pas simulasina, anjir geningan ieu asin keneh, kumaha ieu pagawean can beres, aduh aing mah, kitu tah. Walaupun memang tingkat penyadarannya kurang, masyarakat sina ikut keterlibatan simulasi oge mikir dua kali, aneh nya abdi mah euy. Untung abdi oge kabantuna ku anak SD. Abdi nyuhunkeun instruksi ti Kepala UPTD untuk di kawasan desa Pangandaran ada 6 SD, kami mohon perwakilannya ada 20 putra putri jadi 40 satu SD teh, ngirimkeun ka tempat lokasi yang akan dilaksanakannya simulasi tsunami. Alhamdulillah Pak, kabantuna ku eta. Ari ti masyarakat, ngan Rt/Rw, malah milih usaha, karep mun tsunami deui karep ceuk aing teh. Jadi masih keneh punya <i>mindset</i>nya teh aya duitan euy, aya duitan euy, tah kitu. (SA, 27 Maret 2013)</p> <p>Kegiatan sendiri yang saya alami memang dari sejak dibentuk FKDM baru tiga kali ada pertemuan resmi. Membahas tentang rencana kerja, dan juga pengajuan konsep peraturan desa, yang selanjutnya menginventarisir bangunan-bangunan yang mungkin bisa digunakan untuk mitigasi bencana. Sekarang ini memang sedang dirancang supaya dalam melaksanakan tugasnya ada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Desa, jadi melangkah itu ada dasar hukumnya, memang peraturan desa tentang bencana itu nantinya mencakup langkah-langkah organisasi yang ada. (US, 10 Mei 2013)</p>	

		<p>Awalnya kita sudah mengagendakan secara rutin setiap satu bulan sekali, namun karena banyak kepentingan. Kadang kalau akan ada agenda kepada masyarakat saja baru kita komunikasikan dengan yang lain. Kalau didalam pertemuan rutin biasanya yang dibahas itu agendanya ya evaluasi lah biasanya. Karena dengan adanya evaluasi mengupayakan lah kedepannya supaya lebih baik, lebih bagus dan dapat ditingkatkan. Evaluasi dalam artian apakah kita terlalu dini secara langsung dalam menanggapi bencana sebelumnya, kita turun langsung ke lapangan atau tidak, kegiatan yang sudah dilakukan kita evaluasi. (MG, 30 Mei 2013).</p> <p>Kegiatan rutin FKDM pertemuana paling satu bulan sekali. Kegiatannya ya pertemuan, bakti sosial. Kalau umpamana dirutinkan seminggu sekali jadi jenuh. Kalau ada bencana kami siap. Kalau fasilitas mah ada ambulans desa, terus ya kaos seragam sudah ada. Kemarin terjadi vakum karena ada kegiatan pilkada, panitianya kan kita lagi, kita lagi. (DH, 27 Maret 2013)</p>	
E.4.	Respon kedaruratan dan pemulihan	<p>Sekarang di lapangan kegiatan kebencanaan baru satu kali pada waktu banjir di Bojongjati. Dari FKDM turunlah gitu, belum lamalah hujan-hujan kemarin, sekitar Januari Februanian. Tapi tidak dari FKDM semua, dari instansi juga ada, kita merapat bareng-bareng, kontrol dan sebagainya, ya ngasih yang emergensi, semacam air minum, sarimi pokoknya udah siap cepat saji, logistik, membantu evakuasi. Kebetulan tidak banyak dievakuasi cuman satu RT, besoknya udah surut lagi kebetulan. Memang hampir 40% Desa terendam, daerah sana pesawahan. (DH, 27 Maret 2013)</p> <p>Pada saat itu kita pernah terjadi banjir di akhir-akhir tahun 2012 itu terjadi banjir besar, lumayan itu. Biasanya di desa kita seting terjadi banjir besar itu sekitar September-Oktober. Karena pada saat terjadi memang musim penghujan yang cukup kencang, kadang selain banjir pun bersamaan dengan angin yang kencang</p>	

		<p>disini. Pada saat mulai terjadi bencana langsung seperti halnya banjir kita langsung turun ke lapangan, jadi sementara ini masih sangat sederhana dan masih mengandalkan yang ada di kita, seperti tenaga. Jadi ada waktu itu alhamdulillah kita dari forum kita bagi-bagi tugas dan turun ke lokasi, yang dilakukan diantaranya pertama tentunya kita yang paling utama itu menyelamatkan nyawa warga, jadi kita evakuasi dulu warga ke tempat yang lebih aman lalu kita menyelamatkan barang-barang ataupun perlengkapan rumah tangga milik warga yang ada di sekitar. (MG, 30 Mei 2013).</p> <p>Selanjutnya yang paling merepotkan adalah pada saat pasca bencana. Yah yang namanya orang, itu kan biasanya temperamennya tinggi, pasca bencana menyita tenaga, pikiran dan mental. Hal ini perlu diperhatikan karena pada pascabencana, mental orang kan terganggu, maka sangat sensitif, jadi cara penanggulangannya betul-betul harus memperhatikan keadilan dalam membuat kebijakan terhadap masyarakat. Contohnya ketika itu setelah terjadi bencana ada bantuan yang disalurkan terhadap korban, nah ketika itu ada bantuan yang bukan untuk korban tetapi untuk pemulihan ekonomi masyarakat, karena momennya ketika itu momen bencana maka yang meminta bantuan adalah korban, maka ketika penyaluran bantuan itu bukan kepada korban kemudian timbul kecemburuan, padahal programnya kan lain, karena programnya bersamaan maka itu dianggap untuk korban bencana. Dari sana akhirnya berkembang, salah satunya yaitu ada bantuan untuk pedagang asongan dan tukang beca, siapa pun tahu mereka tidak selamanya berada di pantai, bahkan ada yang tinggalnya di Kalipucang dan Padaherang, mungkin saja ketika terjadi bencana di Pangandaran mereka sedang tenang-tenang dan istirahat tapi mereka mendapatkan bantuan, karena memang konteksnya bantuan itu pemulihan ekonomi kan gitu, karena memang dia usahanya disini. Karena momennya bencana, akhirnya terjadi kecemburuan. Tadinya ada bantuan untuk rumah rusak, kerusakan apa saja diajukan, akibat dari itu akhirnya yang kewalahan</p>	
--	--	--	--

		<p>kan pemerintah, akibat dari kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah dari atas kurang hati-hati memberikannya. Akhirnya langkah yang diambil oleh pemerintah desa karena tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban bencana, maka masyarakat yang mengajukan harus membentuk kelompok dan kelompok itulah yang mengajukan dan diketahui oleh RT dan RW setempat. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2007 dan ketegangan di masyarakat pascabencana itu berlangsung hingga tahun 2010. Pemulihan psikologis pun ada di lakukan pemerintah maupun LSM setelah terjadinya bencana, anak-anak diajak ke pantai, dan ada juga orang-orang dewasa yang karena keluarganya meninggal ketika terjadi bencana tsunami, sehingga setelah upaya pemulihan yang dilakukan masyarakat lebih tenang dan melanjutkan kembali aktifitasnya. (US, 10 Mei 2013)</p>	
E.5.	Partisipasi dan kerelawanan	<p>Secara tidak langsung, kalau masyarakat kita bila dilihat dari rasa, swadaya, ataupun partisipasinya, ataupun sifat kemanusiaannya masih tinggi jadi tidak hanya mengandalkan dari forum ataupun badan yang beranggotakan lebih sedikitlah dibanding dari jumlah warga yang lebih besar dari kita gitu pak, jadi secara tidak langsung masyarakat ikut langsung membantu pada saat terjadi bencana secara langsung. (MG, 30 Mei 2013).</p> <p>Karena masyarakat majemuk kembali lagi ke masyarakat sebetulnya, masyarakat yang tidak peduli kalo disuruh-suruh aduh susah, ada yang datang sendiri meminta jatah setelah dikasih lalu pulang, ada. Ada yang punya kepedulian ikut bersih-bersih lingkungan ada, ada juga yang hanya bersihkan rumah saja. Jadi majemuklah orangnya, majemuk dengan berbagai alasan, berbagai kepentingan. Tidak mudah mencari orang yang memang ikhlas. (DH, 27 Maret 2013)</p>	

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Instansi
1	PT	Staf Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB
2	HY	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ciamis
3	AT	Kepala Seksi Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Ciamis
4	US	Sekretaris Desa & FKDM Pangandaran
5	SA	Relawan FKDM Desa Pangandaran
6	MG	Sekretaris Desa & FKDM Pananjung
7	DH	Ketua FKDM Desa Pananjung





**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Tentara Pelajar No. 9 Telp (0265) 771101 Ciamis 46211

Ciamis, 15 Maret 2013

Kepada :

Nomor : 070.3 /343-Kesbangpolinmas  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan penelitian

Yth. 1. Kepala BPBD Kab. Ciamis  
2. Kepala Desa Pangandaran dan  
Pananjung Kec. Pangandaran  
Kab. Ciamis

di-

TEMPAT

- I. Memperhatikan : Surat Direktur Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Nomor :155/H2.F9.06.PPs/PDP.04.02/2013 Tanggal 13 Maret 2013. Perihal Permohonan ijin penelitian
- II. Mengingat : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Perangkat Daerah.  
2 Keputusan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.  
3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

**MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG  
DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN  
DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :**

Nama : WAHYU HERIYADI NIM 1006832833  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Kampus UI, Depok.16424  
Maksud : Mengadakan penelitian  
Lokasi : BPBD, Kab. Ciamis, Desa Pangandaran, Desa Pananjung  
Lamanya : 15 Maret 2013 s.d 15 Juni 2013  
Judul : "PELAKSANAAN FASILITAS DESA TANGGUH BENCANA"  
Penanggungjawab : ARIF WIBOWO, S.Sos, S.Hum, M.Hum

**KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :**

1. Memperhatikan masalah keterlibatan umum dan keamanan.
2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/ rencana yang ditetapkan.
3. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi.
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.
5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN CIAMIS  
KASI KESBANG

**SUBARNAS, S.Sos., SH., M.S.E.**  
NIP.19730717 199303 1 001

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmasda Prop. Jabar;  
2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;  
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Ciamis;  
5. Direktur Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia;  
6. Camat Ciamis;  
7. Camat Pangandaran;  
8. Yang bersangkutan,

Pelaksanaan fasilitasi..., Wahyu Heriyadi, FISIP UI, 2013.